



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kalsifikasi Arsip.
- b. bahwa Klasifikasi Arsip sebagaimana di maksud pada pertimbangan huruf a, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 18 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pencipta Arsip.
6. Dinas adalah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atas peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
11. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
12. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan permanen, yang telah diverifikasi oleh Dinas.
14. Arsiparis adalah pejabat fungsional arsiparis pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Pencipta Arsip adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
16. Unit Pengolah adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab mengolah seluruh arsip aktif yang tercipta berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilingkungannya.
17. Unit Kearsipan III adalah Unit Kearsipan yang berkedudukan pada cabang dinas, balai, atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
18. Unit Kearsipan II adalah Unit Kearsipan yang berada pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab mengelola seluruh arsip inaktif di lingkungan Perangkat Daerah dan melaksanakan pembinaan kepada unit pengolah di lingkungannya.

19. Unit Kearsipan I adalah Unit Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Dinas dan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab dalam pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dan pembinaan kearsipan di lingkungan pencipta arsip.
20. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disebut JRA adalah pedoman yang digunakan dalam penyusutan arsip.
21. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip melalui pemindahan, pemusnahan dan/atau penyerahan.
22. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip.
23. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif dan sistematis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan pelayanan dalam suatu sistem kearsipan nasional.
24. Akuisisi Arsip Statis adalah proses adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas melalui verifikasi langsung dan/atau tidak langsung.
25. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disebut DPA adalah daftar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang berisikan arsip yang tidak ditemukan pada saat verifikasi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Klasifikasi Arsip, Kode Klasifikasi Arsip, Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip.

BAB II

Klasifikasi Arsip, Kode Klasifikasi Arsip dan

Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip

Bagian Kesatu

Klasifikasi Arsip

Pasal 3

- (1) Arsip yang diciptakan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dikelompokkan ke dalam klasifikasi arsip berdasarkan:
 - a. Fungsi dan/atau Urusan;
 - b. Kegiatan; dan
 - c. Transaksi.
- (2) Pengelompokan arsip berdasarkan klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kode Klasifikasi Arsip

Pasal 4

- (1) Kode klasifikasi menggunakan kombinasi huruf dan angka.
- (2) Kode huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menggambarkan urusan.
- (3) Kode angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk fungsi, kegiatan, dan transaksi pada masing-masing urusan.

Pasal 5

Pengaturan Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan Kode Klasifikasi

Pasal 6

- (1) Setiap arsip yang tercipta wajib diklasifikasikan dengan menggunakan kode klasifikasi berdasarkan fungsi, kegiatan, dan transaksinya.
- (2) Penggunaan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pemberkasan, pembuatan daftar arsip aktif, inaktif, statis, dan pembuatan daftar arsip usul pindah, usul serah, dan usul musnah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 89 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Mei 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TANGGAL : 15 MEI 2018

TENTANG : KLASIFIKASI ARSIP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

A. Urusan Dan Susunan Pola Klasifikasi:

Fasilitatif:

HM	Hubungan Masyarakat.
HK	Hukum.
TU	Ketatausahaan.
OT	Organisasi Dan Tata Laksana.
PL	Perlengkapan.
RT	Kerumahtanggaan.
PR	Perencanaan.
PP	Penelitian dan Pengembangan.
PW	Pengawasan.
KU	Keuangan.
KP	Kepegawaian.
DK	Kediklatan.
AR	Kearsipan.
PD	Pemerintahan Daerah.
ST	Statistik.
SD	Pesandian.

Subtantif:

KP	Kelautan dan Perikanan.
HT	Kehutanan.
PT	Pertanian.
LH	Lingkungan Hidup.
PM	Penanaman Modal.
DG	Perdagangan.
PI	Perindustrian.
PE	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
ES	Energi Sumber Daya Mineral.
PA	Pangan.
PU	Pekerjaan Umum.
PR	Perumahan Rakyat.
PB	Penanggulangan Bencana.
KI	Komunikasi Dan Informatika.
PH	Perhubungan.
DT	Pembangunan Daerah Tertinggal.
TK	Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi.
PO	Kepemudaan dan Olah Raga.
KK	Kependudukan Dan Keluarga Berencana.
PP	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

PK	Pendidikan dan Kebudayaan.
PS	Perpustakaan.
KS	Kesehatan.
PO	Pengawasan Obat Dan Makanan.
SS	Sosial.

Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah per urusan, diperlukan kode dan singkatan nama komponen untuk Pemerintahan Daerah Provinsi diatur sebagai berikut:

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.	Sekda
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

B. Perincian Kode Klasifikasi Dan Indeks Kaitan

HM. Hubungan Masyarakat:

- 01 Penerangan dan Publikasi.
- 02 Dengar pendapat/*hearing*.
- 02 Hubungan Antar Lembaga.
 - 01 Forkompimda.
 - 02 Organisasi Kearsipan Nasional dan Internasional.
 - 03 Instansi Vertikal.
 - 04 Organisasi Kemasyarakatan.
 - 05 Perguruan Tinggi/Sekolah.
 - 06 Partai Politik.
 - 07 Swasta.
 - 08 Bakohumas.
- 03 Keprotokolan:
 - 01 Upacara/Acara Kedinasan.
 - 02 Kunjungan.
 - 03 Agenda Pimpinan.
- 04 Dokumentasi dan Penerbitan.
- 05 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan.
- 06 Ucapan.
- 07 Dokumen Hosting.

HK. Hukum:

- 01 Program Legislasi.
 - 01 Perencanaan Program Legislasi Daerah.
 - 02 Evaluasi Program Legislasi.
- 02 Produk Hukum.
 - 01 Proses Penyusunan Peraturan Daerah.
 - 02 Proses Penyusunan Peraturan Gubernur.
 - 03 Proses Penyusunan Keputusan Gubernur.
- 02 Perjanjian Kerjasama.
 - 01 Kerjasama Dalam Negeri.
 - 02 Kerjasama Luar Negeri.

- 03 Bantuan Hukum.
 - 01 Bantuan Hukum Kasus Perdata.
 - 02 Bantuan Hukum Kasus Pidana.
 - 03 Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara.
- 04 Telaah Hukum.
 - 01 Telaah Hukum Internal.
 - 02 Telaah Hukum Eksternal.
- 05 Sosialisasi Hukum.
- 06 Dokumentasi Hukum.
 - 01 Kegiatan Pengembangan Dokumentasi Hukum.
 - 02 Data Base Dokumentasi HUKUM.
- 07 Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 08 Penegakan Hukum.
 - 01 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah.
 - 02 Tindak lanjut Kegiatan Penegakan Hukum.
- 09 Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - 01 Program Pengembangan PPNS.
 - 02 Pembinaan Personal PPNS.

TU. Ketatausahaan:

- 01 Persuratan.
 - 01 Pengurusan Surat Masuk.
 - 02 Pengurusan Surat Keluar.
 - 03 Korespondensi Internal.
- 02 Penggandaan Surat Masuk.
- 03 Agenda Kegiatan.
- 04 Rapat/Rakor/Rakernis.

OT. Organisasi dan Tata Laksana:

- 01 Organisasi.
 - 01 Struktur Organisasi.
 - 02 Uraian Tugas.
 - 03 Analisis Jabatan dan Beban Kerja.
- 02 Hubungan / Mekanisme Kerja.
- 03 Ketatalaksanaan.

PL. Perlengkapan:

- 01 Analisa Kebutuhan.
- 02 Tata Ruang.
- 02 Daftar Perkenalan Mampu.
- 03 Penerimaan / Realisasi Pengadaan.
 - 00 Alat Tulis Kantor.
 - 01 Perlengkapan Kantor.
 - 02 Tanah dan Bangunan.
 - 03 Kendaraan.
 - 04 Instalasi/Jaringan.
 - 05 Peralatan Kearsipan.
- 04 Penyimpanan/Pergudangan.
- 05 Distribusi.
- 06 Pemeliharaan.

- 07 Inventarisasi.
- 08 Penghapusan.

RT. Kerumahtanggaan:

- 01 Perjalanan Dinas Pimpinan.
 - 01 Dalam Negeri.
 - 02 Luar Negeri.
- 02 Rapat Pimpinan.
 - 01 Sarana dan Prasarana.
 - 02 Jamuan Rapat.
- 03 Kantor.
 - 01 Pemeliharaan gedung.
 - 02 Perlengkapan Kantor.
 - 03 Air, Listrik dan Telekomunikasi.
 - 04 Keamanan Kantor.
 - 05 Kebersihan Kantor.
 - 06 Jamuan Tamu.
 - 07 Halaman dan Taman.
- 04 Rumah Dinas.
 - 01 Pemeliharaan Gedung.
 - 02 Perlengkapan Rumah Dinas.
 - 03 Air, Listrik dan Telekomunikasi.
 - 04 Keamanan Rumah Dinas.
 - 05 Kebersihan Rumah Dinas.
 - 06 Jamuan Tamu.
 - 07 Halaman dan Taman.
- 05 Fasilitas Pimpinan.
 - 01 Kendaraan Dinas.
 - 02 Pengawasan dan Pengamanan.
 - 03 Telekomunikasi.

PR. Perencanaan:

- 01 Usulan Perencanaan.
 - 01 Aspirasi DPRD.
 - 02 Usulan langsung Masyarakat On Line dan manual.
 - 03 Usulan Perangkat Daerah.
 - 04 Usulan Unit Kerja dalam Perangkat Daerah.
- 03 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
 - 01 Musrenbang RPJP/RPJM.
 - 02 Musrenbang RKPD.
 - 03 Forum Perangkat Daerah.
- 02 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan.
 - 01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
 - 02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - 03 Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 03 Rencana Kerja Tahunan.
 - 01 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - 02 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

- 03 Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- 04 Penetapan Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah.
- 05 Penetapan Kinerja Pejabat Esselon 3 dan Esselon 4.
- 04 Rencana Pembangunan Wilayah Startegis.
 - 01 Pusat Pertumbuhan Nasional dan Regional.
 - 02 Metro Politan Bandung dan Bodebekkapur.
 - 03 Pembangunan Bagian Wilayah.
 - 04 Pembangunan Tematik.
 - 05 Pembangunan Sektoral.
- 05 Pembangunan Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat.
 - 01 Kajian Rencana Pembangunan Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat.
 - 02 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat.
 - 03 Kerja Sama Pembangunan Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat.
- 06 Indikator Keberhasilan Pembangunan.
 - 01 Kajian Penetapan Indikator Keberhasilan Pembangunan.
 - 02 Evaluasi Capaian Indikator Keberhasilan Pembangunan.
- 07 Kerjasama Perencanaan.
 - 01 Kegiatan -- ite Perencanaan.
 - 02 Rekomen Komite Perencana.
 - 03 Kerjasama perencanaan dengan Perguruan Tinggi.
 - 04 Kerjasama perencanaan dengan Pemerintah Daerah.
 - 05 Kerjasama Perencanaan dengan Luar Negeri.
- 08 Pejabat Fungsional Perencanaan (Perencana).
 - 01 Kajian Pengembangan Perencana.
 - 02 Pembinaan Perencana.
- 09 Laporan.
 - 01 Laporan Berkala (Laporan Triwulan dan Semesteran).
 - 02 Laporan Tahunan Esselon 3.
 - 03 Laporan Tahunan Perangkat Daerah.
 - 04 Laporan Khusus.
 - 05 Progress Report.
 - 06 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- 10 Evaluasi Program / Kegiatan.
 - 01 Unit Kerja.
 - 02 Lembaga/Instansi.
- 11 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan.
- 12 Konsultasi Perencanaan Pembangunan.
- 13 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan.
- 14 Perencanaan Pendanaan Pembangunan.
 - 01 Pendanaan Luar Negeri dan Hibah.
 - 02 Pendanaan Dalam Negeri.
 - 03 Kerjasama Pembangunan Internasional.
 - 04 Surat Berharga Syariah Negara.

- 05 Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru.
- 06 Corporate Social Responcibility (CSR).

PP. Penelitian dan Pengembangan:

- 01 Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah.
 - 01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah.
 - 02 Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah.
- 02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi.
 - 01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi.
 - 02 Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi.
- 03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya.
 - 01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya.
 - 02 Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya.
- 04 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi.
 - 01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - 02 Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 05 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - 01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - 02 Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - 03 Pemasarakatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- 05 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan.
 - 01 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Antar Pemerintah Daerah.
 - 02 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dengan Peguruan Tinggi.
 - 03 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan Swasta dan Masyarakat.
 - 04 Dewan Research Daerah.
- 06 Hasil Penelitian dan Pengembangan.
 - 01 Data Base Hasil Penelitian dan Pengembangan.
 - 02 Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan.
 - 03 Penerbitan Jurnal.
- 07 Pengembangan Inovasi Daerah.
 - 01 Bantuan Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah.
 - 02 Penghargaan Inovasi Daerah.
- 08 Sumberdaya Manusia Penelitian dan Pengembangan.
 - 01 Pengembangan Sumberdaya Manusia Penelitian dan Pengembangan.
 - 02 Pembinaan Peneliti.

PW. Pengawasan:

- 01 Rencana Kegiatan Pengawasan.
 - 01 Rencana Kegiatan Pengawasan Tahunan.
 - 02 Rencana Kegiatan Pengawasan Khusus.
- 02 Pengawasan Tahunan.
 - 01 Kegiatan Audit Keuangan dan Kinerja Tahun Berjalan.
 - 02 Laporan Hasil Audit Keuangan dan Kinerja Tahun Berjalan.
 - 03 Tindak Lanjut Hasil Audit.
- 03 Pengawasan Khusus.
 - 01 Kegiatan Audit Khusus.
 - 02 Laporan Hasil Audit Khusus.
 - 03 Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus.
- 04 Pengaduan Masyarakat.
 - 01 Pusat Pengaduan Masyarakat.
 - 02 Penanganan/Tindak Lanjut Atas Pengaduan Masyarakat.
 - 03 Evaluasi Penanganan/Tindak Lanjut.
- 04 Pengawasan Melekat.
 - 01 Sosialisasi.
 - 02 Kegiatan Pengawasan Melekat.
 - 03 Evaluasi Kegiatan Pengawasan Melekat.
- 05 Pemantauan.
- 06
 - 01 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program.
 - 02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan.
 - 03 Tuntutan Ganti Rugi.
- 07 Sumberdaya Manusia Pengawasan (Auditor).
 - 01 Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengawasan.
 - 02 Pembinaan Auditor.
- 08 Pengembangan Akuntabilitas Publik.
 - 01 Desk Akuntabilitas.
 - 02 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
 - 03 Pemantauan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
 - 04 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

KU. Keuangan:

- 01 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan:
 - 01 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran:
 - 01 Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra
 - 02 Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
 - 03 KUA beserta Nota Kesepakatannya
 - 04 Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - 05 Nota Kesepakatan PPA.
 - 06 Prioritas Plafon Anggaran.
 - 02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD):

- 01 Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah,
 - 02 Dokumen RKA-SKPD.
- 03 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
- 01 Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD.
 - 02 Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah.
 - 03 Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD.
 - 04 Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya.
 - 05 Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD beserta penjabarannya.
 - 06 Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD.
 - 07 Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya.
 - 08 Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD.
- 04 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P):
- 01 Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Perubahan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).
 - 02 Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemda.
 - 03 KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya.
 - 04 Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.
 - 05 Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan.
 - 06 Prioritas Plafon Anggaran Perubahan.
- 05 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan:
- 01 Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah.
 - 02 Dokumen RKA-SKPD Perubahan.
- 06 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD):
- 01 Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan, Nota Keuangan Pemerintah dan Materi RAPBD.
 - 02 Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah.
 - 03 Dokumen Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan.
 - 04 Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya.
 - 05 Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya.

- 06 Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan.
 - 07 Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya.
 - 08 Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan.
- 02 Penyusunan Anggaran:
- 01 Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.
 - 02 Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota.
 - 03 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah.
 - 04 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 03 Pelaksanaan Anggaran:
- 01 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS.
 - 02 Pendapatan Asli Daerah:
 - 01 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Kendaraan Bermotor.
 - 02 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - 03 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 - 04 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Air Permukaan.
 - 05 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Rokok.
 - 06 Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
 - 07 Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Umum.
 - 08 Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha.
 - 09 Bukti Pembayaran Retribusi Perijinan Tertentu.
 - 10 Bukti Pembayaran Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
 - 11 Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
 - 12 Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat.
 - 13 Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
 - 14 Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum.
 - 15 Bukti Penerimaan dari Pengelolaan Dana Bergulir.
 - 16 Bukti Penerimaan Bunga dan atau jasa Giro pada bank.
 - 03 Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan:
 - 01 Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak.
 - 02 Dana Bagi Hasil Untuk Kabupaten /Kota.
 - 03 Dana Alokasi Umum (DAU).
 - 04 Daerah yang Menerima DAU.
 - 05 Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 04 Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah:
 - 01 Alokasi Dana Penyesuaian.
 - 02 Dana Otonomi Khusus dan Bantuan Operasional Sekolah.

- 03 Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat.
- 04 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 05 Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah Lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga.
- 05 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- 06 Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- 07 Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 08 Dokumen Piutang Daerah.
- 09 Dokumen Pengelolaan Investasi.
- 10 Dokumen Belanja Langsung:
 - 01 Belanja Pegawai.
 - 02 Belanja Barang Jasa.
 - 03 Belanja Modal.
- 11 Dokumen Belanja tidak langsung:
 - 01 Pegawai.
 - 02 Hibah.
 - 03 Belanja Bagi Hasil.
 - 04 Subsidi.
 - 05 Bunga.
 - 06 Bantuan Sosial.
 - 07 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - 08 Belanja Tidak Terduga.
- 04 Pembiayaan Daerah:
 - 01 Bukti Penerimaan Pembiayaan:
 - 01 SiLPA.
 - 02 Dana Cadangan.
 - 03 Dana Bergulir.
 - 04 Pinjaman Daerah.
 - 05 Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD.
 - 02 Bukti Pengeluaran Pembiayaan:
 - 01 Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir.
 - 02 Penyertaan Modal Pada BUMD.
 - 03 Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD.
 - 04 Pengeluaran Dari Dana Cadangan.
 - 05 Pembiayaan Bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM).
 - 06 Penyertaan Modal Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemda.
- 05 Dokumen Penatausahaan Keuangan:
 - 01 Surat Penyediaan Dana (SPD).
 - 02 Surat Permohonan Pembayaran (SPP).
 - 03 Surat Perintah Membayar (SPM).
 - 04 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 06 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana:
 - 01 Buku Kas Umum (BKU).
 - 02 Buku Kas Pembantu (BKP).
 - 03 Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek.
 - 04 Rekening Koran Bank.
 - 05 Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi.

- 06 Bukti Penyetoran Pajak.
 - 07 Register Penutupan Kas.
 - 08 Berita Acara Pemeriksaan.
 - 09 Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Arsip Data Komputer (ADK).
 - 10 Laporan Pendapatan Negara.
 - 11 Laporan Keadaan Kredit Anggaran.
- 07 Daftar Gaji.
 - 08 Kartu Gaji.
 - 09 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - 10 Laporan Keuangan Tahunan:
 - 01 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 02 Neraca
 - 03 Laporan Arus Kas
 - 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 11 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri:
 - 01 Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book).
 - 02 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book).
 - 03 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya.
 - 04 Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender.
 - 05 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain Usulan Luncuran Dana.
 - 06 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut Lampirannya:
 - 01 Reimbursement.
 - 02 Direct Payment/Transfer Procedure.
 - 03 Special Commitment/ L/C Opening.
 - 04 Special Account/Imprest Fund.
 - 07 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice).
 - 08 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya.
 - 09 Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE).
 - 10 Staff Appraisal Report.
 - 11 Report/Laporan yang terdiri dari:
 - 01 Progress Report.
 - 02 Monthly Report.
 - 03 Quarterly Report.
 - 12 Laporan Hutang Daerah:
 - 01 Laporan Pembayaran Hutang Daerah.
 - 02 Laporan Posisi Hutang Daerah.
 - 13 Completion Report/Annual Report.
 - 14 Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri.
 - 12 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

- 01 Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan:
 - 01 Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 02 Kuasa Pengguna Barang/Jasa.
 - 03 Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 04 Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
 - 05 Pejabat Penandatanganan SPM.
 - 06 Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.
 - 07 Pengelola Barang.
 - 08 Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- 13 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD):
 - 01 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).
 - 02 Kebijakan Akuntansi.
 - 03 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi.
 - 04 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran.
- 14 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan:
 - 01 Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan.
 - 02 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya:
 - 01 SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil.
 - 02 Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya antara lain Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank.
 - 03 Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 - 03 Buku Rekening Bank.
 - 04 Keputusan Pembukuan Rekening.
 - 05 Pembukuan anggaran terdiri dari:
 - 01 Buku Kas Umum (BKU).
 - 02 Buku Pembantu.
 - 03 Register dan Buku Tambahan.
 - 04 Daftar Pembukuan Selama rekening masih aktif.
 - 05 Pencairan/Pengeluaran (DPP).
 - 06 Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP).
 - 07 Daftar Himpunan Pencairan (DHP).
 - 08 Rekening Koran.
- 15 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan:
 - 01 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas. Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya.
 - 02 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan.
- 16 Pengelolaan Anggaran Pemilu:
 - 01 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD.
 - 01 Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu.

- 02 Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu.
 - 03 Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Provinsi, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas.
 - 04 Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu.
 - 05 Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Provinsi.
 - 06 Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Provinsi dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD.
 - 07 Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada.
 - 08 Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD.
 - 09 Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD.
- 10 Pelaksanaan Anggaran Pilkada Dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu:
- 01 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu.
 - 02 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu.
 - 03 Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro.
 - 04 Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank.
 - 05 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya.
- 11 Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu:
- 01 Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya.
 - 02 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Provinsi, Panwasda dan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) PPK dan Panwas.
 - 03 Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank.
- 12 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah:
- 01 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan.
 - 02 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal.
 - 03 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional:
 - 01 LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).
 - 02 MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan).
 - 03 Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP.
 - 04 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah:
 - 01 Tuntutan Perbendaharaan.
 - 02 Tuntutan Ganti Rugi.

HM. Hubungan Masyarakat:

- 01 Penerangan dan Publikasi.

- 02 Dengar Pendapat/*hearing*.
 - 02 Hubungan Antar Lembaga:
 - 01 Forkompimda.
 - 02 Organisasi Kearsipan Nasional dan Internasional.
 - 03 Instansi Vertikal.
 - 04 Organisasi Kemasyarakatan.
 - 05 Perguruan Tinggi/Sekolah.
 - 06 Partai Politik.
 - 07 Swasta.
 - 08 Bakohumas.
 - 03 Keprotokolan:
 - 01 Upacara/Acara Kedinasan.
 - 02 Kunjungan.
 - 03 Agenda Pimpinan.
 - 04 Dokumentasi dan Penerbitan.
 - 05 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan.
 - 06 Ucapan.
 - 07 Dokumen Hosting.
- HK . Hukum:
- 01 Program Legislasi:
 - 01 Perencanaan Program Legislasi daerah.
 - 02 Evaluasi Program Legislasi.
 - 02 Produk Hukum:
 - 01 Proses Penyusunan Peraturan Daerah.
 - 02 Proses Penyusunan Peraturan Gubernur.
 - 03 Proses Penyusunan Keputusan Gubernur.
 - 02 Perjanjian Kerjasama:
 - 01 Kerjasama Dalam Negeri.
 - 02 Kerjasama Luar Negeri.
 - 03 Bantuan Hukum:
 - 01 Bantuan Hukum Kasus Perdata.
 - 02 Bantuan Hukum Kasus Pidana.
 - 03 Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 04 Telaah Hukum:
 - 01 Telaah Hukum Internal.
 - 02 Telaah Hukum Eksternal.
 - 05 Sosialisasi Hukum.
 - 06 Dokumentasi Hukum:
 - 01 Kegiatan Pengembangan Dokumentasi Hukum.
 - 02 Data Base Dokumentasi HUKUM.
 - 07 Hak Atas Kekayaan Intelektual.
 - 08 Penegakan Hukum:
 - 01 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah.
 - 02 Tindak lanjut Kegiatan Penegakan Hukum.
 - 09 Penyidik Pegawai Negeri Sipil:
 - 01 Program Pengembangan PPNS.
 - 02 Pembinaan Personal PPNS.
- TU. Ketatausahaan:
- 01 Persuratan:

- 01 Pengurusan Surat Masuk.
- 02 Pengurusan Surat Keluar.
- 03 Korespondensi Internal.
- 02 Penggandaan Surat Masuk.
- 03 Agenda Kegiatan.
- 04 Rapat/Rakor/Rakernis.

OT. Organisasi Dan Tata Laksana:

- 01 Organisasi:
 - 01 Struktur Organisasi.
 - 02 Uraian Tugas.
 - 03 Analisis Jabatan dan Beban Kerja.
- 02 Hubungan / Mekanisme Kerja.
- 03 Ketatalaksanaan.

PL. Perlengkapan:

- 01 Analisa Kebutuhan.
- 02 Tata Ruang.
- 02 Daftar Perkenalan Mampu.
- 03 Penerimaan / Realisasi Pengadaan:
 - 00 Alat Tulis Kantor.
 - 01 Perlengkapan Kantor.
 - 02 Tanah dan Bangunan.
 - 03 Kendaraan.
 - 04 Instalasi/Jaringan.
 - 05 Peralatan Kearsipan.
- 04 Penyimpanan/ pergudangan.
- 05 Distribusi.
- 06 Pemeliharaan.
- 07 Inventarisasi.
- 08 Penghapusan.

RT. Kerumahtanggaan:

- 01 Perjalanan Dinas Pimpinan:
 - 01 Dalam Negeri.
 - 02 Luar Negeri.
- 02 Rapat Pimpinan:
 - 01 Sarana dan Prasarana.
 - 02 Jamuan Rapat.
- 03 Kantor:
 - 01 Pemeliharaan Gedung.
 - 02 Perlengkapan Kantor.
 - 03 Air, Listrik dan Telekomunikasi.
 - 04 Keamanan Kantor.
 - 05 Kebersihan Kantor.
 - 06 Jamuan Tamu.
 - 07 Halaman dan Taman.
- 04 Rumah Dinas:
 - 01 Pemeliharaan Gedung.
 - 02 Perlengkapan Rumah Dinas.
 - 03 Air, Listrik dan Telekomunikasi.
 - 04 Keamanan Rumah Dinas.
 - 05 Kebersihan Rumah Dinas.
 - 06 Jamuan Tamu.
 - 07 Halaman dan Taman.

- 05 Fasilitas Pimpinan:
 - 01 Kendaraan Dinas.
 - 02 Pengawasan dan Pengamanan.
 - 03 Telekomunikasi.

PR. Perencanaan:

- 01 Usulan Perencanaan:
 - 01 Aspirasi DPRD.
 - 02 Usulan langsung Masyarakat On Line dan manual.
 - 03 Usulan Perangkat Daerah.
 - 04 Usulan Unit Kerja dalam Perangkat Daerah.
- 03 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang):
 - 01 Musrenbang RPJP/RPJM.
 - 02 Musrenbang RKPD.
 - 03 Forum Perangkat Daerah.
- 02 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan:
 - 01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
 - 02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - 03 Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 03 Rencana Kerja Tahunan:
 - 01 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - 02 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).
 - 03 Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
 - 04 Penetapan Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah.
 - 05 Penetapan Kinerja Pejabat Esselon 3 dan Esselon 4.
- 04 Rencana Pembangunan Wilayah Startegis:
 - 01 Pusat Pertumbuhan Nasional dan Regional.
 - 02 Metro Politan Bandung dan Bodebekkapur.
 - 03 Pembangunan Bagian Wilayah.
 - 04 Pembangunan Tematik.
 - 05 Pembangunan Sektoral.
- 05 Pembangunan Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat:
 - 01 Kajian Rencana Pembangunan Daerah Perbatasan Prov. Jawa Barat.
 - 02 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perbatasan Prov. Jawa Barat.
 - 03 Kerja Sama Pembangunan Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat.
- 06 Indikator Keberhasilan Pembangunan:
 - 01 Kajian penetapan Indikator Keberhasilan Pembangunan.
 - 02 Evaluasi Capaian Indikator Keberhasilan Pembangunan.
- 07 Kerjasama Perencanaan:
 - 01 Kegiatan Komite Perencanaan.
 - 02 Rekomendasi Komite Perencana.
 - 03 Kerjasama Perencanaan dengan Perguruan Tinggi.
 - 04 Kerjasama Perencanaan dengan Pemerintah Daerah.
 - 05 Kerjasama Perencanaan dengan Luar Negeri.

- 08 Pejabat Fungsional Perencanaan (Perencana):
 - 01 Kajian Pengembangan Perencana.
 - 02 Pembinaan Perencana.
- 09 Laporan:
 - 01 Laporan Berkala (Laporan Triwulan dan Semesteran).
 - 02 Laporan Tahunan Esselon 3.
 - 03 Laporan Tahunan Perangkat Daerah.
 - 04 Laporan Khusus.
 - 05 Progress Report.
 - 06 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- 10 Evaluasi Program / Kegiatan:
 - 01 Unit Kerja.
 - 02 Lembaga/Instansi.
- 11 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan.
- 12 Konsultasi Perencanaan Pembangunan.
- 13 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan.
- 14 Perencanaan Pendanaan Pembangunan:
 - 01 Pendanaan Luar Negeri dan Hibah.
 - 02 Pendanaan Dalam Negeri.
 - 03 Kerjasama Pembangunan Internasional.
 - 04 Surat Berharga Syariah Negara.
 - 05 Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru.
 - 06 Corporate Social Responcibility (CSR).

PP. Penelitian dan Pengembangan:

- 01 Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah:
 - 01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah.
 - 02 Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah.
- 02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi:
 - 01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi.
 - 02 Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi.
- 03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya:
 - 01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya.
 - 02 Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya.
- 04 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:
 - 01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - 02 Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 05 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna:
 - 01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

- 02 Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- 03 Pemasaryakatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- 05 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan:
 - 01 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Antar Pemerintah Daerah.
 - 02 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan Peguruan Tinggi.
 - 03 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan Swasta dan Masyarakat.
 - 04 Dewan Research Daerah.
- 06 Hasil Penelitian dan Pengembangan:
 - 01 Data Base Hasil Penelitian dan Pengembangan.
 - 02 Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan.
 - 03 Penerbitan jurnal.
- 07 Pengembangan Inovasi Daerah:
 - 01 Bantuan Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah.
 - 02 Penghargaan Inovasi Daerah.
- 08 Sumberdaya Manusia Penelitian dan Pengembangan:
 - 01 Pengembangan Sumberdaya Manusia Penelitian dan Pengembangan.
 - 02 Pembinaan Peneliti.

PW. Pengawasan:

- 01 Rencana Kegiatan Pengawasan:
 - 01 Rencana Kegiatan Pengawasan Tahunan.
 - 02 Rencana Kegiatan Pengawasan Khusus.
- 02 Pengawasan Tahunan:
 - 01 Kegiatan Audit Keuangan dan Kinerja Tahun Berjalan.
 - 02 Laporan Hasil Audit Keuangan dan Kinerja Tahu Berjalan.
 - 03 Tindak Lanjut Hasil Audit.
- 03 Pengawasan Khusus:
 - 01 Kegiatan Audit Khusus.
 - 02 Laporan Hasil Audit Khusus.
 - 03 Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus.
- 04 Pengaduan Masyarakat:
 - 01 Pusat Pengaduan Masyarakat.
 - 02 Penanganan/tindak lanjut atas Pengaduan Masyarakat.
 - 03 Evaluasi Penanganan / tindak lanjut.
- 04 Pengawasan Melekat:
 - 01 Sosialisasi.
 - 02 Kegiatan Pengawasan Melekat.
 - 03 Evaluasi Kegiatan Pengawasan Melekat.
- 05 Pemantauan:
- 06
 - 01 Pemantauan pelaksanaan kegiatan/program.
 - 02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP).
 - 03 Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

- 07 Sumberdaya Manusia Pengawasan (Auditor):
 - 01 Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengawasan.
 - 02 Pembinaan Auditor.
- 08 Pengembangan Akuntabilitas Publik:
 - 01 Desk Akuntabilitas.
 - 02 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
 - 03 Pemantauan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
 - 04 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

KU. Keuangan:

- 01 Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P):
 - 01 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA):
 - 01 Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra.
 - 02 Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemda.
 - 03 KUA beserta Nota Kesepakatannya.
 - 04 Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 - 05 Nota Kesepakatan PPA.
 - 06 Prioritas Plafon Anggaran.
 - 02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD):
 - 01 Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah.
 - 02 Dokumen RKA-SKPD.
 - 03 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD):
 - 01 Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD.
 - 02 Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah.
 - 03 Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD.
 - 04 Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya.
 - 05 Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD beserta penjabarannya.
 - 06 Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD.
 - 07 Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya.
 - 08 Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD.
 - 04 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P):
 - 01 Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Perubahan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).
 - 02 Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemda.

- 03 KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya.
- 04 Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.
- 05 Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan.
- 06 Prioritas Plafon Anggaran Perubahan.
- 05 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan:
 - 01 Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah.
 - 02 Dokumen RKA-SKPD Perubahan.
- 06 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD):
 - 01 Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan, Nota Keuangan Pemerintah dan Materi RAPBD.
 - 02 Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah.
 - 03 Dokumen Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan.
 - 04 Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya.
 - 05 Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya.
 - 06 Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan.
 - 07 Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya.
 - 08 Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan.
- 02 Penyusunan Anggaran:
 - 01 Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.
 - 02 Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota.
 - 03 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah.
 - 04 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 03 Pelaksanaan Anggaran:
 - 01 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS.
 - 02 Pendapatan Asli Daerah:
 - 01 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Kendaraan Bermotor.
 - 02 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - 03 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 - 04 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Air Permukaan.

- 05 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Rokok.
- 06 Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- 07 Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Umum.
- 08 Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha.
- 09 Bukti Pembayaran Retribusi Perijinan Tertentu.
- 10 Bukti Pembayaran Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- 11 Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- 12 Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat.
- 13 Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
- 14 Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum.
- 15 Bukti Penerimaan dari Pengelolaan Dana Bergulir.
- 16 Bukti Penerimaan Bunga dan atau jasa Giro pada bank.
- 03 Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan:
 - 01 Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak.
 - 02 Dana Bagi Hasil Untuk Kabupaten /Kota.
 - 03 Dana Alokasi Umum (DAU).
 - 04 Daerah yang Menerima DAU.
 - 05 Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 04 Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah:
 - 01 Alokasi Dana Penyesuaian.
 - 02 Dana Otonomi Khusus dan Bantuan Operasional Sekolah.
 - 03 Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat.
 - 04 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - 05 Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah Lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga.
- 05 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- 06 Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- 07 Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 08 Dokumen Piutang Daerah.
- 09 Dokumen Pengelolaan Investasi.
- 10 Dokumen Belanja Langsung:
 - 01 Belanja Pegawai.
 - 02 Belanja Barang Jasa.
 - 03 Belanja Modal.
- 11 Dokumen Belanja tidak langsung:
 - 01 Pegawai.
 - 02 Hibah.
 - 03 Belanja Bagi Hasil.
 - 04 Subsidi.
 - 05 Bunga.
 - 06 Bantuan Sosial.
 - 07 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - 08 Belanja Tidak Terduga.
- 04 Pembiayaan Daerah:
 - 01 Bukti Penerimaan Pembiayaan.
 - 01 SiLPA.

- 02 Dana Cadangan.
- 03 Dana Bergulir.
- 04 Pinjaman Daerah.
- 05 Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD.
- 02 Bukti Pengeluaran Pembiayaan:
 - 01 Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir.
 - 02 Penyertaan Modal Pada BUMD.
 - 03 Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD.
 - 04 Pengeluaran Dari Dana Cadangan.
 - 05 Pembiayaan Bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM).
 - 06 Penyertaan Modal Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemda.
- 05 Dokumen Penatausahaan Keuangan:
 - 01 Surat Penyediaan Dana (SPD).
 - 02 Surat Permohonan Pembayaran (SPP).
 - 03 Surat Perintah Membayar (SPM).
 - 04 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 06 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana:
 - 01 Buku Kas Umum (BKU).
 - 02 Buku Kas Pembantu (BKP).
 - 03 Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek.
 - 04 Rekening Koran Bank.
 - 05 Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi.
 - 06 Bukti Penyetoran Pajak.
 - 07 Register Penutupan Kas.
 - 08 Berita Acara Pemeriksaan.
 - 09 Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Arsip Data Komputer (ADK).
 - 10 Laporan Pendapatan Negara.
 - 11 Laporan Keadaan Kredit Anggaran.
- 07 Daftar Gaji.
- 08 Kartu Gaji.
- 09 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 10 Laporan Keuangan Tahunan:
 - 01 Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 - 02 Neraca.
 - 03 Laporan Arus Kas.
 - 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 11 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri:
 - 01 Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book).
 - 02 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book).
 - 03 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya.
 - 04 Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender.
 - 05 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain Usulan Luncuran Dana.
- 06 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut Lampirannya:
 - 01 Reimbursement.

- 02 Direct Payment/Transfer Procedure.
 - 03 Special Commitment/ L/C Opening.
 - 04 Special Account/Imprest Fund.
 - 07 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice).
 - 08 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya.
 - 09 Replenishment (permintaan penarikan dana dari _egara donor) meliputi antara lain Nomor Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE).
 - 10 Staff Appraisal Report.
 - 11 Report/Laporan yang terdiri dari:
 - 01 Progress Report.
 - 02 Monthly Report.
 - 03 Quarterly Report.
 - 12 Laporan Hutang Daerah:
 - 01 Laporan Pembayaran Hutang Daerah.
 - 02 Laporan Posisi Hutang Daerah.
 - 13 Completion Report/Annual Report.
 - 14 Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri.
- 12 Pengelolaan Apbd/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN):
- 01 Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan:
 - 01 Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 02 Kuasa Pengguna Barang/Jasa.
 - 03 Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 04 Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
 - 05 Pejabat Penandatanganan SPM.
 - 06 Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.
 - 07 Pengelola Barang.
 - 08 Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- 13 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD):
- 01 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).
 - 02 Kebijakan Akuntansi.
 - 03 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi.
 - 04 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran.
- 14 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan:
- 01 Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan.
 - 02 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya.
 - 01 SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil.
 - 02 Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya antara lain Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank.
 - 03 Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

- 03 Buku Rekening Bank.
- 04 Keputusan Pembukuan Rekening.
- 05 Pembukuan anggaran terdiri dari:
 - 01 Buku Kas Umum (BKU).
 - 02 Buku Pembantu.
 - 03 Register dan Buku Tambahan.
 - 04 Daftar Pembukuan Selama rekening masih aktif.
 - 05 Pencairan/Pengeluaran (DPP).
 - 06 Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP).
 - 07 Daftar Himpunan Pencairan (DHP).
 - 08 Rekening Koran.
- 15 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan:
 - 01 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya.
 - 02 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan.
- 16 Pengelolaan Anggaran Pemilu:
 - 01 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD:
 - 01 Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu.
 - 02 Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu.
 - 03 Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Provinsi, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas.
 - 04 Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu.
 - 05 Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Provinsi.
 - 06 Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Provinsi dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD.
 - 07 Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada.
 - 08 Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD.
 - 09 Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD.
- 10 Pelaksanaan Anggaran Pilkada Dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu:
 - 01 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu.
 - 02 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu.
 - 03 Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro.
 - 04 Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank.
 - 05 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya.

- 11 Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu:
 - 01 Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya.
 - 02 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Provinsi, Panwasda dan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) PPK dan Panwas.
 - 03 Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank.
- 12 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah:
 - 01 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan.
 - 02 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal.
 - 03 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional:
 - 01 LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).
 - 02 MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan).
 - 03 Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP.
 - 04 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah:
 - 01 Tuntutan Perbendaharaan.
 - 02 Tuntutan Ganti Rugi.

AR. Urusan Kearsipan:

- 01 Kebijakan:
 - 01 Peraturan Daerah:
 - 01 Pengkajian dan Pengusulan.
 - 02 Penyusunan Raperda.
 - 03 Pembahasan Raperda dan Persetujuan Raperda.
 - 04 Penetapan Perda.
 - 05 Sosialisasi Perda.
 - 02 Tata Naskah Dinas:
 - 01 Pengkajian dan pembahasan Rapergub.
 - 02 Pengusulan dan Penetapan Pergub.
 - 03 Sosialisasi Pergub.
 - 03 Klasifikasi Arsip:
 - 01 Pengkajian dan pembahasan Rapergub.
 - 02 Pengusulan dan Penetapan Pergub.
 - 03 Sosialisasi Pergub tentang Tata Naskah Dinas.
 - 04 Jadwal Retensi Arsip:
 - 01 Pengkajian dan pembahasan Rapergub.
 - 02 Pengusulan dan Penetapan Pergub.
 - 03 Sosialisasi Pergub.
 - 05 Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis:
 - 01 Pengkajian dan pembahasan Rapergub.
 - 02 Pengusulan dan Penetapan Pergub.
 - 03 Sosialisasi Pergub tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
 - 06 Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis:
 - 01 Pengkajian dan pembahasan Rapergub.
 - 02 Pengusulan dan Penetapan Pergub.
 - 03 Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis.
 - 07 Pedoman Pengelolaan Arsip Statis:
 - 01 Pengkajian dan pembahasan Rapergub.
 - 02 Pengusulan dan Penetapan Pergub.

- 03 Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis.
- 08 Penetapan Organisasi Kearsipan:
 - 01 Unit Pengolah.
 - 02 Unit Kearsipan Perangkat Daerah.
 - 03 Unit Kearsipan Pemerintah Daerah.
- 02 Pembinaan Kearsipan:
 - 01 Akreditasi Kearsipan Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan, Lembaga Penyelenggara Kearsipan, dan Diklat Kearsipan:
 - 01 Proses Akreditasi.
 - 02 Berkas Penetapan Sertifikasi Akreditasi.
 - 03 Data Base Akreditasi.
 - 02 Sertifikasi Arsiparis:
 - 01 Proses Sertifikasi Arsiparis.
 - 02 Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis.
 - 03 Data Base Sertifikasi Arsiparis.
 - 03 Bina Arsiparis:
 - 01 Formasi Jabatan Arsiparis.
 - 02 Standar Kompetensi Arsiparis.
 - 03 Bimbingan Konsultasi Arsiparis.
 - 04 Penilaian Arsiparis.
 - 05 Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan.
 - 06 Berkas Penetapan Arsiparis Teladan.
 - 07 Data Base Arsiparis.
 - 04 Bimbingan dan Konsultasi:
 - 01 Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan).
 - 02 Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan.
 - 03 Unit Kearsipan.
 - 04 Sumberdaya Manusia.
 - 05 Supervisi Dan Evaluasi:
 - 01 Perencanaan.
 - 02 Pelaksanaan.
 - 03 Laporan hasil supervisi dan Evaluasi.
 - 06 Data Base Bimbingan Dan Konsultasi Dan Supervisi:
 - 07 Fasilitas Kearsipan:
 - 01 SDM Kearsipan.
 - 02 Prasarana dan Sarana.
 - 08 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan:
 - 01 Penyelenggaraan.
 - 02 Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan.
- 03 Pengelolaan Arsip Dinamis:
 - 01 Penciptaan:
 - 01 Pencatatan (Buku Agenda, Kartu Kendali dan Lembar Pengantar/Ekspedisi).
 - 02 Pendistribusian.
 - 02 Penggunaan:
 - 01 Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip.
 - 02 Peminjaman.

- 03 Pemeliharaan:
 - 01 Pemberkasan : Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas).
 - 02 Penataan Arsip Inaktif : Pengaturan Fisik, Pengolahan Informasi Arsip, Penyusunan daftar arsip inaktif.
- 04 Penyimpanan:
 - 01 Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif.
 - 02 Pengamanan.
- 05 Alih Media:
 - 01 Kebijakan alih media.
 - 02 Autentikasi.
 - 03 Berita acara.
 - 04 Daftar arsip yang alih mediakan.
- 06 Program Arsip vital:
 - 01 Identifikasi.
 - 02 Pelindungan dan pengamanan.
 - 03 Penyelamatan dan pemulihan.
- 07 Autentikasi Arsip Dinamis:
 - 01 Pembuktian Autentisitas.
 - 02 Pendapat tenaga ahli.
 - 03 Pengujian.
 - 04 Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip.
- 09 Penyusutan:
 - 01 Pemindahan Arsip Inaktif (Berita Acara dan Daftar Arsip Yang Dipindahkan).
 - 02 Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna:
 - Panitia penilai.
 - Penilaian panitia penilai.
 - Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan).
 - Penetapan arsip yang dimusnahkan.
 - Berita Acara Pemusnahan Arsip.
 - Daftar arsip yang dimusnahkan.
 - 03 Penyerahan arsip statis:
 - Pembentukan Panitia Penilai.
 - Notulen Rapat Panitia.
 - Surat pertimbangan Panitia Penilai.
 - Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan.
 - Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip.
 - Keputusan Penetapan Penyerahan.
 - Berita Acara Penyerahan Arsip.
 - Daftar arsip yang diserahkan.
- 10 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis:
 - 01 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif.
 - 02 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif.
- 04 Pengelolaan Arsip Statis:
 - 01 Akuisisi:
 - 01 Monitoring fisik dan daftar.
 - 02 Verifikasi terhadap daftar arsip.

- 03 Menetapkan status arsip statis.
- 04 Persetujuan untuk Penyerahan.
- 05 Penetapan arsip yang diserahkan.
- 06 Berita Acara Penyerahan Arsip.
- 07 Daftar arsip yang diserahkan.
- 02 Sejarah Lisan:
 - 01 Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan.
 - 02 Hasil Wawancara Sejarah Lisan:
 - Berita Acara wawancara Sejarah Lisan.
 - Laporan Kegiatan.
 - Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip.
- 03 Daftar Pencarian Arsip Statis:
 - 01 Pengumuman.
 - 02 Akuisisi daftar pencarian arsip statis.
- 04 Penghargaan dan Imbalan.
- 05 Pengolahan:
 - 01 Menata Informasi.
 - 02 Menata Fisik.
 - 03 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik :Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis dan Guide.
- 06 Preservasi Preventif:
 - 01 Penyimpanan.
 - 02 Pengendalian hama terpadu.
 - 03 Reproduksi (Alih Media) : Berita Acara Alih Media dan Daftar Arsip yang dialihmediakan.
 - 04 Perencanaan dan Penanggulangan Bencana.
- 07 Prefentif Kuratif:
 - 01 Perawatan Arsip.
 - 02 Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi.
- 08 Autentikasi Arsip Statis:
 - 01 Pembuktian Autentisitas.
 - 02 Pendapat tenaga ahli.
 - 03 Pengujian.
 - 04 Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan.
- 09 Akses Arsip Statis:
 - 01 Layanan Arsip.
 - 02 Administrasi dan proses penyusunan Penerbitan Naskah Sumber.
 - 03 hasil naskah sumber arsip.
 - 03 Pameran arsip.
- 05 Jasa Kearsipan:
 - 01 Konsultasi Kearsipan.
 - 02 Manual Kearsipan.
 - 03 Penataan Arsip.
 - 04 Otomasi Kearsipan.
 - 05 Penyimpanan Arsip/Dokumen.
 - 06 Perawatan Arsip/Dokumen.
 - 07 Data Base Jasa Kearsipan.
- 07 Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan:
 - 01 Pembinaan Internal:
 - 01 Kegiatan pembinaan terhadap Perangkat Daerah.

- 02 Laporan hasil Pembinaan terhadap Perangkat Daerah.
- 02 Pembinaan Eksternal:
 - 01 Kegiatan pembinaan terhadap LKD Kabupaten/Kota, BUMD, Orpol, Ormas, Swasta dan Masyarakat.
 - 02 Laporan Hasil Pembinaan Eksternal.
- 03 Pengawasan Internal:
 - 01 Kegiatan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
 - 02 Laporan Audit Kearsipan Internal terhadap Perangkat Daerah.
- 04 Pengawasan Eksternal:
 - 01 Kegiatan pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap LKD Kabupaten/Kota, BUMD, Orpol, Ormas, Swasta dan Masyarakat.
 - 02 Laporan Hasil Audit Kearsipan Eksternal.

Urusan Pemerintah Daerah:

- KB. Kesatuan Bangsa dan Politik:
 - 01 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan:
 - 01 Ketahanan Ideologi Negara:
 - 01 Penguatan ideologi Negara.
 - 02 Implementasi ideologi Negara.
 - 02 Wawasan Kebangsaan:
 - 01 Penguatan wawasan kebangsaan.
 - 02 Pembinaan dan sosialisasi.
 - 03 Implementasi.
 - 03 Bela Negara:
 - 01 Pendidikan bela Negara.
 - 02 Pemberdayaan bela Negara.
 - 04 Nilai - nilai Sejarah Kebangsaan:
 - 01 Penguatan nilai-nilai sejarah.
 - 02 Pmplementasi nilai-nilai sejarah.
 - 03 Penerbitan rekomendasi penelitian.
 - 05 Pembauran dan Kewarganegaraan:
 - 01 Pembauran, Kebangsaan dan Kewarganegaraan.
 - 02 Pembinaan kewarganegaraan.
 - 02 Kewaspadaan Nasional:
 - 01 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan.
 - 02 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan.
Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik
 - 03 Pemerintahan
 - 04 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial (pedoman kewaspadaan nasional).
 - 05 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing (pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing, surat pemberitahuan penelitian orang asing).

- 03 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama dan Kemasyarakatan:
 - 01 Ketahanan Seni:
 - 01 Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian.
 - 02 Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian.
 - 02 Ketahanan Budaya:
 - 01 Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan.
 - 02 Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan.
 - 03 Agama dan Kepercayaan:
 - 01 Fasilitasi.
 - 02 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota.
 - 03 Pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan.
 - 04 Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan.
 - 04 Organisasi Kemasyarakatan:
 - 01 Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat (pendaftaran ormas, database ormas).
 - 02 Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL.
 - 03 Evaluasi aktifitas Ormas sanksi administrasi.
 - 04 Fasilitasi sengketa Ormas.
 - 05 Fasilitasi Ormas.
 - 05 Masalah sosial Kemasyarakatan:
 - 01 Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.
 - 02 Masalah sosial kemasyarakatan.
- 04 Politik Dalam Negeri:
 - 01 Implementasi Kebijakan Politik:
 - 01 Implementasi kebijakan politik (sosialisasi dan publikasi best practice dan inovasi).
 - 02 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - 02 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan:
 - 01 Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat (pendampingan kunjungan kerja DPR RI).
 - 02 Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah (rietas anggota DPRD Provinsi).
 - 03 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik:
 - 01 Verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi.
 - 02 Partai politik yang tidak memperoleh kursi.
 - 03 Pemerintah daerah.
 - 04 Database parpol.
 - 04 Pendidikan Budaya Politik:
 - Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik.
 - 01 politik.
 - 02 Penyelenggaraan pendidikan budaya politik.
 - 03 Modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan.
 - 05 Pemilihan Umum:
 - 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu.
 - 02 Evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat.

- 03 Evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden.
 - 04 Laporan hasil perkembangan politik di daerah.
 - 05 Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL.
- 05 Ketahanan Ekonomi:
- 01 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian:
 - 01 Penanganan kesenjangan perekonomian (sosialisasi dan publikasi bst practise dan inovasi).
 - 02 penanganan kesenjangan perekonomian.
 - 03 Ketahanan perdagangan investasi, fiskal dan moneter:
 - 01 Fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter.
 - 02 Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi.
 - 04 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi:
 - 01 Evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian.
 - 02 Evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian.

PU. Pemerintahan Umum:

- 01 Dekosentrasi dan Kerjasama:
 - 01 Evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian.
 - 02 Evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian.
 - 03 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasam.
 - 04 Fasilitas Kecamatan:
 - 01 Fasilitasi (database pembentukan kecamatan).
 - 02 Koordinasi.
 - 03 Pembinaan dan pengawasan.
 - 04 Monitoring dan evaluasi (evaluasi kinerja kecamatan).
 - 05 Fasilitasi Pelayanan Umum:
 - 01 Fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan.
 - 02 Koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan.
 - 03 Pembinaan dan pengawasan (pelayanan administrasi Kecamatan).
 - 04 Monitoring dan evaluasi.
- 02 Wilayah Administrasi dan Perbatasan:
 - 01 Toponimi dan Data Wilayah:
 - 01 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi.
 - 02 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan.
 - 03 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan.
 - 04 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan.

- 05 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
 - 06 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah.
- 02 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara:
 - 01 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan Negara.
 - 02 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan.
 - 03 Batas Antar Daerah Wilayah:
 - 01 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah.
 - 02 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah.
- 03 Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat:
 - 01 Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja:
 - 01 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja.
 - 02 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah.
 - 02 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja:
 - 01 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.
 - 02 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.
 - 03 Perlindungan Masyarakat:
 - 01 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat.
 - 02 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.
 - 03 Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat.
 - 04 Penyidik Pegawai Negeri Sipil:
 - 01 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik PNS.

- 05 Perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia:
 - 01 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia.
 - 02 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional.
- 04 Kawasan dan Pertanahan:
 - 01 Kawasan Sumber Daya Alam:
 - 01 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan.
 - 02 Kawasan Sumber Daya Buatan:
 - 01 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara.
 - 03 Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas:
 - 01 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasa, mencakup kawasan hutan.
 - 04 Pertanahan dan Kawasan Khusus:
 - 01 Penyelenggaraan urusan pertanahan.
 - 02 Penyelesaian sengketa pertanahan.
 - 03 Evaluasi penataan kawasan khusus.
 - 05 Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan:
 - 01 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan.
 - 02 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan.
- 05 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:
 - 01 Identifikasi Potensi Bencana:
 - 01 Evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana.
 - 02 Organisasi Sistem dan Prosedur:
 - 01 Pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana (fasilitasi, database rawan bencana, koordinasi, fasilitasi srta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana).
 - 03 Sarana dan Prasarana:
 - 01 Evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - 02 Evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - 04 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran:
 - 01 Evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- 02 Evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran.

D. Otonomi Daerah:

- 01 Penyelenggaraan Pemerintah:
 - 01 Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi:
 - 01 Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
 - 02 Penyusunan standar pelayanan minimal.
- 02 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran.
- 03 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga:
 - 01 Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.
 - 02 Administrasi kepala daerah dan DPRD.
 - 03 Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan.
 - 04 Hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD).
 - 05 Asosiasi Daerah.
- 04 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:
 - 01 Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 02 Kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah.
 - 03 Pengembangan kapasitas daerah.

E. Bina Pembangunan:

- 01 Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah.
- 02 Pengembangan Wilayah:
 - 01 Penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah.
 - 02 Penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah.
 - 03 Penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah.
 - 04 Kawasan Strategis dan Andalan (Evaluasi pengembangan data, pengembangan kawasan strategis dan andalan).
 - 05 Wilayah Tertinggal.
 - 01 Penyusunan data dan pemutahiran basis dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal.
 - 02 Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wialayah tertinggal.
 - 06 Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil:
 - 01 Penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah.
 - 02 Penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir.
- 03 Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup:
 - 01 Penataan Ruang dan Wilayah:
 - 01 Evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah.
 - 02 Evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah.
 - 03 Implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

- 02 Penataan Ruang Kawasan:
 - 01 Evaluasi tata ruang kawasan.
 - 02 Pembinaan tata ruang kawasan.
 - 03 Implementasi.
- 03 Konservasi dan Rehabilitasi:
 - 01 Evaluasi pelaksanaan konservasi.
 - 02 Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi.
 - 03 Implementasi.
- 04 Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air:
 - 01 Evaluasi pengembangan potensi sumber daya air.
 - 02 Evaluasi pemanfaatan sumber daya air.
 - 03 Implementasi.
- 05 Pengendalian Lingkungan Hidup:
 - 01 Pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup.
 - 02 Analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 04 Pengembangan Ekonomi Daerah:
 - 01 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah.
 - 01 Identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah.
 - 02 Pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.
 - 02 Promosi dan Investasi Daerah:
 - 01 Pelaksanaan promosi ekonomi daerah.
 - 02 Pelaksanaan investasi daerah.
 - 03 Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah:
 - 01 Pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah.
 - 02 Pelaksanaan perindustrian daerah.
 - 04 Kemitraan Usaha:
 - 01 Perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah.
 - 02 Pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah.
 - 05 Kelembagaan Ekonomi Daerah:
 - 01 Pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah.
 - 02 Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah.

F. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa:

- 01 Pemerintahan Desa dan Kelurahan:
 - 01 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan:
 - 01 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan.
 - 01 Pelaksanaan pengembangan desa.
 - 02 Pelaksanaan pengembangan kelurahan.
 - 02 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan:
 - 01 Pembinaan administrasi pemerintahan desa.
 - 02 Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan.
 - 03 Fasilitasi Permusyawaratan Desa:
 - 01 Pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa.
 - 02 Pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan desa.

- 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa:
 - 01 Pembinaan pengelolaan keuangan desa.
 - 02 Pelaksanaan pengelolaan aset desa.
- 05 Pengembangan Kapasitas Desa:
 - 01 Pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan.
 - 02 Pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat.
- 02 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat:
 - 01 Lembaga Masyarakat:
 - 01 Pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa.
 - 02 Pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat.
 - 02 Pembangunan Partisipatif:
 - 01 Pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif.
 - 02 Pelaporan kinerja pembangunan desa.
 - 03 Pendataan Potensi Masyarakat:
 - 01 Inventarisasi potensi masyarakat (profil desa).
 - 02 Evaluasi perkembangan masyarakat.
 - 04 Pengembangan Kawasan Perdesaan:
 - 01 Pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan.
 - 02 Pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan.
 - 05 Pelatihan Masyarakat:
 - 01 Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat (grand design pelatihan masyarakat, pedoman pelatihan masyarakat, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, evaluasi pelatihan masyarakat, penyelenggaraan pelatihan dan monitoring dan evaluasi).
 - 06 Evaluasi pelatihan masyarakat:
 - 01 Penyelenggaraan pelatihan.
 - 02 Monitoring dan evaluasi.
- 03 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat:
 - 01 Budaya Nusantara:
 - 01 Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
 - 02 Pelaksanaan kerjasama adat istiadat.
 - 02 Pemberdayaan Perempuan:
 - 01 Pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan.
 - 02 Pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender.
 - 03 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga:
 - 01 Pelaksanaan pemberdayaan keluarga.
 - 02 Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
 - 04 Kesejahteraan Sosial:
 - 01 Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
 - 02 Pelaksanaan penanganan masalah sosial.

- 05 Tenaga Kerja Perdesaan:
 - 01 Fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja.
 - 02 Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.
- 04 Usaha Ekonomi Masyarakat:
 - 01 Usaha Pertanian dan Pangan:
 - 01 Pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan (identifikasi data pertanian, fasilitasi, , monitoring dan evaluasi).
 - 02 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam:
 - 01 Pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam (inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum, inventarisasi dan pemetaan potensi desa, inventarisasi badan usaha milik desa , usaha ekonomi desa simpan pinjam, fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi).
 - 02 Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam (fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi).
 - 03 Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam (fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi (fasilitasi pmbinaan, pendampingan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi).
 - 03 Produksi dan Pemasaran:
 - 01 Pelaksanaan pengembangan informasi pasar (identifikasi produk unggulan perdesaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi).
 - 02 Pelaksanaan diversifikasi pasar (fasilitasi pengelolaan pasar desa, fasilitasi sarana dan prasarana desa, sistem penilaian kinerja pasar desa/lomba pasar desa, monitoring dan evaluasi, data pasar desa).
 - 04 Usaha Ekonomi dan Keluarga:
 - 01 Pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian (fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga).
 - 02 Pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil (penyusunan modul, fasilitasi, monitoring dan evaluasi).
 - 05 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal:
 - 01 Ekonomi perdesaan (identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan).
 - 02 Masyarakat tertinggal (identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal, monitoring dan evaluasi).
- 05 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan:
 - 01 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan:

- 01 Pembinaan pengelolaan konservasi kawasan.
- 02 Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan.
- 02 Fasilitas Pemanfaatan lahan dan Pesisir Perdesaan:
 - 01 Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan perdesaan.
 - 02 Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan.
- 03 Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan:
 - 01 Pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan.
 - 02 Pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman.
- 04 Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan:
 - 01 Pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan.
 - 02 Pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan.
- 05 Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan:
 - 01 Pelaksanaan pemsarakatan teknologi perdesaan.
 - 02 Pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan.

ST. Urusan Statistik:

- 01 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi:
 - 01 Perencanaan:
 - 01 Master Plan dan Network planning.
 - 02 Penyiapan bahan penyusunan rancangan sensus.
 - 03 Penyusunan metode pencacahan sensus.
 - 04 Penentuan volume sensus.
 - 05 Penyusunan desain penarikan sampel.
 - 06 Penyusunan kerangka sampel.
 - 07 Studi pendahuluan (*desk study*).
 - 02 Persiapan:
 - 01 Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus.
 - 02 Penyusunan Kuesioner.
 - 03 Penyusunan konsep dan definisi.
 - 04 Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus.
 - 05 Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan, perkotaan.
 - 06 Penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayah administrasi.
 - 07 Penyusunan buku pedoman pencacahan.
 - 08 Penyusunan buku pedoman pengawasan.
 - 09 Penyusunan buku pedoman pengolahan.
 - 10 Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah.
 - 11 Penyusunan pedoman sosialisasi.
 - 12 Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan).
 - 13 Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan eksterm).

- 14 Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT).
 - 15 Pelaksanaan pelatihan petugas.
 - 16 Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi).
 - 17 Pelatihan petugas pengolahan.
 - 18 Perancangan tabel.
 - 19 Pelaksanaan Ujicoba kuesioner sensus (meliputi reliabilitas kuesioner dan sistem pengolahan).
 - 20 Pelaksanaan Ujicoba metodologi sensus (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan dan jumlah sampel).
- 03 Pelaksanaan Lapangan:
- 01 Pelaksanaan listing.
 - 02 Pemilihan sampel.
 - 03 Pengumpulan data.
 - 04 Pemeriksaan.
 - 05 Pengawasan Lapangan.
 - 06 Monitoring kualitas.
- 04 Pengolahan:
- 01 Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/Batching).
 - 02 Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding).
 - 03 Perekaman data (entri, scanner).
 - 04 Tabulasi Data.
 - 05 Pemeriksaan tabulasi.
 - 06 Laporan konsistensi tabulasi.
- 05 Analisis dan Penyajian Hasil Sensus:
- 01 Pembahasan angka hasil pengolahan.
 - 02 Penyusunan angka sementara.
 - 03 Penyusunan angka tetap.
 - 04 Penyusunan/pembahasan draft publikasi.
 - 05 Analisis data.
 - 06 Penyusunan publikasi hasil sensus.
- 06 Diseminasi hasil sensus:
- 01 Penyusunan bahan diseminasi berupa leaflet, booklet.
 - 02 Penyusunan bahan diseminasi berupa website.
 - 03 Penyusunan bahan diseminasi berupa penyusunan CD dan sejenisnya.
 - 04 Sosialisasi hasil sensus melalui berbagai media.
 - 05 Layanan dan promosi statistik.
- 02 Survei:
- 01 Perencanaan:
- 01 Master Plan dan Network planning.
 - 02 Penyiapan bahan penyusunan rancangan survey.
 - 03 Penyusunan metode pencacahan survey.
 - 04 Penentuan volume survey.
 - 05 Penyusunan desain penarikan sampel.
 - 06 Penyusunan kerangka sampel.
 - 07 Studi pendahuluan (desk study).

- 02 Persiapan:
 - 01 Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus.
 - 02 Penyusunan Koesioner.
 - 03 Penyusunan konsep dan definisi.
 - 04 Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus.
 - 05 Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan, perkotaan.
 - 06 Penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayah administrasi.
 - 07 Penyusunan buku pedoman pencacahan.
 - 08 Penyusunan buku pedoman pengawasan.
 - 09 Penyusunan buku pedoman pengolahan.
 - 10 Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah.
 - 11 Penyusunan pedoman sosialisasi.
 - 12 Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan).
 - 13 Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan eksterm).
 - 14 Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT).
 - 15 Pelaksanaan pelatihan petugas.
 - 16 Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi).
 - 17 Pelatihan petugas pengolahan.
 - 18 Perancangan tabel.
 - 19 Pelaksanaan Ujicoba koesioner survei (meliputi reliabilitas koesioner dan sistem pengolahan).
 - 20 Pelaksanaan Ujicoba metodologi sensus (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan dan jumlah sampel).
- 03 Pelaksanaan Lapangan:
 - 01 Pelaksanaan listing.
 - 02 Pemilihan sampel.
 - 03 Pengumpulan data.
 - 04 Pemeriksaan.
 - 05 Pengawasan Lapangan.
 - 06 Monitoring kualitas.
- 04 Pengolahan:
 - 01 Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/Batching).
 - 02 Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding).
 - 03 Perekaman data (entri, scanner).
 - 04 Tabulasi Data.
 - 05 Pemeriksaan tabulasi.
 - 06 Laporan konsistensi tabulasi.
- 05 Analisis dan Penyajian Hasil Survei:
 - 01 Pembahasan angka hasil pengolahan.
 - 02 Penyusunan angka sementara.
 - 03 Penyusunan angka tetap.
 - 04 Penyusunan/pembahasan draft publikasi.
 - 05 Analisis data.
 - 06 Penyusunan publikasi.

- 06 Diseminasi hasil survey:
 - 01 Penyusunan bahan diseminasi berupa leaflet, booklet.
 - 02 Penyusunan bahan diseminasi berupa penyusunan website.
 - 03 Penyusunan bahan diseminasi berupa penyusunan CD dan sejenisnya.
 - 04 Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media.

- 03 Konsolidasi Data Statistik:

- 01 Kompilasi Data.
- 02 Analisis data.
- 03 Penyusunan Publikasi.

- 04 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei dan Konsolidasi data statistik.

Urusan Persandian:

- 01 Pembinaan dan pengendalian persandian:

- 01 SDM:

- 01 Data Personil Sandi.
- 02 Pembinaan Personil Sandi.
- 03 Pengawasan dan Pengendalian.

- 02 Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi:

- 01 Data Materiil dan JKS.
- 02 Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi.

- 03 Akreditasi dan Sertifikasi:

- 01 Akreditasi Diklat.
- 02 Sertifikasi Alat.

- 02 Pengamanan persandian:

- 01 Pengamanan sinyal teknik sandi dan kriptografi:

- 01 Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi).
- 02 Pelaporan.

- 02 Analisis sinyal teknik sandi dan kriptografi:

- 01 Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi).
- 02 Pelaporan.

- 03 Materiil sandi sistem dan peralatan:

- 01 Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi).
- 02 Pelaporan.

- 03 Pengkajian persandian Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi:

- 01 Perencanaan Pengkajian.
- 02 Administrasi Pengkajian.
- 03 Pelaksanaan.
- 04 Pelaporan.

KL. Kelautan dan Perikanan:

- 01 Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil:

- 01 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi (rencana tata ruang laut nasional, rencana tata ruang laut lintas wilayah dan perairan).
- 02 Rencana tata ruang dan zona wilayah I Jawa, Sumatera dan leuseur Sunda.
- 03 Rencana tata ruang dan zona wilayah II (Kalimantan dan Maluku, zonasi wilayah Sulawesi dan Papua).

- 04 Informasi dan evaluasi spasial.
- 02 Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan:
 - 01 Jejaring, data, dan informasi konservasi.
 - 02 Konservasi wawasan (perancangan konservasi kawasan, perlindungan dan pelestarian kawasan).
 - 03 Konservasi jenis ikan (perancangan konservasi jenis ikan, perlindungan dan pelestarian jenis ikan).
 - 04 Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jenis ikan).
- 03 Pesisir dan Lautan:
 - 01 Mitigasi bencana lingkungan (mitigasi bencana pesisir dan lautan, adaptasi dampak perubahan iklim).
 - 02 Pendayagunaan sumber daya kelautan (benda muatan kapal tenggelam, jasa kelautan).
 - 03 Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut (penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir, penanggulangan pencemaran sumber daya laut).
 - 04 Rehabilitasi dan reklamasi:
 - 01 Identifikasi pulau-pulau terkecil.
 - 02 Pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil (rehabilitasi, mitigasi dan adaptasi).
 - 03 Investasi dan promosi pulau-pulau terkecil.
 - 04 Sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil.
- 04 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha:
 - 01 Akses permodalan (akses perbankan, akses non Bank).
 - 02 Akses ilmu pengetahuan dan teknologi (identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi).
 - 03 Sosial budaya masyarakat (penguatan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat).
 - 04 Pengembangan usaha (pelayanan usaha, usaha mikro).
- 05 Pengawasan Sumber Daya Perikanan:
 - 01 Pengawasan penangkapan wilayah Barat (pengawasan penangkapan ikan wilayah barat I, pengawasan penangkapan ikan wilayah barat II).
 - 02 Pengawasan penangkapan ikan wilayah Timur (pengawasan penangkapan ikan wilayah timur I dan II).
 - 03 Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran (pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah barat, pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah timur).
 - 04 Pengawasan usaha budidaya wilayah barat dan wilayah timur.
- 06 Pengawasan Sumber Daya Kelautan:
 - 01 Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi.
 - 02 Pengawasan pencemaran perairan (pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai, pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman).
 - 03 Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil.
 - 04 Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati.
- 07 Kapal Pengawas:
 - 01 Logistik dan operasional wilayah Barat.
 - 02 Logistik operasional wilayah Timur.
 - 03 Perawatan kapal pengawas (wilayah barat dan timur).
 - 04 Pengawasan kapal pengawas (wilayah barat dan timur).

- 08 Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur:
 - 01 Sistem pemantauan (pengembangan sistem pemantauan, kerja sama pemantauan).
 - 02 Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan (opersional sistem pemantauan pemanfaatan sumber, analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan).
 - 03 Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan (analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya ikan).
 - 04 Pengembangan infrastruktur pengawasan (penyiapan infrastruktur, evaluasi infrastruktur).
 - 09 Penanganan pelanggaran:
 - 01 Penyidikan (wilayah barat dan timur).
 - 02 Penanganan barang bukti dan awak kapal (wilayah barat dan timur).
 - 03 Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan.
 - 04 Pemantauan dan evaluasi.
 - 10 Tindak Karantina Ikan:
 - 01 Pemeriksaan ikan.
 - 02 Penahanan.
 - 03 Pengasingan.
 - 04 Pengamatan.
 - 05 Pengamatan.
 - 06 Penolakan.
 - 07 Pemusnahan.
 - 08 Pelepasan/pembebasan.
 - 11 Tertib Operasional:
 - 01 Persyaratan lalulintas pemasukan.
 - 02 Persyaratan lalulintas pengeluaran.
 - 03 Permohonan sertifikat.
 - 04 Pemasukan formulir.
 - 05 Pemasukan sertifikat.
 - 06 Evaluasi dan monitoring sertifikat.
 - 07 Surat perintah.
 - 08 Rekomendasi.
 - 12 Pencegahan Penyakit:
 - 01 Penutupan suatu area.
 - 02 Pelanggaran lalulintas ikan.
 - 13 Pengawasan Karantina Ikan:
 - 01 Pengawasan peraturan perkarantinaaan.
 - 02 Pengawasan pelaksanaan operasional.
 - 14 Instalasi:
 - 01 Instalasi karantina sementara.
 - 02 Lokasi karantina.
- KH. Urusan Kehutanan:
- 01 Penyuluhan:
 - 01 Program Kerja Penyuluhan.
 - 02 Materi Penyuluhan.
 - 03 Program Penyuluhan Kehutanan.
 - 04 Sarana Penyuluhan.
 - 05 Tenaga Penyuluhan.

- 06 Pemberdayaan Masyarakat.
 - 07 Pelaksanaan Penyuluhan.
 - 08 Diseminasi.
 - 09 Evaluasi, Desiminasi dan Laporan.
- 02 Planologi Kehutanan:
- 01 Perencanaan Kawasan Hutan:
 - 01 Perencanaan Makro Kawasan Hutan.
 - 02 Penataan Ruang Kawasan Hutan.
 - 03 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan.
 - 02 Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan:
 - 01 Pengukuhan Kawasan Hutan.
 - 02 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.
 - 03 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan.
 - 03 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan:
 - 01 Inventarisasi Sumber Daya Hutan.
 - 02 Pemantauan Sumber Daya Hutan.
 - 03 Pemetaan Sumber Daya Hutan.
 - 04 Jaringan Data Spasial.
 - 04 Penggunaan Kawasan Hutan:
 - 01 Penggunaan Kawasan Hutan.
 - 02 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan.
 - 03 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan.
 - 05 Pengelolaan Dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan:
 - 01 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.
 - 02 Penyiapan Areal Pemantapan kawasan Hutan.
 - 03 Informasi Wilayah Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- 03 Bina Usaha Kehutanan:
- 01 HPH/HTI/IUPHHK:
 - 01 Data Areal HPH.
 - 02 SK HPH/HTI/IUPHHK.
 - 03 Kerjasama.
 - 04 Pembatalan/Penolakan.
 - 05 Perpanjangan.
 - 02 Modal dan Peralatan:
 - 01 Investasi Industri.
 - 02 Peralatan.
 - 03 Tenaga Kerja.
 - 04 Pemegang Saham.
 - 05 Neraca Perusahaan.
 - 03 Rencana Karya:
 - 01 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
 - 02 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH).
 - 03 Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT).
 - 04 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL).
 - 04 Perpanjangan HPH.
 - 05 Produksi:
 - 01 Target Produksi.
 - 02 Produksi Kayu.
 - 03 Produksi Non Kayu.

- 06 Industri:
 - 01 Industri Kayu HPH.
 - 02 Industri Kayu Non HPH.
 - 03 Industri Non Kayu.
- 07 Pembangunan Hutan Tanaman Industri:
 - 01 Hutan Tanaman Industri Pulp.
 - 02 Hutan Tanaman Industri Pertukangan.
- 08 Pelanggaran Dan Sanksi:
 - 01 Pemblokiran.
 - 02 Denda.
 - 03 Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK.
- 09 Pemanfaatan Hutan Produksi:
 - 01 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi.
 - 02 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi.
 - 03 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi.
 - 04 Pengembangan Investasi Usaha.
- 10 Pengembangan Hutan Alam:
 - 01 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam.
 - 02 Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam.
 - 03 Produksi Hutan Alam.
 - 04 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam.
- 11 Pengembangan Hutan Tanaman:
 - 01 Hutan Tanaman Industri.
 - 02 Hutan Tanaman Rakyat.
 - 03 Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman.
 - 04 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.
 - 05 Pembiayaan Hutan Tanaman.
- 12 Iuran Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan:
 - 01 Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi.
 - 02 Peredaran Hasil Hutan.
 - 03 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.
 - 04 Penertiban Peredaran Hasil Hutan.
- 13 Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan:
 - 01 Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan.
 - 02 Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan.
 - 03 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 14 Pembinaan Hutan:
 - 01 Pembinaan HPH.
 - 02 Pembinaan TPTI.
- 04 Standarisasi Dan Lingkungan:
 - 01 Standarisasi:
 - 01 Kayu.
 - 02 Non Kayu.
 - 03 Produk.
 - 04 Proses.
 - 02 Sarana Pengujian Hasil Hutan:
 - 03 Pengembangan:
 - 01 Pengembangan Perusahaan.
 - 02 Pengembangan Pemasaran.

- 04 Pemasaran Hasil Hutan:
- 05 Pengendalian Lingkungan:
 - 01 Amdal di Dalam Kawasan Hutan.
 - 02 Amdal di Luar Kawasan Hutan.
- 06 Angkutan Hasil Hutan:
 - 01 Sarana dan Prasarana.
 - 02 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan.
- 07 Tata Usaha Hasil Hutan:
 - 01 Tanda Pengenal Perusahaan.
 - 02 Legalitas.
 - 03 Palu Tok Kualitas.
 - 04 Pass Angkutan.
 - 05 Sertifikat Eksport Hasil Hutan.
- 05 Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam:
 - 01 Konservasi Jenis Dan Genetik:
 - 01 Flora dan Fauna yang Dilindungi.
 - 02 Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi.
 - 03 Lembaga Konservasi /Kebun Binatang.
 - 04 Konvensi Keanekaragaman Hayati.
 - 02 Kawasan Konservasi:
 - 01 Cagar Alam.
 - 02 Suaka Margasatwa.
 - 03 Taman Wisata.
 - 04 Taman Buru.
 - 05 Taman Nasional.
 - 06 Taman Hutan Raya.
 - 07 Hutan Lindung dan Suaka Alam.
 - 08 Lahan Basah dan Konservasi Laut.
 - 09 Gua/Karst.
 - 03 Pengamanan Hutan:
 - 01 Pelanggaran.
 - 02 Bencana Alam.
 - 03 Kebakaran Hutan.
 - 04 Sengketa Hutan.
 - 05 Hama dan Penyakit.
 - 04 Penyidikan dan Perlindungan Hutan:
 - 01 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan.
 - 02 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah.
 - 03 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - 05 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam:
 - 01 Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.
 - 02 Pemanfaatan Jasa Lingku.
 - 03 Pemanfaatan Wisata Alam.
 - 06 Bina Cinta Alam:
 - 01 Cinta Alam.
 - 02 Kader Konservasi Sumber Daya Alam.
 - 03 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA.
 - 07 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial:
 - 01 Perbenihan:
 - 01 Pemuliaan Benih.
 - 02 Kebun Benih.
 - 03 Tegakan Benih.

- 04 Pengadaan Benih.
- 05 Pengujian dan Penyimpanan Benih.
- 06 Lalu Lintas Angkutan Benih.
- 07 Pembibitan.
- 08 Pengembangan Sumber Benih.
- 09 Pengembangan Usaha Perbenihan.
- 10 Pengendalian Peredaran Benih.
- 02 Rehabilitasi Hutan dan Lahan:
 - 01 Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - 02 Rehabilitasi Hutan.
 - 03 Rehabilitasi Lahan.
 - 04 Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa, dan Gambut.
 - 05 Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah.
- 03 Tanaman Reboisasi:
 - 01 Reboisasi Lahan Kritis.
 - 02 Reboisasi Areal HPH.
- 04 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das):
 - 01 Pemolaan Pengelolaan DAS.
 - 02 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS.
 - 03 Teknik Pengelolaan DAS.
 - 04 Evaluasi Pengelolaan DAS.
- 05 Perhutanan Sosial:
 - 01 Pemolaan.
 - 02 Pengembangan Hutan Kemasyarakatan.
 - 03 Pengembangan Hutan Desa.
 - 04 Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan.
 - 05 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.
 - 06 Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan (HHBK/AUK).
- 06 Pengendalian Perladangan:
 - 01 Penentuan Lokasi.
 - 02 Pemupukan Lokasi.
 - 03 Pengelolaan Tanah.
 - 04 Pemindahan Penduduk.
 - 05 Pembuatan Sarana.
- 08 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan:
 - 01 Perencanaan Program Penelitian:
 - 01 Penyusunan Rencana Anggaran Penelitian dan Pengembangan.
 - 02 Penyusunan Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
 - 02 Pelaksanaan Penelitian:
 - 01 Ijin Penelitian.
 - 02 Data Mentah Hasil Penelitian.
 - 03 Analisa Hasil Penelitian.
 - 04 Laporan Hasil Penelitian.
 - 03 Monitoring dan Evaluasi Penelitian:
 - 01 Monitoring Penelitian.
 - 02 Evaluasi Penelitian.
 - 03 Rekomendasi.

- 04 Diseminasi:
 - 01 Publikasi.
 - 02 Gelar Teknologi/Seminar/Lokakarya.
 - 03 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan.

PT. Urusan Pertanian:

01 Peternakan dan Kesehatan Hewan:

01 Perbibitan Ternak:

- 01 Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar.
- 02 Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil.
- 03 Produksi Bibit Ternak Unggas.
- 04 Produksi Bibit Aneka Ternak.
- 05 Penilaian Bibit Ternak.
- 06 Pelepasan Bibit Ternak.
- 07 Sertifikasi Bibit Ternak.
- 08 Pengawasan Mutu Bibit Ternak.
- 09 Analisis Pengembangan Bibit Ternak.
- 10 Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak.
- 11 Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran.

02 Pakan Ternak:

- 01 Bahan Pakan Asal Hewan.
- 02 Bahan Pakan Asal Tumbuhan.
- 03 Budidaya Pakan Hijauan.
- 04 Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak.
- 05 Produksi Pakan Olahan.
- 06 Pengolahan Pakan Olahan.
- 07 Sertifikasi Pakan.
- 08 Pengawasan Pakan.
- 09 Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran.

03 Budidaya Ternak:

- 01 Ternak Sapi dan Kerbau Potong.
- 02 Ternak Kambing dan Domba Potong.
- 03 Ternak Sapi dan Kerbau Perah.
- 04 Ternak Kambing Perah.
- 05 Ternak Unggas.
- 06 Aneka Ternak dan Monogastrik.
- 07 Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga (LM3).
- 08 Sarjana Membangun Desa (SMD).

04 Kesehatan Hewan:

- 01 Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner.
- 02 Penyidikan Penyakit Hewan.
- 03 Pencegahan Penyakit Hewan.
- 04 Pemberantasan Penyakit Hewan.
- 05 Perlindungan Hewan dengan Analisis Risiko Penyakit Eksotik.
- 06 Perlindungan Hewan dengan Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan.
- 07 Kelembagaan Kesehatan Hewan.
- 08 Sumber Daya Kesehatan Hewan.
- 09 Laporan THL.
- 10 Proposal Poskeswan.
- 11 Mutu Obat Hewan.

- 12 Peredaran Obat Hewan.
 - 13 Pendaftaran Obat Hewan.
 - 14 Rekomendasi Obat Hewan.
- 05 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen:
- 01 Teknologi Pascapanen.
 - 02 Sarana Pascapanen.
 - 03 Penerapan Higiene Sanitasi.
 - 04 Inspeksi Higiene Sanitasi.
 - 05 Pengawasan Sanitary.
 - 06 Pengawasan Keamanan Produk Hewan.
 - 07 Zoonosis.
 - 08 Kesejahteraan Hewan.
 - 09 Pengujian Produk Hewan.
 - 10 Sertifikasi Produk Hewan.
 - 11 Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran.
- 02 Perkebunan:
- 01 Tanaman Semusim:
 - 01 Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim.
 - 02 Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim.
 - 03 Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim.
 - 04 Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim.
 - 05 Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim.
 - 06 Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim.
 - 07 Pemberdayaan Tanaman Semusim.
 - 08 Kelembagaan Tanaman Semusim.
 - 02 Tanaman Rempah & Penyegar:
 - 01 Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar.
 - 02 Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar.
 - 03 Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar.
 - 04 Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Rempah & Penyegar.
 - 05 Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar.
 - 06 Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar.
 - 07 Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegar.
 - 08 Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar.
 - 03 Tanaman Tahunan:
 - 01 Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan.
 - 02 Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan.
 - 03 Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan.
 - 04 Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan.
 - 05 Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan.
 - 06 Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan.
 - 07 Pemberdayaan Tanaman Tahunan.
 - 08 Kelembagaan Tanaman Tahunan.
 - 04 Perlindungan Perkebunan:
 - 01 Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim.
 - 02 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim.
 - 03 Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar.

- 04 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar.
 - 05 Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman.
 - 06 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman.
 - 07 Dampak Perubahan Iklim.
 - 08 Pencegahan Kebakaran.
- 05 Pascapanen dan Pembinaan Usaha:
- 01 Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar.
 - 02 Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar.
 - 03 Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan.
 - 04 Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan.
 - 05 Bimbingan Usaha Perkebunan.
 - 06 Bimbingan Perkebunan Berkelanjutan.
 - 07 Gangguan Usaha.
 - 08 Penanganan Konflik.
- 03 Hortikultura:
- 01 Perlindungan hortikultura:
- 01 Teknologi Perlindungan Tanaman Buah.
 - 02 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.
 - 03 Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat. Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan
 - 04 Tanaman Obat.
 - 05 Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura.
 - 06 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura.
 - 07 Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan.
 - 08 Informasi dan Persyaratan Teknis.
- 02 Perbenihan Hortikultura:
- 01 Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas.
 - 02 Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas.
 - 03 Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas.
 - 04 Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas.
 - 05 Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas.
 - 06 Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas.
 - 07 Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
 - 08 Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
 - 09 Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas.
- 04 Prasarana Dan Sarana Pertanian:
- 01 Perluasan dan Pengelolaan Lahan:
- 01 Identifikasi Lahan untuk Basis Data Lahan.
 - 02 Analisis dan Penyajian Data Lahan.
 - 03 Identifikasi dan Analisis Pengeendalian Lahan.
 - 04 Rekomendasi Teknis pengendalian lahan.

- 05 Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.
 - 06 Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.
 - 07 Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan.
 - 08 Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan.
 - 09 Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - 10 Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- 02 Pengelolaan Air Irigasi:
- 01 Pengembangan Sumber Air Permukaan.
 - 02 Pengembangan Sumber Air Tanah.
 - 03 Pengembangan Jaringan.
 - 04 Optimasi Air.
 - 05 Iklim.
 - 06 Konservasi Air dan Lingkungan Hidup.
 - 07 Identifikasi Kelembagaan.
 - 08 Pengembangan Kelembagaan.
- 03 Pembiayaan Pertanian:
- 01 Data dan Informasi pembiayaan program.
 - 02 Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program.
 - 03 Pembiayaan Syariah.
 - 04 Kerja Sama Pembiayaan Syariah.
 - 05 Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis.
 - 06 Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis.
 - 07 Kelembagaan Agribisnis.
 - 08 Pemberdayaan Agribisnis.
- 04 Pupuk Pestisida:
- 01 Pupuk Organik dan Pembenh Tanah Tanaman Pangan.
 - 02 Pupuk Organik dan Pembenh Tanah Hortikultura dan Perkebunan.
 - 03 Pupuk Anorganik Tanaman Pangan.
 - 04 Pupuk Anorganik Hortikultura dan Perkebunan.
 - 05 Pestisida Kimia.
 - 06 Pestisida Hayati.
 - 07 Pengawasan Pupuk.
 - 08 Pengawasan Pestisida.
- 05 Alat dan Mesin Pertanian:
- 01 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - 02 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Perkebunan dan Peternakan.
 - 03 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - 04 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Perkebunan dan Peternakan.
 - 05 Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian.
 - 06 Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian.
- 05 Tanaman Pangan:
- 01 Perbenihan Tanaman Pangan:

- 01 Penilaian Varietas.
- 02 Pengawasan Mutu Benih.
- 03 Produksi Benih Serealia Padi.
- 04 Produksi Benih Serealia Non Padi.
- 05 Produksi Benih Aneka Kacang.
- 06 Produksi Benih Umbi.
- 07 Kelembagaan Produksi.
- 08 Kelembagaan Pengawasan.
- 02 Budidaya Serealia:
 - 01 Padi Irigasi.
 - 02 Padi Rawa.
 - 03 Padi Tadah Hujan.
 - 04 Padi Tadah Lahan Kering.
 - 05 Intensifikasi Jagung.
 - 06 Pengembangan Jagung.
 - 07 Intensifikasi Serealia Lain.
 - 08 Pengembangan Serealia Lain.
- 03 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi:
 - 01 Intensifikasi Kedelai.
 - 02 Pengembangan Kedelai.
 - 03 Intensifikasi Ubi Kayu.
 - 04 Pengembangan Ubi Kayu.
 - 05 Intensifikasi Aneka Kacang.
 - 06 Pengembangan Aneka Kacang.
 - 07 Intensifikasi Aneka Umbi.
 - 08 Pengembangan Aneka Umbi.
- 04 Perlindungan Tanaman Pangan:
 - 01 Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan.
 - 02 Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan.
 - 03 Adaptasi Dampak Perubahan Iklim.
 - 04 Mitigasi dampak perubahan iklim.
 - 05 Identifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
 - 06 Verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
 - 07 Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.
 - 08 Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.
- 05 Pascapanen Tanaman Pangan:
 - 01 Teknologi pascapanen padi.
 - 02 Sarana pascapanen padi.
 - 03 Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain.
 - 04 Sarana pascapanen jagung dan serealia lain.
 - 05 Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang.
 - 06 Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.
 - 07 Teknologi pascapanen aneka umbi.
 - 08 Sarana pascapanen aneka umbi.

06 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian:

01 Pengolahan Hasil Pertanian:

- 01 Tanaman Pangan Serelia.
- 02 Tanaman Pangan Aneka Kacang dan Aneka Umbi.
- 03 Tanaman Buah dan Sayuran.
- 04 Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat.
- 05 Tanaman Perkebunan Semusim.
- 06 Tanaman Perkebunan Tahunan.
- 07 Peternakan Ruminansia.
- 08 Peternakan Non Ruminansia.

02 Mutu dan Standarisasi:

- 01 Standardisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 02 Standardisasi Perkebunan dan Peternakan.
- 03 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 04 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Perkebunan dan Peternakan.
- 05 Akreditasi dan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 06 Akreditasi dan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan.
- 07 Kerjasama dan Harmonisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 08 Kerjasama dan Harmonisasi Perkebunan dan Peternakan.

03 Pengembangan Usaha dan Investasi:

- 01 Kemitraan.
- 02 Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif.
- 03 Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 04 Investasi Perkebunan dan Peternakan.
- 05 Daya Saing Promosi Dalam Negeri.
- 06 Eksibisi dan Ekspo Promosi Dalam Negeri.
- 07 Daya Saing Promosi Luar Negeri.
- 08 Eksibisi dan Ekspo Promosi Luar Negeri.

04 Pemasaran Domestik:

- 01 Analisis Informasi Pasar.
- 02 Deseminasi Informasi Pasar.
- 03 Pemantauan Pasar.
- 04 Stabilisasi Harga.
- 05 Sarana Pasar.
- 06 Kelembagaan Pasar.
- 07 Akses Pasar untuk Jaringan Pemasaran.
- 08 Sarana Pemasaran untuk Jaringan Pemasaran.

05 Pemasaran Internasional:

- 01 Analisis Ekspor.
- 02 Pengembangan Ekspor.
- 03 Pemasaran Bilateral.
- 04 Pemasaran Regional.
- 05 Pemasaran Multilateral.
- 06 Kerjasama Komoditi Regional.
- 07 Kerjasama Komoditi Multilateral dan Bilateral.

- 07 Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Pertanian:
 - 01 Administrasi:
 - 01 Rencana Kerja.
 - 02 TOR/ Proposal.
 - 03 Pembentukan Tim Kerja.
 - 04 Surat menyurat.
 - 02 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan:
 - 01 Hasil Penelitian dan Pengembangan.
 - 02 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi.
 - 03 Diseminasi:
 - 04 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian:
 - 01 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop.
 - 02 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya.
 - 05 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan.
 - 06 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan.
 - 07 Data Penelitian dan Pengembangan.
 - 08 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan.
- 08 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI):
 - 01 Hak Cipta.
 - 02 Hak Paten Sederhana.
 - 03 Hak Paten Biasa.
 - 04 Hak Merek.
 - 05 Pendaftaran Varietas Tanaman.
 - 06 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim.
 - 07 Permohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan.
 - 08 Permohonan HKI yang ditolak.
 - 09 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan.
 - 10 Data Penelitian dan Pengembangan.
- 09 Ketahanan Pangan:
 - 01 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
 - 01 Analisis Ketersediaan Pangan.
 - 02 Sumberdaya Pangan.
 - 03 Analisis Akses Pangan.
 - 04 Pengembangan Akses Pangan.
 - 05 Analisis Kerawanan Pangan.
 - 06 Penanggulangan Kerawanan Pangan.
 - 02 Distribusi dan Cadangan Pangan:
 - 01 Analisis Distribusi Pangan.
 - 02 Kelembagaan Distribusi Pangan.
 - 03 Analisis Harga Pangan Produsen.
 - 04 Analisis Harga Pangan Konsumen.
 - 05 Cadangan Pangan Pemerintah.
 - 06 Cadangan Pangan Masyarakat.
 - 03 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan:
 - 01 Pola Konsumsi Pangan.
 - 02 Kebutuhan Konsumsi Pangan.
 - 03 Pengembangan Pangan Lokal.
 - 04 Promosi Penganekaragaman Pangan.

- 05 Pengawasan Keamanan Pangan Segar.
- 06 Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.
- 04 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan:
 - 01 Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan.
 - 02 Dewan Ketahanan Pangan.
 - 03 SOLID.
 - 04 Penghargaan Ketahanan Pangan.
- 10 Karantina Pertanian:
 - 01 Data karantina Hewan:
 - 01 Data Penyakit Hewan.
 - 02 Teknik dan Metode.
 - 03 Data Kualitatif dan Kuantitatif.
 - 04 Data Sarana/Laboratorium/Lokasi.
 - 05 Laporan.
 - 02 Data Karantina Tumbuhan:
 - 01 Data Penyakit Tumbuhan.
 - 02 Teknik dan Metode.
 - 03 Data Kualitatif dan Kuantitatif.
 - 04 Data Sarana/Laboratorium/Lokasi.
 - 05 Laporan.
 - 03 Inventarisasi Penyakit Hewan:
 - 01 Survei.
 - 02 Determinasi Penyakit/Daerah Pencar.
 - 03 Pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnose.
 - 04 Inventarisasi Penyakit Tumbuhan:
 - 01 Survei.
 - 02 Determinasi Penyakit/Daerah Pencar.
 - 03 Pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnose.
 - 05 Tindakan Karantina Hewan:
 - 01 Pemeriksaan.
 - 02 Pengasingan.
 - 03 Pengamatan.
 - 04 Perlakuan.
 - 05 Penahanan.
 - 06 Penolakan.
 - 07 Pemusnahan.
 - 08 Pembebasan.
 - 06 Tindakan Karantina Tumbuhan:
 - 01 Pemeriksaan.
 - 02 Pengasingan.
 - 03 Pengamatan.
 - 04 Perlakuan.
 - 05 Penahanan.
 - 06 Penolakan.
 - 07 Pemusnahan.
 - 08 Pembebasan.
 - 07 Sertifikasi Pelepasan Karantina:
 - 01 Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan.

- 02 Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan.
- 08 Pemberantasan Penyakit Hewan:
 - 01 Penutupan Satu Daerah.
 - 02 Pembatasan Gerak HPHK.
 - 03 Pembinaan HPHK.
- 09 Pemberantasan Penyakit Tumbuhan:
 - 01 Penutupan Satu Daerah.
 - 02 Pembatasan Gerak OPHK.
 - 03 Pembinaan OPHK.
- 10 Keamanan Pangan:
 - 01 Pengawasan Keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan).
 - 02 Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan).
- 11 Tertib Operasional Karantina Hewan:
 - 01 Penelitian Data Laporan Operasional.
 - 02 Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS).
- 12 Tertib Operasional Karantina Tumbuhan.
 - 01 Penelitian Data Laporan Operasional.
 - 02 Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS).
- 11 Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian:
 - 01 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman:
 - 01 Permohonan Perlindungan Varietas Tananm.
 - 02 Pengujian Perlindungan Varietas Tananm.
 - 03 Pendaftaran Varietas Sumber Daya Genetik Tanaman.
 - 02 Pelayanan Perijinan Pertanian:
 - 01 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian).
 - 02 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhn, teknis pengalihan saham perkebunan).
 - 03 Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
 - 02 Pelayanan Hukum:
 - 01 Sertifikasi.
 - 02 Pertimbangan Hukum.
- 12 Bimbingan Teknis.
- 13 Evaluasi.
- LH. Urusan Lingkungan Hidup:
 - 01 Tata Lingkungan:
 - 01 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - 02 Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan:
 - 01 Dokumentasi Inventarisasi.
 - 02 Pedoman Inventarisasi.
 - 03 Penetapan Ekoregion.
 - 04 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional.
 - 05 Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi, RPPLH Kabupaten/Kota.

- 02 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam:
 - 01 Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam.
 - 02 Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.
- 02 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor:
 - 01 Evaluasi Penerapan.
 - 02 Perencanaan Lingkungan Hidup.
- 03 Ekonomi Lingkungan:
 - 01 Perencanaan Evaluasi Ekonomi.
 - 02 Perencanaan Internalisasi Lingkungan.
 - 03 Insentif dan Pendanaan Lingkungan.
- 04 Dampak Lingkungan:
 - 01 Bimtek Dampak Lingkungan.
 - 02 Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan dalam Penilaian dokumen lingkungan.
 - 03 Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan dalam Pemeriksaan dokumen lingkungan.
 - 04 Evaluasi.
 - 05 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.
- 02 Pengendalian Pencemaran Lingkungan:
 - 01 Pemantauan dan Pengawasan:
 - 01 Industri Kimia.
 - 02 Industri Logam, Elektronika dan Mesin.
 - 03 Aneka Industri.
 - 04 Prasarana dan Jasa.
 - 05 Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas.
 - 06 Peternakan dan Perikanan.
 - 07 Perkebunan.
 - 08 Kehutanan dan Holtikultura.
 - 09 Usaha Skala Kecil.
 - 10 Transportasi Air dan Udara.
 - 11 Transportasi Darat.
 - 12 Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat.
 - 02 Evaluasi dan Pengembangan:
 - 01 Industri Kimia.
 - 02 Industri Logam, Elektronika dan Mesin.
 - 03 Aneka Industri.
 - 04 Prasarana dan Jasa.
 - 05 Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas.
 - 06 Peternakan dan Perikanan.
 - 07 Perkebunan.
 - 08 Kehutanan dan Holtikultura.
 - 09 Usaha Skala Kecil.
 - 10 Transportasi Air dan Udara.
 - 11 Transportasi Darat.
 - 12 Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat.
- 03 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dan Perubahan Iklim:
 - 01 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan:
 - 01 Pengembangan Sumber Daya Genetik.
 - 02 Pengembangan Keamanan Hayati.
 - 03 Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.

- 04 Pengelolaan Sumber Daya Genetik /Pengembangan dan Pemanfaatan.
 - 05 Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Genetik.
 - 06 Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Hayati.
 - 07 Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Hayati.
 - 08 Pengendalian Kerusakan Lahan Budidaya.
 - 09 Lahan Non Budidaya.
- 02 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat:
 - 01 Kerusakan Ekosistem Sungai.
 - 02 Pengelolaan Kualitas Air Sungai.
 - 03 Pengendalian Kerusakan Ekosistem Danau.
 - 04 Pengelolaan Kualitas Air Danau.
 - 05 Kerusakan Ekosistem Rawa Gambut.
 - 06 Kerusakan Ekosistem Rawa bukan Gambut.
- 03 Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut:
 - 01 Pencegahan.
 - 02 Penanggulangan.
 - 03 Pemulihan.
- 04 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer:
 - 01 Perangkat Mitigasi.
 - 02 Laporan inventarisasi GRK nasional.
 - 03 Data bidang inventarisasi GRK.
 - 04 Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon.
 - 05 Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan Ozon.
 - 06 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 05 Adaptasi Perubahan Iklim:
 - 01 Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim.
 - 02 Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim.
 - 03 Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim.
 - 04 Media kliring kerentananan perubahan iklim.
- PB. Pengelolaan B3, Limbah, Dan Sampah:
- 01 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun:
 - 01 Registrasi.
 - 02 Notifikasi.
 - 03 Pemantauan Sektor industri.
 - 04 Pemantauan Sektor non industri.
 - 05 Evaluasi dan Tindak Lanjut Sektor industri.
 - 06 Evaluasi dan Tindak Lanjut Sektor non industri.
 - 02 Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:
 - 01 Pengumpulan dan Pemanfaatan.
 - 02 Pengangkutan dan Pengolahan.
 - 03 Penimbunan dan Dumping.
 - 04 Notifikasi Limbah Lintas Batas.
 - 05 Rekomendasi Limbah Lintas Batas.
 - 03 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3:
 - 01 Pemantauan Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas.
 - 02 Pemantauan Manufaktur.

- 03 Pemantauan Agroindustri.
 - 04 Pemantauan Prasarana, Jasa, dan Non Institusi.
 - 05 Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas.
 - 06 Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Manufaktur.
 - 07 Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Agroindustri.
 - 08 Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Prasarana, Jasa, dan Non Institusi.
- 04 Pengelolaan Sampah:
- 01 Pembatasan Sampah.
 - 02 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah.
 - 03 Pembentukan Dewan Adipura.
 - 04 Penetapan Pemenang Adipura.
- HL. Hukum Lingkungan:
- 01 Hukum Administrasi Lingkungan:
- 01 Pengelolaan Pengaduan.
 - 02 Pengembangan Pengaduan.
 - 03 Penerapan Hukum Administrasi Lingkungan.
 - 04 Pengembangan Hukum Administrasi Lingkungan.
- 02 Penyelesaian Sengketa Lingkungan:
- 01 Administrasi Gugatan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.
 - 02 Gugatan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.
 - 03 Kerugian Negara dan Masyarakat Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan.
 - 04 Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan.
- 03 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan:
- 01 Administrasi Penyidikan.
 - 02 Pelaksanaan Penyidikan.
 - 03 Koordinasi penuntutan.
 - 04 Evaluasi dan tindak lanjut Kordinasi Penuntutan.
 - 05 Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 04 Perjanjian Internasional Lingkungan:
- 01 Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional.
 - 02 Tindak Lanjut Perjanjian Internasional.
 - 03 Evaluasi Perjanjian Internasional Pencemaran.
 - 04 Evaluasi Perjanjian Internasional Perusakan.
- KM. Komunikasi Lingkungan Dan Pemberdayaan Masyarakat:
- 01 Komunikasi Lingkungan:
- 01 Program Pengembangan Komunikasi.
 - 02 Evaluasi Pengembangan Komunikasi.
 - 03 Publikasi.
 - 04 Kampanye.
- 02 Penguatan Inisiatif Masyarakat:
- 01 Pengembangan dan Bimbingan Komunitas Pendidikan Lingkungan.
 - 02 Evaluasi Komunitas Pendidikan Lingkungan.
 - 03 Inventarisasi Kearifan Lingkungan.
 - 04 Revitalisasi Kearifan Lingkungan.

- 03 Peningkatan Peran Masyarakat:
 - 01 Masyarakat Kawasan Permukiman.
 - 02 Masyarakat Kawasan Rentan.
 - 03 Masyarakat Petani.
 - 04 Masyarakat Nelayan.
- 04 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan:
 - 01 Organisasi Sosial Dan Masyarakat.
 - 02 Organisasi Profesi dan Dunia Usaha.
- PS. Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan Dan Peningkatan Kapasitas:
 - 01 Data dan Informasi Lingkungan:
 - 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data.
 - 02 Manajemen Basis Data.
 - 03 Analisis Data dan Penyajian Informasi.
 - 04 Pengelolaan Informasi melalui Perpustakaan.
 - 05 Pengembangan Instrumen Layanan Informasi.
 - 06 Pengembangan Instrumen Analisis Data.
 - 07 Pengembangan Sistem Jaringan.
 - 08 Pemeliharaan Jaringan.
 - 02 Kelembagaan Lingkungan:
 - 01 Pengembangan Kelembagaan.
 - 02 Tata Laksana.
 - 03 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi.
 - 04 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota.
 - 03 Standarisasi dan Teknologi:
 - 01 Standarisasi Perangkat Manajemen Lingkungan.
 - 02 Standarisasi Pengujian Lingkungan.
 - 03 Standarisasi Kompetensi Keahlian Lingkungan.
 - 04 Standarisasi Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan.
 - 05 Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan.
 - 06 Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan.
 - 04 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan:
 - 01 Pemantauan Kualitas Lingkungan.
 - 02 Kajian Kualitas Lingkungan.
 - 03 Laboratorium Rujukan.
 - 04 Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.
- KM Koperasi dan UMKM:
 - 01 Kelembagaan Koperasi dan UKM:
 - 00 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi.
 - 00 Organisasi Koperasi dan UKM.
 - 01 Badan Hukum Koperasi (Penata Usahaan Badan Hukum Koperasi, Evaluasi Badan Hukum Koperasi).
 - 02 Penelaahan Kasus Hukum (Kasus Hukum Koperasi, Kasus Hukum UKM).
 - 01 Peraturan Perundang-Undangan:
 - 00 Penyusunan Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Koperasi.
 - 01 Penyusunan Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan UKM.

- 02 Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan (Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat, Peraturan Daerah).
- 02 Tata Laksana Koperasi dan UKM:
 - 00 Tata Laksana Koperasi (Tata Laksana Koperasi Primer, Tata Laksana Koperasi Sekunder).
 - 01 Tata Laksana UKM (Tata Laksana Usaha Kecil, Tata Laksana Usaha Menengah).
 - 02 Klasifikasi Koperasi dan UKM.
- 03 Keanggotaan Koperasi:
 - 00 Partisipasi Usaha dan Permodalan.
 - 01 Partisipasi Pengawasan (Rapat Anggota, Pengawasan).
 - 02 Pengembangan Anggota Kaderisasi, Penyuluhan.
- 04 Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan UKM:
 - 00 Pengendalian (Pengendalian Intern, Tindak Lanjut Hasil Pengendalian).
 - 01 Akuntabilitas dan Akuntansi (Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit).
 - 02 Monitoring dan Evaluasi, Koperasi dan UKM:
 - Monitoring.
 - Evaluasi.
- 02 Produksi:
 - 00 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura:
 - 00 Tanaman Pangan Padi, Palawija.
 - 01 Hortikultura (Buah-Buahan dan Tanaman Obat, Tanaman Hias dan Sayur).
 - 02 Sarana (Sarana Produksi, Sarana Pengolahan).
 - 01 Kehutanan dan Perkebunan:
 - 00 Kehutanan (Hutan Produksi, Hutan Kemasyarakatan).
 - 01 Perkebunan (Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah, Tanaman Keras).
 - 02 Sarana (Sarana Produksi, Sarana Pengolahan).
 - 02 Perikanan dan Peternakan:
 - 00 Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya).
 - 01 Peternakan (Ternak Besar, Ternak Kecil).
 - 03 Industri, Kerajinan dan Pertambangan:
 - 00 Industri (Sandang, Logam dan Elektronik, Pangan, Kimia dan Aneka).
 - 01 Kerajinan (Logam, Non Loga).
 - 02 Pertambangan Umum dan Migas.
 - 04 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha:
 - 00 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha (Listrik , Konstruksi).
 - 01 Aneka Usaha (Jasa Umum, Angkutan).
 - 02 Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
- 03 Pembiayaan:
 - 00 Program Pendanaan:
 - 00 Program Pendanaan Jangka Pendek (Koperasi dan UKM Jangka Pendek).
 - 01 Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang.
 - 02 Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir.
 - 01 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam:
 - 00 Pengembangan dan Pengendalian KSP.
 - 01 Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi.

- 02 Pengembangan dan Pengendalian USP LKM.
- 02 Urusan Permodalan:
 - 00 Pengembangan Permodalan Sendiri (Koperasi dan UKM)
 - 01 Pengembangan Permodalan Luar (Permodalan Bank, Non Bank)
 - 02 Pengembangan Kredit Program (Bank, Non Bank).
- 03 Asuransi dan Jasa Keuangan:
 - 00 Asuransi (Koperasi, UKM).
 - 01 Perpajakan (Koperasi, UKM).
 - 02 Jasa Keuangan dan Kredit Komersial (Bank dan Non Komersial Bank).
- 04 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit:
 - 00 Lembaga Pembiayaan (Modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang).
 - 01 Penjaminan Kredit (Penjaminan, Asuransi Kredit).
 - 02 Pasar Modal (Obligasi, Modal Penyertaan).
- 05 Lembaga Pengelola dan Bergulir KUKM (LPBD).
- 04 Pemasaran dan Jaringan Usaha:
 - 00 Perdagangan Dalam Negeri:
 - 00 Pengadaan Sektor Formal dan Informal.
 - 01 Distribusi Sektor Formal dan Informal.
 - 02 Pengembangan Sektor Formal dan In Formal.
 - 01 Ekspor dan Impor:
 - 00 Ekspor (Koperasi dan UKM).
 - 01 Impor (Koperasi dan UKM).
 - 02 Hubungan Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral, Regional dan Bilateral).
 - 02 Sarana Dan Prasarana Pemasaran:
 - 00 Sarana (Pengembangan Pasar Tradisional dan Sentra Pemasaran).
 - 01 Prasarana (Lembaga Perantara dan Fasilitas HAKI).
 - 02 Pengembangan Potensi Pemasaran (Koperasi dan UKM).
 - 03 Kemitraan dan Jaringan Usaha:
 - 00 Kemitraan (Koperasi dan UKM).
 - 01 Jaringan Usaha (Usaha Koperasi dan UKM).
 - 02 Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Koperasi Dan UKM).
 - 04 Informasi dan Publikasi Bisnis:
 - 00 Pengumpulan Informasi Koperasi dan UKM.
 - 01 Pengolahan Informasi Koperasi dan UKM.
 - 02 Publikasi dan Informasi (Koperasi dan UKM).
 - 05 Lembaga Layanan Pemasaran LIP Koperasi dan UKM.
- 05 Pengembangan Sumber Daya Manusia:
 - 00 Pengembangan Kewirausahaan:
 - 00 Lembaga Kewirausahaan (Pengembangan Jaringan Kewirausahaan dan Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan).
 - 01 Penumbuhan Kewirausahaan (Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan Dan Evaluasi Kewirausahaan).
 - 02 Sosialisasi Kewirausahaan (Perangkat Lunak dan Promosi Kewirausahaan).
 - 01 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM:
 - 00 Diklat Formal dan In Formal.

- 01 Diklat Non Formal (Perangkat Lunak , Sarana dan Prasarana).
- 02 Kerjasama Lembaga Diklat (Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah dan Non Pemerintah).
- 02 Peran Serata Masyarakat:
 - 00 Peningkatan Dukungan Media Massa Terhadap Koperasi dan UKM.
 - 01 Peningkatan Dukungan LSM Terhadap KUKM.
 - 02 Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi dan UKM.
- 03 Monitoring dan Evaluasi Diklat KUKM.
 - 00 Monitoring dan Evaluasi Diklat KUKM.
 - 01 Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal Dan Informal.
 - 02 Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat (Pemerintah dan Non Pemerintah).
- 04 Advokasi:
 - 00 Advokasi Organisasi dan Manajemen.
 - 01 Advokasi Kemitraan dan Teknologi.
 - 02 Advokasi Peraturan Perundang-Undangan (Kajian Penerangan dan Sosialisasi Perundanga-Undangan).
- 06 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha:
 - 01 Produktivitas dan Mutu.
 - 00 Produktivitas (Inkubator Teknologi dan Pengembangan Klaster)
 - 01 Peningkatan Mutu (Disain dan Standarisasi).
 - 02 Sertifikasi Produk (Sertifikasi , Label dan Merek).
 - 02 Restrukturisasi Usaha:
 - 00 Restrukturisasi Manajemen (Koperasi dan UKM).
 - 01 Restrukturisasi Pendanaan (Koperasi dan UKM).
 - 02 Restrukturisasi Kelembagaan (Koperasi dan UKM).
 - 03 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB).
 - 00 Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) (Asosiasi dan Manajemen LPB, Akreditasi LPB).
 - 01 Pengembangan Bisnis LPB (Peningkatan Kerjasama LPB dan Kerja Sama Layanan LPB).
 - 02 Pengembangan Jaringan LPB (Kerja Sama Kelembagaan dan Teknologi).
 - 04 Fasilitasi Investasi UKMK:
 - 00 Investasi Klaster UKMK (Fasilitasi Investasi Ukmk Argo Bisnis dan UKMK Non Agro Bisnis).
 - 01 Pengembangan Kerjasama Investasi Usaha (Pangan Dan Non Pangan).
 - 02 Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK.
 - 05 Pengembangan Sistem Bisnis:
 - 00 Fasilitasi transaksi (Dalam dan Luar Negeri).
 - 01 Kerjasama usaha (Pertukaran Koperasi dan UKM).
 - 02 Jaringan komunikasi bisnis (Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis).
- 07 Pengkajian Sumber Daya UKMK:
 - 00 Penelitian Koperasi:
 - 00 perencanaan dan pengendalian (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan).
 - 01 Penyelenggaraan Kelembagaan (Koperasi dan Bisnis Koperasi).
 - 02 Tatalaksana Penelitian (Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi, Sarana dan Prasarana).

- 01 Penelitian UKM:
 - 00 Perencanaan dan pengendalian (perencanaan , evaluasi dan pelaporan).
 - 01 Penyelenggaraan kelembagaan (koperasi dan bisnis koperasi).
 - 02 Tatalaksana penelitian (temu ilmiah dan pengembangan metodologi, sarana dan prasarana).
- 02 penelitian sumberdaya:
 - 00 Perencanaan dan pengendalian (perencanaan , evaluasi dan pelaporan).
 - 01 Penyelenggaraan kelembagaan (sumber daya manusia dan pembiayaan).
 - 02 Tatalaksana penelitian (temu ilmiah dan pengembangan metodologi, sarana dan prasarana).
- 03 Pengembangan Perkaderan UKM:
 - 00 Penyuluhan (penyelenggara dan materi penyuluhan).
 - 01 Perkaderan (penilaian dan pengembangan).
 - 02 Kerjasama jaringan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan.
- 04 Kerjasama Internasional dan Hubungan Antar Lembaga.

PM. Urusan Penanaman Modal:

- 01 Perencanaan Penanaman Modal:
 - 01 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya:
 - 01 Tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.
 - 02 Kelautan, perikanan dan peternakan.
 - 03 Energi terbarukan.
 - 04 Energi tak terbarukan.
 - 05 Sumber daya mineral logam.
 - 06 Sumber daya mineral non logam.
 - 02 Perencanaan Industri Manufaktur:
 - 01 Industri Logam dan Mesin.
 - 02 Industri Tekstil dan Aneka.
 - 03 Industri Kimia Dasar.
 - 04 Industri Barang Kimia dan Farmasi.
 - 05 Industri Alat Transportasi.
 - 06 Industri Telematika.
 - 03 Perencanaan Jasa dan Kawasan:
 - 01 Jasa perdagangan.
 - 02 Jasa pariwisata.
 - 03 Kawasan ekonomi.
 - 04 Kawasan ekonomi khusus.
 - 05 Kawasan ekonomi lainnya.
 - 04 Perencanaan Infrastruktur:
 - 01 Infrastruktur transportasi darat dan perkertaapian.
 - 02 Infrastruktur jalan dan jembatan.
 - 03 Infrastruktur energi.
 - 04 Infrastruktur sumber daya air.
 - 05 Infrastruktur transportasi laut.
 - 06 Infrastruktur transportasi udara dan infrastruktur lainnya.
- 02 Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
 - 01 Deregulasi Penanaman Modal:
 - 01 Sektor primer pertanian, kelautan dan perikanan.
 - 02 Sektor primer energi, sumber daya mineral dan kehutanan.

- 03 Sektor sekunder industri logam, mesin, transportasi dan telematika.
- 04 Sektor sekunder industri agro, kimia, tekstil dan aneka.
- 05 Sektor tersier pariwisata, perdagangan dan telekomunikasi.
- 06 Sektor tersier perhubungan, pekerjaan umum dan jasa lainnya.
- 02 Pengembangan Peluang Potensi Daerah:
 - 01 Sektor primer.
 - 02 Sektor tersier.
 - 03 Sektor sekunder industri logam, mesin, transportasi dan telematika.
 - 04 Sektor sekunder agro, kimia, tekstil dan aneka.
- 03 Pemberdayaan Usaha:
 - 01 Pembinaan.
 - 02 Penyuluhan.
 - 03 Sektor primer dan tersier.
 - 04 Sektor sekunder.
 - 05 Pelayanan usaha sektor primer dan tersier.
 - 06 Pelayanan usaha sektor sekunder.
 - 07 Workshop dan sosialisasi.
- 03 Promosi Penanaman Modal:
 - 01 Pengembangan Promosi:
 - 01 Analisis Target Strategi Promosi.
 - 02 Analisis Strategi Daya Saing Promosi.
 - 03 Fasilitaslayah Promosi Wilayah Pasifik dan Afrika.
 - 04 Fasilitas Promosi Wilayah Jawa Barat.
 - 02 Promosi Sektoral:
 - 01 Promosi Industri Sumber Daya Alam.
 - 02 Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik.
 - 03 Industri Manufaktur Lainnya.
 - 04 Promosi Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan.
 - 05 Promosi Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya.
 - 03 Fasilitas Promosi Wilayah Jawa Barat, DKI dan Banten:
 - 04 Pameran Dan Sarana Promosi:
 - 01 Pameran dalam Penyusunan Program dan Monitoring..
 - 02 Pameran dalam Penyelenggaraan dan Evaluasi
 - 03 Media Cetak.
 - 04 Materi Promosi Media Cetak.
 - 05 Publikasi dan Distribusi Media Cetak.
 - 06 Pameran Luar Negeri Publikasi dan Distribusi.
 - 07 Materi Promosi Media Elektronik.
 - 08 Pelayanan Informasi Media Elektronik.
- 04 Kerja Sama Penanaman Modal:
 - 01 Kerjasama Bilateral dan Multilateral:
 - 01 Kerja Wilayah Amerika.
 - 02 Kerjasama Wilayah Eropa.
 - 03 Kerjasama Wilayah Asia.
 - 04 Kerjasama Wilayah Pasifik dan Afrika.
 - 05 Kerjasama Organisasi PBB.

- 06 Kerjasama Organisasi Non PBB.
- 02 Kerja Sama Regional Asean:
 - 01 Kerjasama Asean.
 - 02 Kerjasama Sub Regional Asean.
 - 03 Kerjasama Sub Regional Asean Wilayah Barat Indonesia.
 - 04 Kerjasama Sub Regional Asean Wilayah Timur Indonesia.
 - 05 Kerjasama Apec.
 - 06 Kerjasama Asean dan Kawasan Lainnya.
 - 07 Kerjasama Asean dan Kawasan Lainnya.
- 03 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional:
 - 01 Asosiasi Bisnis.
 - 02 Lembaga Bisnis.
 - 03 Lembaga Perbankan.
 - 04 Lembaga Non Perbankan.
- 05 Pelayanan Penanaman Modal:
 - 01 Pelayanan Aplikasi:
 - 01 Aplikasi Baru Sektor Primer dan Tersier.
 - 02 Aplikasi Perluasan Sektor Primer dan Tersier.
 - 03 Aplikasi Perubahan Sektor Primer dan Tersier.
 - 04 Aplikasi Baru Sektor Sekunder.
 - 05 Aplikasi Perluasan Sektor Sekunder.
 - 06 Aplikasi Perubahan Sektor Sekunder.
 - 07 Aplikasi Sektor Tersier.
 - 08 Pengolahan Data Penanaman Modal.
 - 09 Laporan PMPTSP.
 - 02 Pelayanan Perizinan:
 - 01 Perizinan Sektor Primer dan Tersierpertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana.
 - 02 Perizinan Sektor Primer dan Tersier Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi.
 - 03 Perizinan Sektor Primer dan Tersierpertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa.
 - 04 Perizinan Sektor Sekunder Industri Mesin, Logam dan Barang Logam.
 - 05 Perizinan Sektor Sekunder Industri Kimia dan Barang Kimia.
 - 06 Perizinan Sektor Sekunder Industri Aneka.
 - 07 Verifikasi/Validasi.
 - 08 Pertimbangan Teknis.
 - 09 Tim Teknis.
 - 10 Penerbitan Naskah Izin.
 - 03 Pelayanan Fasilitas:
 - 01 Pelayanan Sektor Primer dan Tersier Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana.
 - 02 Pelayanan Sektor Primer dan Tersier Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi.
 - 03 Pelayanan Sektor Sektor Primer dan Tersier Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa.
 - 04 Perizinan Sektor Sekunder Industri Mesin, Logam dan Barang Logam.
 - 05 Perizinan Sektor Sekunder Industri Kimia dan Barang Kimia.
 - 06 Perizinan Sektor Sekunder Industri Aneka.
- 06 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
 - 01 BAP Pemantauan Penanaman Modal.

- 02 Laporan Triwulan/Semester Pemantauan Penanaman Modal.
- 03 Helpdesk Pemantauan Penanaman Modal.
- 04 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal dan PTSP.
- 05 Saksi Fasilitasi Penyelesaian PMPTSP.
- 06 Pembelaan Fasilitasi Penyelesaian PMPTSP.
- 07 Pemberi Keterangan FSP.
- 08 Analisis PMPTSP.
- 09 Pengawasan Penanaman Modal 5 Tahun Musnah.
- 10 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal.
- 11 Naskah dan Dokumen Izin.
- 12 Naskah dan Dokumen Izin Kadaluarsa.
- 13 Izin Investasi Strategis Penanaman Modal.
- 14 Perizinan Lainnya Sesuai Jenisnya.
- 15 Pencabutan/Pembatalan/Perbaikan Perizinan Penanaman Modal.
- 16 Administrasi PMPTSP.
- 17 Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.
- 18 Workshop/Bintek/Diklat PMPTSP.

DG. Perdagangan:

01 Perdagangan Dalam Negeri:

- 01 Bina Usaha:
 - 01 Kelembagaan.
 - 02 Penguatan usaha.
 - 03 Jasa Perdagangan berbasis elektronik.
 - 04 Jasa Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis.
 - 05 Usaha dagang asing.
 - 06 Keagenan.
 - 07 Informasi Pendaftaran perusahaan.
 - 08 Informasi Seksi analisa LKTP.
 - 09 Pelaku pasar Pengecer.
 - 10 Pelaku pasar Pemasok.
- 02 Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri:
 - 01 Iklim usaha.
 - 02 Bimbingan teknis.
 - 03 Fasilitasi usah produktif.
 - 04 Fasilitasi usaha dan pemasaran.
 - 05 Penelaahan potensi produk dalam rangka pengembangan produk lokal.
 - 06 Fasilitasi penguatan produk dalam rangka pengembangan potensi produk.
 - 07 Kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri pencitraan produk dalam negeri.
 - 08 Peningkatan promosi pencitraan produk dalam negeri.
- 03 Logistik dan Sarana Distribusi:
 - 01 Perencanaan Pengembangan sarana distribusi.
 - 02 Bimbingan teknis Pengembangan sarana distribusi.
 - 03 Bimbingan teknis pengelolaan sarana distribusi.
 - 04 Evaluasi pengelolaan sarana distribusi.
 - 05 Kerja sama pengembangan sistem logistik dengan Pemerintah.
 - 06 Kerja sama pengembangan sistem logistik dengan lembaga non pemerintah.

- 07 Informasi logistik.
- 08 Bimbingan teknis penyedia jasa logistik.
- 04 Bahan Pokok dan Barang Strategis:
 - 01 Informasi Harga (Pengumpulan, Pengolahan, Penyiapan, Penyajian Informasi, Analisis).
 - 02 Informasi Non Harga (Pengumpulan, Pengolahan, Penyiapan, Penyajian Informasi, Analisis).
 - 03 Hasil Industri berupa gula dan tepung.
 - 04 Hasil industri berupa minyak goreng dan garam.
 - 05 Barang strategis hasil agro.
 - 06 Barang strategis hasil industri.
 - 07 Barang pokok agro serelia.
 - 08 Barang pokok agro hewan dan non serelia.
- 02 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen:
 - 01 Standardisasi:
 - 01 Hubungan kelembagaan.
 - 02 Informasi standar.
 - 03 Kerjasama standarisasi regional.
 - 04 Kerjasama standarisasi bilateral dan multilateral.
 - 05 Penetapan standar.
 - 06 Perumusan Standar.
 - 07 Tata Usaha kepegawaian.
 - 08 Tata usaha keuangan.
 - 09 Tata usaha perencanaan dan program.
 - 10 Tata usaha inventaris kantor/BMAN.
 - 02 Pemberdayaan Konsumen:
 - 01 Kerjasama.
 - 02 Informasi, dan publikasi.
 - 03 Konsultasi hukum analisa penyelenggara perlindungan konsumen.
 - 04 Analisis penyelenggara perlindungan konsumen.
 - 05 Bimbingan konsumen.
 - 06 Bimbingan pelaku usaha.
 - 07 Fasilitas pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
 - 08 Fasilitas pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen.
 - 04 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa:
 - 01 Produk pertambangan dan olahan.
 - 02 Produk aneka industri.
 - 03 Produk pertanian dan kehutanan.
 - 04 Produk kimia dan olahan.
 - 05 Jasa distribusi.
 - 06 Jasa bisnis.
 - 07 Kerjasama lembaga pemerintah.
 - 08 Kerjasama lembaga non pemerintah.
 - 05 Metrologi:
 - 01 Sarana metrologi legal.
 - 02 Kerjasama metrologi legal.
 - 03 Kelembagaan metrologi legal.

- 04 Penilaian metrologi legal.
 - 05 Besaran massa, listrik, tekanan dan suhu.
 - 06 Besaran arus, panjang dan volume.
 - 07 Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
 - 08 Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional.
 - 09 Bimbingan Mutu Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).
 - 10 Pelayanan Teknis Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).
 - 11 Bimbingan Mutu Balai Pengujian UTTP.
 - 12 Pelayanan Teknis Balai Pengujian UTTP.
 - 13 Bimbingan Kemetrologian Bali SML Regional 1 Medan.
 - 14 Pelayanan Kemetrologian Bali SML Regional 1 Medan.
 - 15 Bimbingan Kemetrologian Bali SML Regional 1 Jogjakarta.
 - 16 Pelayanan Kemetrologian Bali SML Regional 1 Jogjakarta.
 - 17 Bimbingan Kemetrologian Bali SML Regional 1 Makassar.
 - 18 Pelayanan Kemetrologian Bali SML Regional 1 Makassar.
- 03 Perdagangan Luar Negeri:
- 01 Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan:
 - 01 Ekspor produk tanaman pangan.
 - 02 Ekspor produk perikanan, dan peternakan.
 - 03 Tanaman Perkebunan Tahunan.
 - 04 Tanaman Perkebunan Musiman.
 - 05 Hortikultura.
 - 06 Rempah-rempah dan tanaman obat.
 - 07 Hasil hutan berupa kayu dan produk kayu.
 - 08 Hasil hutan bukan kayu.
 - 02 Ekspor Produk Industri dan Pertambangan:
 - 01 Produk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil).
 - 02 Produk Aneka dan jasa.
 - 03 Produk Logam dan mesin.
 - 04 Produk alat transportasi dan elektronika.
 - 05 Produk industri agro.
 - 06 Produk kimia.
 - 07 Produk migas.
 - 08 Produk pertambangan.
 - 03 Impor:
 - 01 Impor Barang Modal Mesin dan peralatan mesin.
 - 02 Impor Barang Modal alat angkut.
 - 03 Barang pertanian dan kehutanan.
 - 04 Barang kelautan, dan perikanan.
 - 05 Barang aneka industri.
 - 06 Barang bahan baku industri.
 - 07 Barang konsumsi tahan lama.
 - 08 Barang konsumsi tidak tahan lama.
 - 09 Barang kimia dan bahan berbahaya.
 - 10 Barang tambang dan limbah.
 - 04 Fasilitasi Ekspor dan Impor:
 - 01 Kerjasama multilateral dan regional, termasuk bilateral.

- 02 Pembiayaan perdagangan dalam kerjasama internasional.
- 03 Sumber pembiayaan dan sistem pembayaran.
- 04 Prosedur ekspor dan impor.
- 05 Dokumen ekspor dan impor.
- 06 Sarana dan prasarana Penunjang Perdagangan Internasional.
- 07 Regulasi Penunjang Perdagangan Internasional.
- 08 Analisa pelayanan perdagangan.
- 09 Fasilitasi pelayanan perdagangan.
- 05 Pengamanan Perdagangan:
 - 01 Monitoring Hambatan Perdagangan.
 - 02 Evaluasi Monitoring Hambatan Perdagangan.
 - 03 Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan.
 - 04 Penanganan Tuduhan Dumping.
 - 05 Penanganan Tuduhan Subsidi.
 - 06 Penanganan Tuduhan Safeguard.
- 04 Kerjasama Perdagangan Internasional:
 - 01 Multilateral:
 - 01 Tarif barang pertanian.
 - 02 Non Tarif barang pertanian.
 - 03 Tarif barang non pertanian.
 - 04 Non Tarif barang non pertanian.
 - 05 Akses pasar barang non pertanian.
 - 06 Aturan perdagangan.
 - 07 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan investasi.
 - 08 Lingkungan dan isu baru.
 - 09 Tinjauan Ketentuan perdagangan.
 - 10 Notifikasi.
 - 02 ASEAN:
 - 01 Perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN I.
 - 02 Fasilitas perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN I.
 - 03 Perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN II.
 - 04 Fasilitas perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN II.
 - 05 ASEAN mitra dialog.
 - 06 Kerjasama antar dan sub regional.
 - 03 APEC dan Organisasi Internasional Lainnya:
 - 01 Akses perdagangan Barang APEC.
 - 02 Akses investasi APEC.
 - 03 Fasilitasi perdagangan APEC.
 - 04 Fasilitasi investasi APEC.
 - 05 Badan-badan PBB dan Non PBB.
 - 06 Organisasi komoditi internasional.
 - 04 Bilateral:
 - 01 Kerja sama bilateral dengan berbagai negara-negara.
 - 05 Perundingan Perdagangan Jasa:
 - 01 Jasa bisnis dan distribusi.
 - 02 Jasa keuangan.
 - 03 Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga.
 - 04 Jasa transportasi.
 - 05 Jasa pendidikan.

- 06 Jasa kesehatan.
 - 07 Jasa komunikasi.
 - 08 Jasa lingkungan dan jasa lainnya.
 - 09 Rules dan peraturan domestik.
 - 10 Penyusunan analisis informasi.
- 05 Pengembangan Ekspor Nasional:
- 01 Pasar dan Informasi Ekspor:
 - 01 Pengembangan pasar.
 - 02 Pengelolaan data pada sistem informasi ekspor.
 - 03 Pengembangan sistem informasi ekspor.
 - 04 Pelayanan pelaku usaha ekspor.
 - 05 Publikasi informasi ekspor.
 - 02 Produk ekspor dan ekonomi kreatif:
 - 01 Hasil industri manufaktur berupa Mesin, logam, elektronika dan telematika.
 - 02 Hasil industri manufaktur berupa Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka.
 - 03 Produk agro berupa kehutanan dan perkebunan.
 - 04 Produk agro berupa pertanian dan perikanan.
 - 05 Jasa bisnis dan profesi.
 - 06 Jasa konstruksi dan distribusi.
 - 07 Media dan iptek Ekonomi kreatif.
 - 08 Seni budaya dan desain ekonomi kreatif.
 - 03 Kerja Sama Pengembangan Ekspor:
 - 01 Pemerintah luar negeri.
 - 02 Non pemerintah luar negeri.
 - 03 Pemerintah dalam negeri.
 - 04 Non pemerintah dalam negeri.
 - 04 Promosi dan Citra:
 - 01 Promosi.
 - 02 Perencanaan citra.
 - 03 Pemantauan dan evaluasi citra.
 - 04 Penerapan citra dalam dan luar negeri.
- 06 Perdagangan Berjangka Komoditi:
- 01 Perniagaan:
 - 01 Bina Usaha kelembagaan dan pelaku penunjang.
 - 02 Bina Usaha pelaku pasar.
 - 03 Pengawasan Transaksi kelembagaab dan pelaku penunjang.
 - 04 Pengawasan Transaksi pelaku pasar.
 - 05 Pemantauan dan evaluasi keuangan dalam rangka Pengawasan keuangan dan audit.
 - 06 Audit kepatuhan dan keuangan dalam rangka Pengawasan keuangan dan audit.
 - 02 Analisis Pasar:
 - 01 Pengkajian pasar fisik dan penyerahan.
 - 02 Posisi dan pelaporan pengkajian pasar.
 - 03 Kelembagaan dan produk Pengembangan pasar.
 - 04 Tata tertib dan kontrak pengembangan pasar.
 - 05 Teknologi Informasi pada Sistem informasi.
 - 06 Data pada Sistem Informasi.

- 03 Pasar Fisik dan Jasa:
 - 01 Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang.
 - 02 Pembinaan pelaku sistem resi gudang.
 - 03 Pengawasan transaksi pasar lelang.
 - 04 Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang.
 - 05 Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi pada sistem resi gudang.
 - 06 Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual pada sistem resi gudang.
 - 07 Bimbingan Teknis.
 - 08 Evaluasi.
- PI. Urusan Perindustrian:
- 01 Iklim Usaha dan Kerjasama:
 - 01 Industri Manufaktur:
 - 01 Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya).
 - 02 Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya).
 - 03 Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya).
 - 04 Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka).
 - 02 Industri Agro:
 - 01 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
 - 02 Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan.
 - 03 Industri Minuman dan Tembakau.
 - 03 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi:
 - 01 Alat Transportasi Darat.
 - 02 Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan.
 - 03 Elektronika dan Telematika.
 - 04 Permesinan dan Alat Mesin Pertanian.
 - 04 Industri Kecil dan Menengah:
 - 01 Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan.
 - 02 Industri Kerajinan dan Sandang.
 - 03 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika.
 - 02 Promosi Industri:
 - 01 Industri Manufaktur:
 - 01 Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya).
 - 02 Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya).
 - 03 Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya).
 - 04 Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka).
 - 02 Industri Agro:
 - 01 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
 - 02 Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan.
 - 03 Industri Minuman dan Tembakau.
 - 03 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi:
 - 01 Alat Transportasi Darat.
 - 02 Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan.

- 03 Industri Elektronika dan Telematika.
- 04 Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian.
- 04 Industri Kecil dan Menengah:
 - 01 Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan.
 - 02 Industri Kerajinan dan Sandang.
 - 03 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika.
- 03 Standarisasi dan Teknologi:
 - 01 Industri Manufaktur:
 - 01 Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya).
 - 02 Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya).
 - 03 Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya).
 - 04 Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka).
 - 02 Industri Agro:
 - 01 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
 - 02 Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan.
 - 03 Industri Minuman dan Tembakau.
 - 03 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi:
 - 01 Alat Transportasi Darat.
 - 02 Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan.
 - 03 Elektronika dan Telematika.
 - 04 Permesinan dan Alat Mesin Pertanian.
 - 04 Industri Kecil dan Menengah:
 - 01 Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan.
 - 02 Industri Kerajinan dan Sandang.
 - 03 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika.
- 04 Hak dan Kekayaan Intelektual:
 - 01 Industri Manufaktur:
 - 01 Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya).
 - 02 Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya).
 - 03 Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya).
 - 04 Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka).
 - 02 Industri Agro:
 - 01 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
 - 02 Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan.
 - 03 Industri Minuman dan Tembakau.
 - 03 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi:
 - 01 Alat Transportasi Darat.
 - 02 Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan.
 - 03 Elektronika dan Telematika.
 - 04 Permesinan dan Alat Mesin Pertanian.
 - 04 Industri Kecil dan Menengah:
 - 01 Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan.
 - 02 Industri Kerajinan dan Sandang.
 - 03 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika.

- 05 Industri Hijau:
 - 01 Industri Manufaktur:
 - 01 Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya).
 - 02 Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya).
 - 03 Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya).
 - 04 Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka).
 - 02 Industri Agro:
 - 01 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
 - 02 Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan.
 - 03 Industri Minuman dan Tembakau.
 - 03 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi:
 - 01 Alat Transportasi Darat.
 - 02 Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan.
 - 03 Elektronika dan Telematika.
 - 04 Permesinan dan Alat Mesin Pertanian.
 - 04 Industri Kecil dan Menengah:
 - 01 Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan.
 - 02 Industri Kerajinan dan Sandang.
 - 03 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika.
- 05 Analisis Industri Unggulan Provinsi:
 - 01 Kerjasama Industri Unggulan Provinsi:
 - 01 Kerjasama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri I.
 - 02 Kerjasama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri II.
 - 03 Kerjasama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri III.
- 06 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota):
 - 01 Kerjasama Industri Unggulan Provinsi:
 - 01 Kerjasama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri I.
 - 02 Kerjasama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri II.
 - 03 Kerjasama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri III.
 - 02 Kerja sama Industri Unggulan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 01 Kerja sama Industri Unggulan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Industri I.
 - 02 Kerjasama Industri Unggulan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Industri II.
 - 03 Kerjasama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Wilayah Industri III.
- 07 Pengembangan Infrastruktur Pendukung:
 - 01 Kawasan Industri Wilayah Industri I.
 - 02 Kawasan Industri Wilayah Industri II.
 - 03 Kawasan Industri Wilayah Industri III.
- 08 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri:
 - 01 Kawasan Industri Wilayah Industri I.
 - 02 Kawasan Industri Wilayah Industri II.
 - 03 Kawasan Industri Wilayah Industri III.
- 09 Kerjasama Industri Internasional:
 - 01 Kerjasama Industri Internasional Wilayah I (Amerika, Eropa, Timur Tengah, Dan Fora Multilateral).

- 01 Akses Industri Wilayah Amerika.
- 02 Akses Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah.
- 03 Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Amerika.
- 04 Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah.
- 05 Kerjasama Multilateral dengan WTO dan Organisasi Komoditas.
- 06 Fora Multilateral Lainnya.
- 02 Kerjasama Industri Internasional Wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, Dan Fora Regional:
 - 01 Akses Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia.
 - 02 Akses Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika.
 - 03 Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia.
 - 04 Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika.
 - 05 Kerjasama Regional APEC dan Regional Lainnya.
 - 06 Kerjasama Regional ASEAN dan Mitra Dialog.
- 03 Ketahanan Industri:
 - 01 Penanganan Hambatan Industri Wilayah I (Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Fora Multilateral).
 - 02 Penanganan Hambatan Industri Wilayah II (Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Multilateral).
 - 03 Pengamanan Basis Industri Manufaktur.
 - 04 Pengamanan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.
 - 05 Pengamanan Industri Agro.
 - 06 Pengamanan Industri Kecil dan Menengah.
- 10 Standarisasi:
 - 01 Standar:
 - 01 Standar Industri Manufaktur.
 - 02 Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi.
 - 02 Penyiapan Penerapan:
 - 01 Penyiapan Penerapan Standar.
 - 02 Kerja sama Standarisasi.
 - 03 Infrastruktur Standar:
 - 01 Pengembangan Infrastruktur Standar.
 - 02 Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian.
- 11 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri:
 - 01 Kebijakan Industri:
 - 01 Kebijakan Sektoral.
 - 02 Kebijakan Kewilayahan.
 - 02 Perpajakan dan Tarif
 - 01 Perpajakan dan Tarif.
 - 02 Tarif dan Non Tarif.
 - 03 Pengembangan Model Industrial:
 - 01 Pemrograman Model.
 - 02 Aplikasi Model.
- 12 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup:
 - 01 Industri Hijau:
 - 01 Pengembangan Industri Hijau.

- 02 Kerja Sama Industri Hijau.
- 02 Lingkungan Hidup:
 - 01 Lingkungan Global.
 - 02 Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 03 Energi:
 - 01 Konservasi Energi.
 - 02 Diversifikasi Energi.
- 13 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual:
 - 01 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri:
 - 01 Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri.
 - 02 Penerapan Kebijakan Teknologi Industri.
 - 02 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri:
 - 01 Pengkajian Inovasi Teknologi Industri.
 - 02 Penerapan Inovasi Teknologi Industri.
 - 03 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual:
 - 01 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
 - 02 Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.
- PT. Perikanan Tangkap:
 - 01 Sumber Daya Ikan:
 - 01 Data dan Statistik Perikanan Tangkap (pengumpulan dan pengolahan, analisis dan penyajian).
 - 02 Sumber Daya Ikan Perairan Umum Pemulihan sumber daya ikan perairan umum, tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan.
 - 03 Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan (pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan, tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan).
 - 04 Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas.
 - 01. identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif.
 - 02. tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif.
 - 05 Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan, analisis pengelolaan sumber daya ikan).
 - 02 Pelabuhan Perikanan:
 - 01 Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan (identifikasi dan analisis, penyiapan bangunan).
 - 02 Tata Operasional Pelabuhan Perikanan (tata laksana pelabuhan perikanan, pengusaha dan pelayanan).
 - 03 Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan (bimbingan pembangunan PPS, PPN, dan PPP, bimbingan pembangunan PPI dan Pelabuhan swasta).
 - 04 Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (tata laksana dan sarana, keselamatan pelayaran).
 - 05 Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan (pemantauan dan evaluasi PPS, PPN, dan PPP, pemantauan dan evaluasi PPI dan peabuhan swasta).
 - 03 Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan:
 - 01 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan rancang bangun kapal perikanan, kelaikan kapal perikanan.
 - 02 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan.

- 03 Pendaftaran Kapal Perikanan (identifikasi dan pengukuran, pencatatan dan dokumentasi).
 - 04 Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan.
 - 05 Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan pelaporan.
- 04 Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan:
- 01 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan (verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan, pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan).
 - 02 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan (verifikasi perusahaan penangkapan ikan, administrasi perusahaan penangkapan ikan).
 - 03 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan (verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan berbadan hukum, verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi, pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan, pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan, evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan).
 - 04 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan (pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan, evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan).
 - 05 Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan (pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan, evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan).
- 05 Pengembangan Usaha Penangkapan:
- 01 Kelembagaan Usaha (tata laksana kelembagaan, kerja sama usaha).
 - 02 Investasi dan Pemodalan Usaha (tata laksana investasi dan pemodalan usaha, bimbingan investasi dan pemodalan usaha).
 - 03 Kenelayanan (identifikasi dan kapasitas nelayan, bimbingan nelayan).
 - 04 Pembinaan pengelolaan usaha (bimbingan pengelolaan usaha, bimbingan diversifikasi usaha).
 - 05 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan.
- PB. Perikanan Budidaya:
- 01 Prasarana dan Sarana Budidaya:
 - 01 Lahan dan Air (identifikasi potensi, penataan).
 - 02 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar (standarisasi, pemantauan dan evaluasi).
 - 03 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau (standarisasi, pemantauan dan evaluasi).
 - 04 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut (standarisasi, pemantauan dan evaluasi).
 - 05 Minapolitan Budidaya (identifikasi potensi, pemanfaatan potensi).
 - 02 Perbenihan:
 - 01 Induk (pengelolaan induk ikan air tawar, pengelolaan induk ikan air payau dan laut).
 - 02 Perbenihan Skala Kecil ikan air tawar dan ikan air laut.
 - 03 Perbenihan Skala Besar (perbenihan skala besar ikan air tawar, perbenihan skala besar ikan air payau dan laut).
 - 04 Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan.

- 05 Informasi dan Distribusi Perbenihan.
- 03 Produksi:
 - 01 Budidaya air tawar (standarisasi dan penerapan teknologi budidaya air tawar).
 - 02 Budidaya air payau dan laut (standarisasi, penerapan teknologi budidaya air payau dan laut).
 - 03 Budidaya ikan hias (standarisasi, penerapan teknologi budidaya ikan hias).
 - 04 Sertifikasi (monitoring dan evaluasi sertifikasi).
 - 05 Data dan statistik perikanan budidaya (pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan penyajian data statistik).
- 04 Kesehatan Ikan dan Lingkungan:
 - 01 Hama dan penyakit ikan (metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit, monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan).
 - 02 Perlindungan lingkungan budidaya (pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya).
 - 03 Standarisasi dan kesehatan dan lingkungan (dan standarisasi mode uji kesehatan ikan dan lingkungan).
 - 04 Obat ikan, kimia, dan bahan biologi (monitoring dan evaluasi obat ikan kimia dan bahan biologi).
 - 05 Pengendalian residu (Perencanaan dan tindak lanjut pengendalian residu).
- 05 Usaha Budidaya:
 - 01 Investasi dan permodalan.
 - 02 Kewirausahaan (bimbingan usaha dan kemitraan).
 - 03 Pelayanan usaha (perizinan, pemantauan dan evaluasi).
 - 04 Kelembagaan dan ketenagakerjaan.
 - 05 Infomasi usaha dan promosi.
- PP. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan:
 - 01 Pengolahan Hasil:
 - 01 Standarisasi (analisis standar, penerapan standar).
 - 02 Pengembangan produk (skala mikro, kecil, menengah, pengembangan produk skala besar).
 - 03 Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah, kerja sama usaha mikro, kecil dan menengah).
 - 04 Industri pengolahan (bimbingan teknis industri pengolahan, kerjasama asosiasi dan industri penolahan).
 - 05 Sarana dan prasarana.
 - 02 Pengembangan Produk Non Konsumsi:
 - 01 standarisasi (analisis standar, penerapan standar).
 - 02 promosi dan jaringan pasar ikan hias.
 - 03 pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah, identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk).
 - 04 pengembangan industri (kerja sama industri).
 - 05 sarana dan prasarana.
 - 03 Pemasaran Dalam Negeri:
 - 01 Kelembagaan (kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan, kelembagaan pasar hasil perikanan).
 - 02 Analisis dan informasi pasar dalam negeri.
 - 03 Jaringan distribusi dan kemitraan.

- 04 Promosi dan kerja sama.
 - 01. Promosi.
 - 02. Kerjasama.
- 05 Sarana dan prasarana.
- 04 Pemasaran Luar Negeri:
 - 01 Kelembagaan (analisis kelembagaan, kerjasama kelembagaan).
 - 02 Analisis dan informasi pasar luar negeri dan kebutuhan import).
 - 03 Pengembangan ekspor (peningkatan akses pasar, pengamanan dan perlindungan akses pasar).
 - 04 Pengendalian impor (analisis kebutuhan impor, pemantauan evaluasi impor).
 - 05 Promosi dan kerjasama.
 - 01. Promosi.
 - 02. Kerjasama.
- 05 Usaha dan investasi:
 - 01 Pelayanan usaha (mikro, kecil dan menengah, pelayanan usaha besar).
 - 02 Kemitraan usaha (usaha kecil dan menengah, kemitraan usaha besar).
 - 03 Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran.
 - 04 Investasi dan permodalan.
 - 05 Informasi dan promosi.
- KL. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil:
 - 01 Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil:
 - 01 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi (rencana tata ruang laut nasional, rencana tata ruang laut lintas wilayah dan perairan).
 - 02 Rencana tata ruang dan zona wilayah I Jawa, Sumatera dan leuseur Sunda.
 - 03 Rencana tata ruang dan zona wilayah II (Kalimantan dan Maluku, zonasi wilayah Sulawesi dan Papua).
 - 04 Informasi dan evaluasi spasial.
 - 02 Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan:
 - 01 Jejaring, data, dan informasi konservasi.
 - 02 Konservasi kawasan (perancangan konservasi kawasan, perlindungan dan pelestarian kawasan).
 - 03 Konservasi jenis ikan (perancangan konservasi jenis ikan, perlindungan dan pelestarian jenis ikan).
 - 04 Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jenis ikan).
 - 03 Pesisir dan Lautan:
 - 01 Mitigasi bencana lingkungan (mitigasi rencana pesisir dan lautan, adaptasi dampak perubahan iklim).
 - 02 Pendayagunaan sumber daya kelautan (benda muatan kapal tenggelam, jasa kelautan).
 - 03 Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut (penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir, penanggulangan pencemaran sumber daya laut).
 - 04 Rehabilitasi dan reklamasi.
 - 05 Identifikasi pulau-pulau terkecil.
 - 06 Pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil (rehabilitasi, mitigasi dan adaptasi).

- 07 Investasi dan promosi pulau-pulau terkecil.
- 08 Sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil.
- 05 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha:
 - 01 Akses permodalan (akses perbankan, akses non Bank).
 - 02 Akses ilmu pengetahuan dan teknologi (identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi).
 - 03 Sosial budaya masyarakat (penguatan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat).
 - 04 Pengembangan usaha (pelayanan usaha, usaha mikro).
- SD. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan:
 - 01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan:
 - 01 Pengawasan penangkapan wilayah Barat (pengawasan penangkapan ikan wilayah barat I, pengawasan penangkapan ikan wilayah barat II).
 - 02 Pengawasan penangkapan ikan wilayah Timur (pengawasan penangkapan ikan wilayah timur I dan II).
 - 03 Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran (pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah barat, pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah timur).
 - 04 Pengawasan usaha budidaya wilayah barat dan wilayah timur.
 - 02 Pengawasan Sumber Daya Kelautan:
 - 01 Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi
 - 02 Pengawasan pencemaran perairan (pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai, pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman).
 - 03 Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil.
 - 04 Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati.
 - 03 Kapal Pengawas:
 - 01 Logistik dan operasional wilayah Barat.
 - 02 Logistik operasional wilayah Timur.
 - 03 Perawatan kapal pengawas (wilayah barat dan timur).
 - 04 Pengawasan kapal pengawas (wilayah barat dan timur).
 - 04 Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur:
 - 01 Sistem pemantauan (pengembangan sistem pemantauan, kerja sama pemantauan).
 - 02 Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan (operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber, analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan).
 - 03 Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan (analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya ikan).
 - 04 Pengembangan infrastruktur pengawasan (penyiapan infrastruktur, evaluasi infrastruktur).
 - 05 Penanganan pelanggaran:
 - 01 Penyidikan (wilayah barat dan timur).
 - 02 Penanganan barang bukti dan awak kapal (wilayah barat dan timur).
 - 03 Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan.
 - 04 Pemantauan dan evaluasi.

KI. Karantina Ikan:

- 01 Tindak Karantina Ikan:
 - 01 Pemeriksaan ikan.
 - 02 Penahanan.
 - 03 Pengasingan.
 - 04 Pengamatan.
 - 05 Penolakan.
 - 06 Pemusnahan.
 - 07 Pelepasan/pembebasan.
- 02 Tertib Operasional:
 - 01 Persyaratan lalu lintas pemasukan.
 - 02 Persyaratan lalu lintas pengeluaran.
 - 03 Permohonan sertifikat.
 - 04 Pemasukan formulir.
 - 05 Pemasukan sertifikat.
 - 06 Evaluasi dan monitoring sertifikat.
 - 07 Surat perintah.
 - 08 Rekomendasi.
- 03 Pencegahan Penyakit:
 - 01 Penutupan suatu area.
 - 02 Pelanggaran lalu lintas ikan.
- 04 Pengawasan Karantina Ikan:
 - 01 Pengawasan peraturan perkarantinaaan.
 - 02 Pengawasan pelaksanaan operasional.
- 05 Instalasi:
 - 01 Instalasi karantina sementara.
 - 02 Lokasi karantina.

PR. Urusan Pariwisata:

- 01 Pengembangan Destinasi Pariwisata:
 - 01 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata:
 - 01 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata).
 - 02 Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata).
 - 03 Pengembangan Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.
 - 04 Pengembangan Zona Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK.
 - 05 Pengembangan Potensi dan Promosi Investasi Pariwisata.
 - 02 Pengembangan Daya Tarik Wisata:
 - 01 Bimtek Daya Tarik Wisata 5 Tahun.
 - 02 Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata.
 - 03 Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka.
 - 04 Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan.
 - 05 Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award).
 - 03 Industri Pariwisata:
 - 01 Sarana Pariwisata.
 - usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata.
 - penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.
 - 02 Jasa Pariwisata:
 - jasa transportasi wisata.

- jasa informasi pariwisata.
 - penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
 - jasa perjalanan wisata.
 - jasa konsultan pariwisata.
 - jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan.
 - insentif.
 - konvensi.
 - pameran.
- 03 Pengembangan Produk dan Pelayanan.
- 04 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata:
- 01 Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata.
 - 02 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa.
 - 03 Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat.
- 05 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event:
- 01 Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja.
 - 02 Pengembangan Rekreasi dan Hiburan.
 - 03 Pengembangan Wisata Alam dan Budaya.
 - 04 Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event.
- 02 Pemasaran Pariwisata:
- 01 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata:
- 01 Informasi Pasar Dalam Negeri.
 - 02 Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri.
 - 03 Informasi Pasar Luar Negeri.
 - 04 Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata.
 - 05 Perancangan Pemasaran Pariwisata.
- 02 Promosi Pariwisata Luar Negeri:
- 01 Wilayah ASEAN.
 - 02 Wilayah Asia.
 - 03 Wilayah Timur Tengah dan Afrika.
 - 04 Wilayah Amerika dan Pasifik.
 - 05 Wilayah Eropa.
- 03 Promosi Pariwisata Dalam Negeri.
- 04 Pencitraan Indonesia:
- 01 Strategi Pencitraan Indonesia (Perencanaan Pencitraan Indonesia, Pemantauan dan evaluasi pencitraan Indonesia).
 - 02 Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang:
 - promosi media.
 - sarana dan distribusi media.
 - 03 Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah dan non Lembaga Pemerintah.
- 05 Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus:
- 01 Promosi KIE Korporasi:
 - korporasi dalam negeri.
 - korporasi luar negeri.
 - 02 Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah.
 - 03 Promosi Minat Khusus wisata bahari dan wisata non bahari.
- EK. Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya:
- 01 Pengembangan industri Perfilman:
- 01 Fasilitasi Industri Perfilman.
 - 02 Festival dan Eksibisi Film.

- 03 Produksi.
- 04 Pemasaran Film.
- 02 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik:
 - 01 Pengembangan Seni Pertunjukan.
 - 02 Pengembangan Industri Musik.
 - 03 Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik.
 - 04 Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik.
- 03 Pengembangan Seni Rupa:
 - 01 Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi.
 - kreasi dan produksi karya seni.
 - fasilitasi pengembangan seni.
 - 02 Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi:
 - distribusi dan komersialisasi karya seni rupa.
 - apresiasi karya seni rupa.
- EM. Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek:
 - 01 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media:
 - 01 Pengembangan Film Animasi dan Komik.
 - 02 Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi.
 - 03 Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video.
 - 04 Pengembangan Karya Kreatif Periklanan iklan cetak dan elektronik.
 - 02 Desain dan Arsitektur:
 - 01 Arsitektur dan Desain Interior.
 - 02 Komunikasi Visual.
 - 03 Desain Produk dan Kemasan.
 - 04 Mode.
 - 03 Kerjasama dan Fasilitasi:
 - 01 Lisensi Teknologi, pengembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi.
 - 02 Sentra Inovasi dan Inkubator bisnis.
 - 03 Pengembangan Sentra Kreatif dan pengelolaan sentra kreatif.
 - 04 Akses Pembiayaan bank dan non bank.
- SD. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 - 01 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata:
 - 01 Program dan Evaluasi.
 - 02 Data dan Publikasi.
 - 02 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif:
 - 01 Program dan Evaluasi.
 - 02 Data dan Publikasi.
 - 03 Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 - 01 Program dan Evaluasi.
 - 02 Penyelenggaraan dan Kerjasama.
 - 04 Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 - 01 Program dan Evaluasi.
 - 02 Evaluasi dan Kerjasama.
- PB. Penanggulangan Bencana:
 - 01 Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
 - 01 Pengurangan Resiko Bencana:
 - 01 Pencegahan Pengkajian Resiko.

- 02 Pencegahan Pengelolaan Resiko.
- 03 Mitigasi Struktur.
- 04 Mitigasi Non Struktur.
- 02 Pemberdayaan Masyarakat:
 - 01 Peran Lembaga Usaha Padat Modal.
 - 02 Peran Lembaga Usaha Padat Karya.
 - 03 Peran Organisasi Internasional.
 - 04 Peran Organisasi Sosial Masyarakat Nasional.
 - 05 Peran Peningkatan Kesadaran Masyarakat.
 - 06 Peran Peningkatan Ketahanan Masyarakat.
- 03 Kesiapsiagaan:
 - 01 Peringatan Pemaduan Sistem Jaringan.
 - 02 Pemantauan dan Peringatan.
 - 03 Perencanaan Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya.
 - 04 Perencanaan Penerapan Rencana Strategis.
 - 05 Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya.
 - 06 Penyiapan Pengendalian Sumber Daya.
- 02 Penanganan Darurat
 - 01 Tanggap Darurat:
 - 01 Perencanaan Pendataan Darurat.
 - 02 Perencanaan Operasi.
 - 03 Pengendalian Pengorganisasian Pos Komando.
 - 04 Pengendalian Sarana dan Prasarana.
 - 05 Penyelamatan.
 - 06 Evakuasi.
 - 02 Bantuan Darurat:
 - 01 Bantuan Sandang.
 - 02 Bantuan Pangan.
 - 03 Bantuan Kesehatan.
 - 04 Bantuan Air Bersih.
 - 05 Bantuan Pembangunan Hunian Sementara.
 - 06 Bantuan Pendukung Hunian Sementara.
 - 03 Perbaikan Darurat:
 - 01 Penyiapan Peralatan.
 - 02 Angkutan.
 - 03 Perbaikan Prasarana Sosial.
 - 04 Perbaikan Prasarana Ekonomi.
 - 05 Pemantauan.
 - 06 Pelaporan.
- 03 Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
 - 01 Penilaian Kerusakan:
 - 01 Inventarisasi Kerusakan Fisik.
 - 02 Inventarisasi Kerusakan Sosial Ekonomi.
 - 03 Estimasi Pembiayaan Pembangunan.
 - 04 Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi.
 - 02 Pemulihan dan Peningkatan Fisik:
 - 01 Rehabilitasi Fasilitas Umum.
 - 02 Rekonstruksi Fasilitas Umum.
 - 03 Rehabilitasi Fasilitas Sosial.
 - 04 Rekonstruksi Fasilitas Sosial.
 - 05 Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan Berat.
 - 06 Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan Ringan.

- 03 Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi:
 - 01 Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya.
 - 02 Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan.
 - 03 Pemulihan Ekonomi.
 - 04 Peningkatan Ekonomi.
- 04 Penanganan Pengungsi:
 - 01 Perlindungan Pengungsi.
 - 02 Pemberdayaan Pengungsi.
 - 03 Kompensasi Pengungsi.
 - 04 Pengembalian Hak Pengungsi.
 - 05 Pemulangan dan Repatriasi Pengungsi.
 - 06 Relokasi/Pengalihan Pengungsi.
- 04 Logistik dan Peralatan:
 - 01 Logistik:
 - 01 Inventarisasi Analisis Kebutuhan.
 - 02 Inventarisasi Pengadaan.
 - 03 Penyimpanan.
 - 04 Distribusi.
 - 02 Peralatan:
 - 01 Inventarisasi Analisis Kebutuhan.
 - 02 Inventarisasi Pengadaan.
 - 03 Penyimpanan.
 - 04 Pemeliharaan.
 - 05 Pengerahan.
 - 06 Distribusi.
- KI. Komunikasi dan Informatika:
 - 01 Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika:
 - 01 Penataan Sumber Daya:
 - 01 Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap.
 - 02 Penataan Alokasi Spektrum Dinas Bergerak Darat.
 - 03 Alokasi Dinas Bergerak Darat.
 - 04 Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Penyiaran.
 - 05 Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit.
 - 06 Pengelolaan Orbit Satelit Notifikasi dan Penataan Filing Satelit.
 - 07 Pengelolaan Orbit Satelit Tata Kelola Hubungan Antarpenyelenggara.
 - 08 Ekonomi Sumber Daya Analisa Industri dan Ekonomi.
 - 09 Ekonomi Sumber Daya Penanganan Izin Pita.
 - 10 Harmonisasi Teknik Spektrum Teknik Spektrum Antar lembaga.
 - 11 Harmonisasi Teknik Spektrum Harmonisasi dan Notifikasi.
 - 02 Operasi Sumber Daya:
 - 01 Pelayanan Alokasi Spektrum Dinas Tetap.
 - 02 Pelayanan Alokasi Spektrum Dinas Bergerak Darat.
 - 03 Pelayanan Alokasi Spektrum Non Dinas Penyiaran.
 - 04 Pelayanan Alokasi Spektrum Non Dinas Penerbangan, Maritim, dan Satelit.
 - 05 Sertifikasi Operator Radio Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpending.
 - 06 Sertifikasi Operator Radio Pelayanan Operator Radio.

- 07 Penanganan Biaya Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio.
 - 08 Penanganan Biaya Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio.
 - 09 Konsultasi dan Informasi Data Operasi Sumber Daya.
 - 10 Konsultasi Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya.
- 03 Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika:
- 01 Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum.
 - 02 Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum.
 - 03 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum.
 - 04 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum.
 - 05 Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial.
 - 06 Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial.
 - 07 Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika.
 - 08 Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika.
 - 09 Monitoring Frekuensi Radio.
- 04 Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika:
- 01 Teknik Pos dan Telekomunikasi.
 - 02 Teknik Komunikasi Radio.
 - 03 Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi.
 - 04 Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar.
 - 05 Standar dan Audit Perangkat Lunak.
 - 06 Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
- 02 Penyelenggaraan Pos dan Informatika:
- 01 POS:
- 01 Layanan Pos Universal.
 - 02 Penerapan Layanan Pos Universal.
 - 03 Layanan Pos Komersial Tata Kelola Layanan.
 - 04 Layanan Pos Komersial Data dan Informasi Layanan.
 - 05 Prangko.
 - 06 Filateli.
 - 07 Iklim Usaha Pos Universal.
 - 08 Iklim Usaha Pos Komersial.
 - 09 Pentarifan Pos Layanan Pos Universal.
 - 10 Pentarifan Pos Komersial.
- 02 Telekomunikasi:
- 01 Layanan Jaringan Telekomunikasi Akses.
 - 02 Layanan Jaringan Telekomunikasi Backbone.
 - 03 Layanan Jasa Telekomunikasi Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi.
 - 05 Penomoran Telekomunikasi.
 - 06 Penomoran Informatika.
 - 07 Tarif Telekomunikasi.
 - 08 Interkoneksi Telekomunikasi.
 - 09 Kelayakan Sistem Telekomunikasi Jaringan dan Jasa.
 - 10 Kelayakan Penerapan Sistem Teknologi Telekomunikasi.

- 03 Penyiaran:
 - 01 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi.
 - 02 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi.
 - 03 Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio.
 - 04 Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi.
 - 05 Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio.
 - 06 Lembaga Penyiaran Swasta Radio.
 - 07 Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Televisi.
 - 08 Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi.
 - 09 Lembaga Penyiaran Swasta Televisi.
 - 10 Iklim Usaha Penyiaran Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran.
 - 11 Iklim Usaha Penyiaran Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran.
- 04 Telekomunikasi Khusus Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal:
 - 01 Analisa Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Pemerintah.
 - 02 Pelayanan Telekomunikasi Khusus Pemerintah.
 - 03 Analisa Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah.
 - 04 Pelayanan Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah.
 - 05 Layanan Khusus Penyiaran Publik Radio.
 - 06 Layanan Khusus Penyiaran Publik Televisi.
 - 07 Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kewajiban Universal.
 - 08 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kewajiban Universal.
 - 09 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur.
 - 10 Analisa Ekonomis Pengembangan Infrastruktur.
- 05 Pengendalian Pos dan Informatika:
 - 01 Monitoring Pos.
 - 02 Evaluasi Pos.
 - 03 Analisa Ekonomis Infrastruktur.
 - 04 Monitoring Jasa Telekomunikasi.
 - 05 Evaluasi Jasa telekomunikasi.
 - 06 Monitoring Penyiaran.
 - 07 Evaluasi Penyiaran.
 - 08 Pencegahan.
 - 09 Penertiban.
- 03 Aplikasi Informatika:
 - 01 E-Government:
 - 01 Tata Kelola Program e-Government.
 - 02 Tata Kelola Evaluasi e-Government.
 - 03 Teknologi e-Government.
 - 04 Infrastruktur e-Government.
 - 05 Interoperabilitas e-Government.
 - 06 Interkonektivitas e-Government.
 - 07 Aplikasi Layanan Kepemerintahan Pusat.
 - 08 Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah.
 - 09 Inisiasi Aplikasi Layanan Publik.
 - 10 Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik.

- 02 E- Business:
 - 01 Tata Kelola Program e-Business.
 - 02 Tata Kelola Evaluasi e-Business.
 - 03 Teknologi e-Business.
 - 04 Interoperabilitas e-Business.
 - 05 Interkonektivitas e-Business.
 - 06 Aplikasi Layanan E-Business Bidang Usaha Kecil dan Mikro.
 - 07 Aplikasi Layanan E-Business Bidang Usaha Menengah dan Besar.
- 03 Pemberdayaan Informatika:
 - 01 Perancangan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan.
 - 02 Penerapan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan.
 - 03 Pengembangan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan.
 - 04 Penerapan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan.
 - 05 Pengembangan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar.
 - 06 Penerapan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar.
 - 07 Pengembangan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus.
 - 08 Penerapan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus.
- 04 Pemberdayaan Industri Informatika:
 - 01 Pemberdayaan Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika.
 - 02 Promosi Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika.
 - 03 Pemberdayaan Industri Perangkat Informatika Pengguna.
 - 04 Pengembangan Produk Industri Perangkat Informatika Pengguna.
 - 05 Pemberdayaan Industri Perangkat Lunak.
 - 06 Pengembangan Produk Industri Perangkat Lunak.
 - 07 Pemberdayaan Industri Konten Multimedia.
 - 08 Pengembangan Produk Industri Konten Multimedia.
- 05 Keamanan Informasi:
 - 01 Tata Kelola Keamanan Informasi Kelembagaan.
 - 02 Tata Kelola Keamanan Informasi Manajemen Risiko.
 - 03 Teknologi Keamanan Informasi Infrastruktur.
 - 04 Teknologi Keamanan Informasi Aplikasi.
 - 05 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi Infrastruktur.
 - 06 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi Aplikasi.
 - 07 Penyidikan dan Penindakan Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi.
 - 08 Penyidikan dan Penindakan Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi.
 - 09 Penyidikan Budaya Keamanan Informasi.
 - 10 Penindakan Budaya Keamanan Informasi.
- 04 Informasi dan Komunikasi Publik:
 - 01 Komunikasi Publik:

- 01 Tata Kelola Program Komunikasi Publik.
- 02 Tata Kelola Monitoring dan Evaluasi.
- 03 Pengelolaan Pengumpulan Opini Publik.
- 04 Pengelolaan Pengolahan Opini Publik.
- 05 Pengumpulan Data Layanan Komunikasi Publik.
- 06 Pengolahan Data Layanan Komunikasi Publik.
- 02 Pengolahan dan Penyediaan Informasi:
 - 01 Informasi Politik dan Keamanan.
 - 02 Informasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 03 Informasi Perekonomian Keuangan, Perbankan, dan Jasa.
 - 04 Informasi Perekonomian Industri dan Perdagangan.
 - 05 Informasi Kesejahteraan Agama, Sosial, dan Budaya.
 - 06 Informasi Kesejahteraan Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan.
- 03 Pengelolaan Media Publik:
 - 01 Media Cetak.
 - 02 Media Online.
 - 03 Media Audio Visual dan Luar Ruang.
- 04 Kemitraan Komunikasi:
 - 01 Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara.
 - 02 Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara.
 - 03 Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha.
 - 04 Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Media dan Dunia Usaha.
 - 05 Program Kemitraan Organisasi Masyarakat dan Profesi.
 - 06 Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Organisasi Masyarakat dan Profesi.
- 05 Layanan Informasi Internasional:
 - 01 Program Layanan Informasi Media Asing.
 - 02 Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Media Asing.
 - 03 Program Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional.
 - 04 Monitoring dan Evaluasi Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional.
 - 05 Program Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri.
 - 06 Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri.
- 05 Pusat Data dan Sarana Informatika:
 - 01 Infrastruktur Informatika:
 - 01 Jaringan Infrastruktur Informatika.
 - 02 Piranti Teknologi Infrastruktur Informatika.
 - 03 Keamanan Infrastruktur Informatika.
 - 02 Sistem dan Data:
 - 01 Sistem Portal dan Konten.
 - 02 Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data.
 - 03 Sistem Pengembangan Aplikasi.
 - 03 Pusat Kerjasama Internasional:
 - 01 Kerjasama Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral.
 - 02 Kerjasama Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral.

- 03 Kerjasama Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Multilateral.
- 04 Kerjasama Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional.
- 05 Kerjasama Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional.
- 06 Kerjasama Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Regional.
- 07 Kerjasama Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bilateral.
- 07 Kerjasama Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Bilateral.
- 04 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat:
 - 01 Pelayanan Informasi Media Baru.
 - 02 Pelayanan Informasi Media Konvensional.
 - 03 Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - 04 Publikasi Hubungan Masyarakat.
 - 05 Analisis Berita Hubungan masyarakat dan Pengelolaan Opini Publik.
 - 06 Hubungan Masyarakat Internal dan Eksternal.
 - 07 Bimbingan Teknis Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos.
 - 08 Bimbingan Teknis Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas.
 - 09 Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas.

PH. Perhubungan:

01 Kebijakan:

- 01 Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian:
 - 01 Pengkajian dan pengusulan kegiatan.
 - 02 Penyiapan kebijakan.
 - 03 Perumusan dan penyusunan bahan.
 - 04 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan.
 - 05 Penetapan dalam bentuk NSPK.

02 Perhubungan Darat:

01 Jaringan Transfortasi Jalan:

- 01 Jaringan Prasarana dan Pelayanan (penentuan dan penetapan lokasi terminal barang, terminal penumpang, terminal barang utama).
- 02 Jaringan Prasarana dan Pelayanan (Jaringan trayek angkutan antar kota/propinsi, jaringan jalan primer, jaringan transportasi jalan skunder, kualifikasi teknis petugas terminal).
- 03 Penetapan kelas jalan primer.
- 04 Pengembangan Transportasi Jalan (sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan).
- 05 Pengebangan transportasi jalan.

02 Sarana Angkutan Barang:

- 01 Pengujian kendaraan bermotor (pengesahan dan setifikasi uji tipe kendaraan bermotor).
 - 02 Pengujian kendaraan bermotor (akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor)
 - 03 Teknologi kendaraan bermotor (sertifikasi, persyaratan teknis laik jalan, dan harmonisasi dan standar regulasi).
 - 04 Teknologi kendaraan bermotor (pelaksana kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor).
- 03 Lalu lintas jalan:
- 01 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan.
 - 02 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional baik jalan tol/nan-tol).
 - 03 Pedoma teknis perlengkapan jalan, akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor).
 - 04 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor.
 - 05 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan,.
 - 06 Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan di jalan nasional.
- 04 Angkutan jalan:
- 01 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi.
 - 02 Izin trayek angkutan lintas batas negara, antar kota antar propinsi.
 - 03 Izin operasi angkuta pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek linta batas negara dan antar kota antar propinsi.
 - 04 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum dan pemberian subsidi angkuta umum.
 - 05 Angkutan perintis.
 - 06 Penghargaan perusahaan angkutan umum, pembinaan angkutan barang.
 - 07 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan raya, tarif angkutan barang.
 - 08 Izin operasi angkutan barang tertentu.
- 05 Pengendalian operasi:
- 01 Monitoring operational.
 - 02 Pedoman Tenis Bimbingan teknis PPNS.
 - 03 Penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh PPNS.
 - 04 Bimtek PPNS, dan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian PPNS.
- 06 Jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan:
- 01 Analisa dan Evaluasi Jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan.
 - 02 Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan (peta jaringan, blueprint jaringan).
 - 03 Pengembangan SIM transportasi sungai, danau dan penyebrangan.
- 07 Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan:
- 01 Rancang bangun sarana transportasi sungai, danau dan penyebrangan.
 - 02 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyebrangan.
 - 03 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyebrangan.

- 08 Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan:
 - 01 Perencanaan dan pembagunan pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan.
 - 02 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyebrangan, rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyebrangan di lintas nasional dan internasional.
 - 03 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan.
 - 04 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan.
- 09 Lalu lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan:
 - 01 Manajemen lalu lintas.
 - 02 PPNS bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau.
 - 03 Sertifikasi inspektur sungai, danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau.
 - 04 Pengukuran alur pelayaran sungai, danau, dan kolam pelabuhan penyebrangan.
 - 05 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau.
 - 06 Perambuan sungai, danau dan penyebrangan.
- 10 Angkutan sungai, danau dan penyebrangan:
 - 01 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyebrangan, persetujuan operasi kapal penyebrangan lintas nasional dan internasional.
 - 02 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan.
 - 03 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan.
- 11 Jaringan transportasi perkotaan:
 - 01 Jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan.
 - 02 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi.
 - 03 Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan.
- 12 Lalu Lintas Perkotaan:
 - 01 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan.
 - 02 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.
 - 03 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah.
- 13 Angkutan Perkotaan:
 - 01 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek.
 - 02 Jaringan trayek perkotaan.
 - 03 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
- 14 Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan:
 - 01 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang/barang.
 - 02 Pemandu moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah.
 - 03 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

- 15 Dampak Transporasi Perkotaan:
 - 01 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan.
 - 02 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan.
 - 03 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan.
 - 04 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota.
 - 05 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.
 - 06 Masteplan transportasi perkotaan.
- 16 Manajemen Keselamatan:
 - 01 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan.
 - 02 Kualifikasi unit pengkajian.
 - 03 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan.
 - 04 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan.
 - 05 Harmonisasi kebijakan.
- 17 Promosi dan kemitraan keselamatan:
 - 01 Promosi keselamatan.
 - 02 Penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyebrangan.
 - 03 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan.
- 18 Bina keselamatan angkutan umum:
 - 01 Keselamatan pengusaha angkutan umum.
 - 02 Keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.
- 19 Audit dan inspeksi keselamatan:
 - 01 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia.
 - 02 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyebrangan.
 - 03 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan serta laik fungsi jalan.
 - 04 Pedoman keselamatan.
 - 05 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan sungai, danau dan penyebrangan.
 - 06 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyebrangan serta laik fungsi jalan.
- 03 Perhubungan Laut:
 - 01 Angkutan laut dalam negeri:
 - 01 Jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.
 - 02 Penempatan kapal dan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing.
 - 03 Trayek tidak terjadwal tetap dan tidak teratur (trampel) angkutan laut dalam negeri.
 - 04 Usaha pelayaran rakyat.
 - 02 Angkutan Laut Luar Negeri:

- 01 Pelayaran nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut dari Indonesia ke Negara-Negara Amerika, Eropa, Afrika dan sebaliknya.
 - 02 Kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan laut.
 - 03 Persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing.
 - 04 Pelayaran nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut dari Indonesia ke negara-negara di Asia Pasifik, Australia dan sebaliknya.
 - 05 Kerjasama bilateral, sub-regional, regional dan multilateral di bidang angkutan laut.
 - 06 Persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing.
- 03 Angkutan laut khusus dan penunjang angkutan laut:
- 01 Operasional angkutan laut khusus pertambangan dan lepas pantai pariwisata dan tenaga kerja bongkar muat
 - 02 Persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia.
 - 03 Operasional angkutan laut khusus aneka industri, kehutanan, perikanan.
 - 04 Persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia serta penunjang angkutan laut.
- 04 Pengembangan Usaha Angkutan Laut:
- 01 Pengembangan armada.
 - 02 Analisis ekonomis kebutuhan armada.
 - 03 Usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut.
 - 04 Perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar Provinsi/Internasional.
 - 05 Izin operasi angkutan laut khusus serta izin usaha angkutan multimoda.
- 05 Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut:
- 01 Pengolahan Data dan Informasi rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu.
 - 02 Pengolahan Data dan Informasi angkutan bahan pokok.
 - 03 Evaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu.
 - 04 Evaluasi angkutan bahan pokok untuk kelancaran angkutan laut.
- 06 Pengembangan Pelabuhan:
- 01 Tata letak kepelabuhanan nasional.
 - 02 Pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhanan.
 - 03 Persetujuan penetapan lokasi pelabuhan.
 - 04 Penyusunan laporan Direktorat.
 - 05 Rencana induk dan pengembangan pelabuhan.
- 07 Perancangan Fasilitas Pelabuhan:
- 01 Perancangan teknis fasilitas dan peralatan pelabuhan.
 - 02 Survei topografi dan hidro-oceanografi dan geoteknik.
 - 03 Persetujuan desain, pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan.
 - 04 Pembangunan dan perawatan fasilitas dan peralatan pelabuhan.
 - 05 Sertifikasi fasilitas dan peralatan pelabuhan.
- 08 Pengerukan dan Reklamasi:

- 01 Perancangan dan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi.
- 02 Perizinan.
- 03 Penggunaan kapal dan alat bantu keruk.
- 04 Pekerjaan pengerukan dan reklamasi.
- 09 Pemanduan dan Penundaan Kapal:
 - 01 Penetapan wilayah perairan pandu.
 - 02 Standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.
 - 03 Kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu.
 - 04 Standardisasi sarana bantu pemanduan.
- 10 Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan:
 - 01 Tarif jasa kepelabuhan.
 - 02 Kinerja pelayaran pelabuhan dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri.
 - 03 Penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingn.
 - 04 Penggunaan atas tanah dan perairan.
 - 05 Kerjasama pelabuhan.
 - 06 Persetujuan pengoperasian pelabuhan.
- 11 Kelaikan kapal:
 - 01 Konstruksi dan Stabilitas Kapal.
 - 02 Rancang bangun dan pemasukan kapal.
- 12 Pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal:
 - 01 Pengukuran kapal.
 - 02 Pendaftaran dan kebangsaan kapal.
- 13 Nautis, Teknis dan Radio kapal:
 - 01 Penilikan Keselamatan Kapal.
 - 02 Sertifikasi Keselamatan Kapal.
- 14 Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal:
 - 01 Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran.
 - 02 Manajemen Keselamatan Kapal.
- 15 Kepelautan:
 - 01 Pengawakan dan Perlindungan Awak Kapal
 - 02 Standardisasi dan Sertifikasi Pelaut
- 16 Perambuan:
 - 01 Pemberian ijin spesifikasi teknis sarana bantu navigasi pelayaran.
 - 02 Pengamatan laut dan survei alur pelayaran.
 - 03 Penandaan daerah terbatas dan terlarang.
 - 04 Daerah ship to ship.
 - 05 Maklumat pelayaran bahaya navigasi.
 - 06 Design sistem rute dan tata cara berlalu lintas.
 - 07 Peralatan.
 - 08 Perencanaan pembangunan.
 - 09 Replacement.
 - 10 Perbaikan dan pemeliharaan.
 - 11 Gambar design konstruksi.
 - 12 Kelainan dan keandalan sarana bantu navigasi pelayaran dan koreksi peta laut.
- 17 Telekomunikai Pelayaran:
 - 01 Penyusunan kinerja stasiun radio pantai.

- 02 Stasiun radio kapal dan sarana bantu navigasi pelayaran elektronika.
 - 03 Pemberian rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran.
 - 04 Ijin identifikasi untuk dinas bergerak pelayaran.
 - 05 Ijin kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran.
 - 06 Perencanaan bangunan gedung.
 - 07 Sistem jaringan.
 - 08 Peralatan dan suku cadang.
 - 09 Pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi pelayaran.
 - 07 Penilaian teknis.
- 18 Kapal Negara Kenavigasian:
- 01 Pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal.
 - 02 Formasi dan penempatan kapal negara kenavigasian.
 - 03 Rancang bangun dan pembangunan kapal.
 - 03 Pemeliharaan dan penilaian teknis penghapusan kapal.
 - 04 Perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian.
- 19 Pangkalan Kenavigasian:
- 01 Pemeliharaan bangunan gedung:
 - 02 Lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan.
 - 03 Penilaian teknis fasilitas pangkalan.
 - 04 Rencana kebutuhan peralatan suku cadang bengkel.
 - 05 Pemeliharaan, perbaikan dan penilaian teknis.
 - 06 Peralatan galangan dan bengkel.
- 20 Sarana dan Prasarana:
- 01 Penyusunan rencana dan program kerja.
 - 02 Penyusunan rencana anggaran sarana dan prasarana kenavigasian.
 - 03 Pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja.
 - 04 Pelaporan pelaksanaan anggaran dan pembangunan sarana dan prasarana kenavigasian.
- 21 Patroli dan Pengamanan:
- 01 Patroli.
 - 02 Penanganan perompakan dan pembajakan.
 - 03 Sistem pelaporan kapal (Ships Reporting System).
 - 04 Analisa kerawanan wilayah.
 - 05 Penegakkan peraturan perundang-undangan di laut, pantai dan pelabuhan.
 - 06 Penetapan kualifikasi teknis petugas patroli.
 - 07 Pengamanan sarana dan prasarana transportasi (ISPS Code) di laut, pantai, dan pelabuhan.
 - 08 Perijinan penggunaan, pendistribusian amunisi dan senjata api.
 - 09 Penetapan kualifikasi teknis petugas pengamanan.
- 22 Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil:
- 01 Advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan pelayaran.
 - 02 Penetapan kualifikasi teknis petugas advokasi dan diseminasi.
 - 03 Penyelidikan, penyidikan, dan serta pengajuan berkas perkara pelanggaran dan tindak pidana pelayaran.
 - 04 Penetapan kualifikasi teknis petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 23 Tertib Pelayaran:
- 01 Pengawasan penanganan muatan berbahaya.

- 02 Tertib lalulintas kapal dan tertib Bandar.
 - 03 Izin berlayar.
 - 04 Pengawasan kapal asing.
 - 05 Penetapan kualifikasi teknis petugas kesyahbandaran.
 - 06 Port State Control Officer.
 - 07 Pengawasan penanganan muatan berbahaya.
 - 08 Pengusutan kecelakaan dan bencana kapal.
 - 09 Pengajuan pemeriksaan lanjutan perkara pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization.
 - 10 Penetapan kualifikasi teknis petugas penanganan pemrosesan kecelakaan kapal.
- 24 Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air:
- 01 Search and rescue.
 - 02 Penanggulangan pencemaran.
 - 03 Tuntutan ganti kerugian pencemaran dan pemadaman kebakaran penetapan kualifikasi teknis petugas Search And Rescue, pemadam kebakaran.
 - 04 Pendirian perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan.
 - 05 Kegiatan penyelaman.
 - 06 Penanganan kerangka kapal dan salvage.
 - 07 Penetapan kualifikasi teknis petugas penyelam.
- 25 Sarana dan Prasarana:
- 01 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.
 - 02 Pemeliharaan senjata api.
 - 03 Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang awak kapal Penjagaan Laut dan Pantai.
 - 04 Penyiapan rencana, program kerja dan laporan Direktorat.
- 04 Perhubungan Udara:
- 01 Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara:
 - 01 Sistem, rute, jaringan penerbangan.
 - 02 Kapasitas angkutan udara.
 - 03 Angkutan multimoda.
 - 04 Logistik dan National Single Window (NSW).
 - 05 Pelayanan penunjang angkutan udara.
 - 06 On time performance perusahaan angkutan udara.
 - 07 Pelayanan pengangkutan kargo.
 - 08 Angkutan multimoda dan logistic.
 - 09 Ranking peningkatan kinerja pelayanan angkutan udara.
 - 02 Angkutan Udara Niaga Berjadwal:
 - 01 Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
 - 02 Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri.
 - 03 Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga.
 - 01 Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Dalam Negeri.
 - 02 Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Luar Negeri.
 - 04 Kerjasama Angkutan Udara:
 - 01 Pemberian persetujuan kerjasama bilateral di bidang angkutan udara dan - kerjasama perusahaan angkutan udara.
 - 02 Pengawasan dan penegakan hukum.
 - 03 Perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara.

- 04 Koordinasi dan pertemuan dengan instansi terkait untuk fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional.
- 05 Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara:
 - 01 Bimbingan Usaha Angkutan Udara .
 - 02 Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara.
- 06 Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan:
 - 01 Pemberian ijin dan/atau persetujuan dan/atau rekomendasi di bidang tata bandar udara.
 - 02 Pengawasan dan penegakan hukum.
 - 03 Pemberian ijin dan/atau persetujuan dan/atau rekomendasi di bidang tata lingkungan dan kawasan bandar udara.
 - 04 Pengawasan dan penegakan hukum.
- 07 Prasarana Bandar Udara:
 - 01 Pengawasan dan penegakan hokum.
 - 02 Program dan standarisasi prasarana bandar udara.
 - 03 Pemberian ijin dan/atau sertifikasi di bidang verifikasi prasarana bandar udara.
 - 04 Pengawasan dan penegakan hukum.
- 08 Peralatan dan Utilitas Bandar Udara:
 - 01 Program dan standarisasi peralatan dan utilitas Bandar udara.
 - 02 Pemberian sertifikasi dan/atau perijinan di bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara.
 - 03 Pengawasan dan penegakan hukum.
- 09 Personel dan Operasi Bandar Udara:
 - 01 Pemberian lisensi/validasi dan/atau sertifikasi/register di bidang sertifikasi personel dan operasi bandar udara.
 - 02 Pengawasan Personel dan Operasi Bandar Udara.
- 10 Penyelenggaraan Bandar Udara:
 - 01 Pemberian ijin di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara.
 - 02 Pengawasan, pengendalian dan penegakan.
 - 03 Verifikasi penyelenggaraan bandar udara.
 - 04 Pengawasan, pengendalian dan penegakan.
- 11 Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan:
 - 01 Pemberian persetujuan di bidang standarisasi keamanan penerbangan.
 - 02 Penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat.
 - 03 Pemberian ijin dan/atau persetujuan di bidang keamanan penerbangan.
 - 04 Program keamanan bandar udara (airport contingency plan).
- 12 Pelayanan Darurat:
 - 01 Pemberian sertifikasi di bidang personel PKP-PK dan salvage.
 - 02 Pemberian lisensi dan persetujuan di bidang personel PKP-PK dan salvage.
 - 03 Pemberian sertifikasi di bidang fasilitas pelayanan darurat.
- 13 Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan:
 - 01 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - 02 Personel Keamanan Penerbangan.
- 14 Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Pengangkutan Barang Berbahaya:

- 01 Pemberian sertifikasi di bidang fasilitas keamanan penerbangan.
- 02 Pengendalian di bidang fasilitas keamanan penerbangan.
- 03 Pemberian lisensi di bidang personel fasilitas keamanan penerbangan dan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- 15 Standarisasi:
 - 01 Regulated agent.
 - 02 Ijin Penyelenggaraan Diklat KP dan DG.
 - 03 Kerjasama Luar Negeri.
 - 04 Pas Bandara.
 - 05 ICAO, JICA, CASP, Air Marshall.
 - 06 Undangan.
- 16 Kendali Mutu Keamanan Penerbangan:
 - 01 Kendali mutu keamanan bandar udara, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat.
 - 02 Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.
 - 03 Kendali mutu keamanan angkutan udara, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat.
 - 04 Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.
- 17 Manajemen Lalu Lintas Penerbangan:
 - 01 Manajemen Ruang Udara.
 - 02 Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.
- 18 Manajemen Informasi Aeronautika:
 - 01 Kartografi Penerbangan.
 - 02 Publikasi Informasi Aeronautika.
- 19 Komunikasi Penerbangan:
 - 01 Operasi Komunikasi Penerbangan.
 - 02 Jaringan dan Peralatan Komunikasi Penerbangan.
- 20 Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan:
 - 01 Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan.
 - 02 Fasilitas Pengamatan Penerbangan.
- 21 Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan:
 - 01 Standarisasi Navigasi Penerbangan.
 - 02 Sertifikasi Navigasi Penerbangan.
- 22 Standarisasi:
 - 01 Pemberian sertifikasi di bidang standarisasi teknik.
 - 02 Program pencegahan insiden dan kecelakaan.
 - 03 Pengawasan dan penegakan hukum.
 - 04 Pemberian sertifikasi di bidang standarisasi operasi penerbangan.
 - 05 Pengawasan dan penegakan hukum.
- 23 Rekayasa:
 - 01 Pengawasan Proses Rekayasa.
 - 02 Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara.
- 24 Produk Aeronautika:
 - 01 Pengawasan Mutu dan Proses Produksi.
 - 02 Pengesahan Produksi.
- 25 Operasi Pesawat Udara:
 - 01 Pengawasan Operasi Pesawat Udara.
 - 02 Personel Operasi Pesawat Udara.

- 26 Perawatan:
 - 01 Perawatan Pesawat Udara.
 - 02 Personel Teknik Perawatan.
- 05 Perkeretaapian:
 - 01 Jaringan:
 - 01 Penataan Jaringan.
 - 02 Pengembangan Jaringan.
 - 02 Lalu Lintas:
 - 01 Lalu Lintas Antarkota.
 - 02 Lalu Lintas Perkotaan.
 - 03 Angkutan:
 - 01 Angkutan Antarkota.
 - 02 Angkutan Perkotaan.
 - 04 Investasi:
 - 01 Penyelenggaraan Kerjasama.
 - 02 Pengembangan Usaha.
 - 05 Jalur dan Bangunan Kereta Api:
 - 01 Pembangunan, perawatan dan pengusaha jalan rel dan tanah kereta api perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusaha jalan rel dan tanah kereta api.
 - 02 Penetapan rancang bangun.
 - 03 Penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel.
 - 04 Pengesahan kualitas material baru jalan rel.
 - 05 Akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi.
 - 06 Pembangunan, perawatan dan pengusaha jalan rel dan tanah kereta api perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusaha jalan rel.
 - 07 Tanah kereta api.
 - 08 Penetapan rancang bangun.
 - 09 Penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel.
 - 10 Pengesahan kualitas material baru jalan rel.
 - 11 Akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi.
 - 06 Fasilitas Operasi Kereta Api:
 - 01 Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha persinyalan.
 - 02 Pelistrikan perhitungan dan perawatan, pengoperasian dan pengusaha telekomunikasi.
 - 03 Penetapan rancang bangun.
 - 04 Penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang telekomunikasi dan pelistrikan.
 - 05 Pengesahan kualitas material baru telekomunikasi dan pelistrikan.
 - 06 Akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi telekomunikasi dan pelistrikan.
 - 07 Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api:
 - 01 Pengujian pertama jalur dan bangunan serta stasiun kereta api.
 - 02 Pengesahan hasil uji.
 - 03 Pengesahan kualitas material untuk jalur dan bangunan serta stasiun kereta api yang digunakan dalam pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.

- 04 Penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.
 - 05 Pengusahaan fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.
 - 06 Penyiapan kebutuhan atau pemberdayaan kembali suku cadang fasilitas pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.
- 08 Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api:
- 01 Pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian fasilitas operasi kereta api.
 - 02 Pengesahan hasil uji.
 - 03 Pengesahan kualitas material untuk fasilitas operasi kereta api.
 - 04 Penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api fasilitas operasi kereta api.
 - 05 Pengusahaan fasilitas peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api.
 - 06 Penyiapan kebutuhan atau pemberdayaan kembali suku cadang fasilitas pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.
- 09 Pengembangan Sarana:
- 01 Rancang Bangun dan Rekayasa.
 - 02 Pengendalian Mutu.
- 10 Pengawasan Sarana:
- 01 Pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana.
 - 02 Pelaksanaan pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana.
 - 03 Database dan pengembangan sistem informasi.
 - 04 Penyusunan standar peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa, depo, dan tempat pengujian.
 - 05 Database dan sistem informasi bidang fasilitas sarana perkeretaapian.
- 11 Pengelolaan Sarana Milik Negara:
- 01 Pengoperasian sarana milik Negara.
 - 02 Pengadaan dan rehabilitasi sarana milik Negara.
 - 03 Database dan pengembangan sistem informasi sarana milik Negara.
 - 04 Pemeliharaan sarana milik Negara.
 - 05 Database dan pengembangan sistim informasi sarana milik Negara.
- 12 Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I:
- 01 Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penggerak.
 - 02 Pengujian dan Sertifikasi Sarana Tanpa Penggerak.
- 13 Audit dan Peningkatan Keselamatan:
- 01 Audit Keselamatan.
 - 02 Peningkatan Keselamatan.
- 14 Analisis dan Penanganan Kecelakaan:
- 01 Analisis Kecelakaan.
 - 02 Penanganan Kecelakaan.
- 15 Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM.
- 01 Akreditasi Kelembagaan.
 - 02 Sertifikasi Sumber Daya Manusia.

- 16 Penegakan Hukum:
 - 01 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- PT. Pembangunan Daerah Tertinggal:
 - 01 Pengembangan Sumber Daya:
 - 01 Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya:
 - 01 Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya Pendidikan dan Ketrampilan.
 - 02 Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.
 - 03 Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya Hayati.
 - 04 Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup.
 - 05 Teknologi dan Inovasi.
 - 02 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya.
 - 03 Pemantauan dan evaluasi.
 - 02 Peningkatan Infrastruktur:
 - 01 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur.
 - 01 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Transportasi.
 - 02 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Informasi dan Telekomunikasi.
 - 03 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Sosial.
 - 04 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Ekonomi.
 - 05 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Energi.
 - 02 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur.
 - 03 Pemantauan dan evaluasi.
 - 03 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha:
 - 01 Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha:
 - 01 Investasi Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha.
 - 02 Pembinaan Kelembagaan Ekonomi dan Dunia Usaha.
 - 03 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - 04 Kemitraan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha.
 - 05 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Pengembangan Komoditas Unggulan.
 - 02 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha.
 - 03 Pemantauan dan evaluasi.
 - 04 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya:
 - 01 Fasilitasi Pembinaan:
 - 01 Fasilitasi Pembinaan Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal.
 - 02 Fasilitasi Pembinaan Penguatan Organisasi Masyarakat.
 - 03 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 04 Fasilitasi Pembinaan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya.
 - 05 Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan.
 - 02 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya.
 - 03 Pemantauan dan evaluasi.
 - 05 Pengembangan Daerah Khusus:
 - 01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus:
 - 01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus Perbatasan.
 - 02 Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus Daerah Rawan Konflik dan Bencana.

- 03 Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus Perdesaan.
- 04 Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus Daerah Pulau Terpencil dan Terluar.
- 05 Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus Wilayah Strategis.
- 02 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus.
- 03 Pemantauan dan evaluasi.

TK. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

01 Perencanaan Tenaga Kerja:

- 01 Perencanaan Tenaga Kerja Makro:
 - 01 Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional
 - 02 Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional.
 - 03 Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional.
 - 04 Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
 - 05 Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
 - 06 Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
- 02 Perencanaan Tenaga Kerja Mikro:
 - 01 Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah.
 - 02 Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah.
 - 03 Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah.
 - 04 Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta.
 - 05 Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta.
 - 06 Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta.
- 03 Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas:
 - 01 Penerapan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Pogram Pelatihan.
 - 02 Bimbingan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan ketenagakerjaan.
 - 03 Program Pengembangan Standarisasi Kompetensi Pelatihan Ketenagakerjaan.
 - 04 Penyusunan Materi Pelatihan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Ketenagakerjaan.
 - 05 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan.
 - 06 Pengembangan Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan.
 - 07 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian.
 - 08 Pengembangan Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian.
- 04 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja:
 - 01 Akreditasi Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja.
 - 02 Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan.
 - 03 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan.
 - 04 Pengembangan Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas.

- 05 Pengembangan Standar Mutu Lembaga Pelatihan.
- 06 Pengembangan Bimbingan Penerapan Standar Mutu.
- 07 Sistem Pendanaan Pelatihan.
- 08 Kerjasama Antar Lembaga.
- 05 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan:
 - 01 Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan.
 - 02 Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah.
 - 03 Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta.
 - 04 Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta.
 - 05 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan.
 - 06 Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan.
 - 07 Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan.
 - 08 Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan.
- 06 Pelatihan 4 Bina Pemagangan:
 - 01 Bina Program Pemagangan Dalam Negeri.
 - 02 Bina Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri.
 - 03 Bina Program Pemagangan Luar Negeri.
 - 04 Bina Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri.
 - 05 Perizinan dan Rekomendasi.
 - 06 Advokasi dan Perlindungan.
 - 07 Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan.
 - 08 Pemagangan Jejaring Pemagangan.
- 07 Produktivitas dan Kewirausahaan:
 - 01 Pengembangan Promosi Produktivitas dan Kewirausahaan.
 - 02 Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan.
 - 03 Pengembangan Sistem dan Metode Produktivitas.
 - 04 Pengembangan Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas.
 - 05 Pengembangan Pengukuran Produktivitas.
 - 06 Kajian Produktivitas.
 - 07 Pengembangan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan.
 - 08 Pengembangan Bimbingan Konsultasi.
- 02 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja:
 - 01 Pengembangan Pasar Kerja:
 - 01 Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri.
 - 02 Informasi Pasar Kerja Luar Negeri.
 - 03 Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri.
 - 04 Analisis Pasar Kerja Luar Negeri.
 - 05 Bursa Kerja Dalam Negeri.
 - 06 Bursa Kerja Luar Negeri.
 - 07 Analisis dan Informasi Jabatan.
 - 08 Pengembangan Sistem Analisis Jabatan.
 - 02 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri:
 - 01 Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lokal (AKL).
 - 02 Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja.
 - 03 Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita.
 - 04 Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia.
 - 05 Penyuluhan Jabatan.
 - 06 Bimbingan Jabatan.

- 07 Pengembangan pemberdayaan Kompetensi Pengantar Kerja.
- 08 Kerjasama antar Lembaga.
- 03 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri:
 - 01 Perizinan Kelembagaan.
 - 02 Evaluasi Kinerja.
 - 03 Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI.
 - 04 Fasilitasi Penyediaan TKI.
 - 05 Perlindungan Advokasi dan Kepulangan TKI.
 - 06 Sarana dan Perlindungan.
 - 07 Kerjasama Bilateral.
 - 08 Kerjasama Regional dan Multilateral.
- 04 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal:
 - 01 Tenaga Kerja Mandiri.
 - 02 Tenaga Kerja Sektor Informal.
 - 03 Pengembangan Padat Karya Perdesaan.
 - 04 Pengembangan Padat Karya Perkotaan.
 - 05 Pengembangan Terapan Teknologi Tepat Guna.
 - 06 Penyebarluasan Terapan Teknologi Tepat Guna.
 - 04 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga.
 - 07 Pemberdayaan Pendampingan.
 - 08 Kerjasama Antar Lembaga.
- 05 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing:
 - 01 Analisis Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri.
 - 02 Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri.
 - 03 Analisis Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa.
 - 04 Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa.
 - 05 Pengendalian.
 - 06 Kerjasama Kelembagaan.
- 06 Standardisasi Profesi:
 - 01 Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi.
 - 02 Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja.
 - 03 Pembakuan Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi.
 - 04 Pembakuan Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan.
- 03 Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja:
 - 01 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi:
 - 01 Peraturan Perusahaan.
 - 02 Perjanjian Kerja Bersama.
 - 03 Perjanjian Kerja.
 - 04 Program Kesejahteraan.
 - 05 Fasilitas Kesejahteraan.
 - 06 Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja.
 - 07 Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja.
 - 02 Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial:
 - 01 Organisasi Pekerja.
 - 02 Organisasi Pengusaha.
 - 03 Lembaga Kerjasama BIPARTIT.

- 04 Lembaga Kerjasama TRIPARTIT.
- 03 Pemasyarakatan Hubungan Industrial.
- 05 Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial.
- 06 Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial:
- 03 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:
 - 01 Penerapan Standar Pengupahan.
 - 02 Pengurusan Pengupahan.
 - 03 Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja.
 - 04 Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja.
- 04 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial:
 - 01 Pencegahan Dini Perselisihan Hubungan Industrial.
 - 02 Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan.
- 02 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:
 - 01 Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial.
 - 02 Evaluasi dan Pelaporan.
- 03 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:
 - 01 Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan.
 - 02 Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan.
- 04 Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan:
 - 01 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja:
 - 01 Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat.
 - 02 Pengawasan Norma Pengupahan.
 - 03 Pengawasan Norma Hubungan Kerja.
 - 04 Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat.
 - 05 Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri.
 - 06 Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek.
 - 02 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak:
 - 01 Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi.
 - 02 Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan.
 - 03 Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
 - 04 Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak.
 - 05 Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan.
 - 06 Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak.
 - 07 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan.
 - 08 Advokasi Tenaga Kerja Anak.
 - 03 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja:
 - 01 Pengawasan Norma Mekanik.
 - 02 Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan.
 - 03 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan.
 - 04 Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran.
 - 05 Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja.
 - 06 Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 07 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja.
 - 08 Pengawasan Norma Bahan Berbahaya.

- 09 Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3.
- 10 Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3.
- 04 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan.
- 05 Bina Penegakan Hukum:
 - 01 Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan.
 - 02 Penindakan Norma Ketenagakerjaan.
 - 03 Teknis Penyidikan Norma Ketenagakerjaan.
 - 04 Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan.
 - 05 Pengembangan Pemberdayaan PPNS.
 - 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana PPNS.
 - 07 Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum.
 - 08 Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan.
- 05 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja:
 - 01 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3):
 - 01 Analisis dan Standardisasi bidang K3.
 - 02 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3.
 - 03 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3.
 - 02 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3:
 - 01 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3.
 - 02 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3.
 - 03 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3.
 - 04 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3.
 - 05 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3.
- KO. Urusan Kepemudaan dan Olahraga:
 - 01 Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi dan Kemitraan meliputi:
 - 01 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda:
 - 01 Pengkajian dan pengusulan kebijakan.
 - 02 Penyiapan kebijakan.
 - 03 Perumusan dan penyusunan bahan.
 - 04 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan.
 - 05 Penetapan dalam bentuk NSPK.
 - 02 Pemberdayaan Pemuda:
 - 01 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda:
 - 01 Penelusuran (Duta Kepemudaan), potensi lokal (Provinsi), Nasional, Internasional.
 - 02 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan), Potensi lokal (Provinsi), Nasional dan Internasional.
 - 03 Pengembangan Potensi Nasional dan Internasional.
 - 02 Peningkatan Wawasan Pemuda:
 - 01 Program Wawasan Kebangsaan.
 - 02 Evaluasi Wawasan Kebangsaan.
 - 03 Program Wawasan Lingkungan.

- 04 Evaluasi Wawasan Lingkungan.
- 05 Program Wawasan Sosial dan Hukum.
- 06 Evaluasi Wawasan Sosial dan Hukum.
- 03 Peningkatan Kapasitas Pemuda:
 - 01 Program Kapasitas Iman dan Taqwa.
 - 02 Evaluasi Kapasitas Iman dan Taqwa.
 - 03 Program Kapasitas IPTEK.
 - 04 Evaluasi Kapasitas IPTEK.
 - 05 Program Pemanfaatan IPTEK.
 - 06 Evaluasi Pemanfaatan IPTEK.
- 04 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan):
 - 01 Program Pengkajian.
 - 02 Evaluasi Pengkajian.
 - 03 Program Pengembangan.
 - 04 Evaluasi Pengembangan.
 - 05 Program Pendayagunaan.
 - 06 Evaluasi Pendayagunaan.
- 03 Pengembangan Pemuda:
 - 01 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda:
 - 01 Program Kepemimpinan (Penelusuran, Pengaderan dan Pendampingan).
 - 02 Evaluasi Kepemimpinan (Penelusuran, Pengaderan dan Pendampingan).
 - 03 Program Kepeloporan Pemuda (Kesukarelawan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan).
 - 04 Evaluasi Kepeloporan Pemuda (Kesukarelawan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan)
 - 02 Kewirausahaan:
 - 01 Program Kelembagaan.
 - 02 Evaluasi Kelembagaan.
 - 03 Program Pengaderan.
 - 04 Evaluasi Pengaderan.
 - 05 Program Perintisan.
 - 06 Evaluasi Perintisan.
 - 03 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan:
 - 01 Program Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.
 - 02 Evaluasi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.
 - 03 Program Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan.
 - 04 Evaluasi Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan.
 - 05 Program Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran.
 - 06 Evaluasi Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran.
 - 07 Pengkajian dan Pengembangan Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya.
 - 04 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda:
 - 01 Standardisasi dan infrastruktur: Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
 - 05 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda:
 - 01 Kemitraan Lintas Sektoral , Daerah dan Luar Negeri.
 - 02 Pengembangan Penghargaan dan Promosi Kepemudaan.

- 04 Pembudayaan Olahraga:
 - 01 Pengelolaan Olahraga Pendidikan:
 - 01 Pengembangan Olahraga Pendidikan Dasar dan menengah.
 - 02 Evaluasi Olahraga Pendidikan Dasar dan menengah.
 - 03 Pengembangan Olahraga Pendidikan Tinggi.
 - 04 Evaluasi Olahraga Pendidikan Tinggi.
 - 05 Pengembangan Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal.
 - 06 Evaluasi Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal.
 - 02 Pengelolaan Olahraga Rekreasi:
 - 01 Pengembangan Olahraga Massal.
 - 02 Evaluasi Olahraga Massal.
 - 03 Pengembangan Olahraga Tradisional.
 - 04 Evaluasi Olahraga Tradisional.
 - 05 Pengembangan Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata.
 - 06 Evaluasi Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata.
 - 03 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga:
 - 01 Pengembangan Olahraga Pendidikan.
 - 02 Evaluasi Olahraga Pendidikan.
 - 03 Pengembangan Olahraga Rekreasi.
 - 04 Evaluasi Olahraga Rekreasi.
 - 05 Pengembangan Olahraga Prestasi.
 - 06 Evaluasi Olahraga Prestasi.
 - 07 Pengembangan Sekolah Khusus Olahraga Provinsi.
 - 08 Evaluasi Sekolah Khusus Olahraga Provinsi.
 - 09 Pengembangan Sekolah Khusus Olahraga Nasional.
 - 10 Evaluasi Sekolah Khusus Olahraga Nasional.
 - 04 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Olahraga Tradisional:
 - 01 Lokal.
 - 02 Nasional.
 - 03 Layanan Khusus Olahraga Usia Dini, Lansia dan Penyandang cacat.
 - 05 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga:
 - 01 Kemitraan Keolahragaan Lintas Sektoral.
 - 02 Kemitraan Keolahragaan Daerah.
 - 03 Kemitraan Keolahragaan Luar Negeri.
 - 04 Penelusuran dan Penyelenggaraan Penghargaan Olahraga.
- 05 Peningkatan Prestasi Olahraga:
 - 01 Pembibitan dan IPTEK Olahraga:
 - 01 Penelusuran dan Penelaahan Bakat.
 - 02 Program dan Evaluasi Pengembangan Olahragawan berbakat.
 - 03 Kompetisi nasional dan Internasional.
 - 04 Penerapan Identifikasi dan kajian, Pendayagunaan serta evaluasi dan Desiminasi.
 - 05 Pengembangan IPTEK olahraga.
 - 02 Peningkatan Tenaga dan Organisasi keolahragaan:
 - 01 Pengembangan Pelatih dan Instruktur Nasional dan Internasional.

- 02 Pengembangan Wasit dan Juri Nasional dan Internasional.
 - 03 Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung.
 - 04 Pendidikan dan Rekreasi.
 - 05 Kelembagaan dan Sumberdaya Olah Raga Prestasi.
 - 06 Olahraga Fungsional dan Profesional.
- 03 Industri dan Promosi Olahraga:
 - 01 Jasa, Produk dan Manajemen Industri Olahraga.
 - 02 Penelusuran dan Penyelenggaraan Promosi Olahraga.
 - 04 Olahraga Prestasi:
 - 01 Pengembangan, Pekan dan kejuaraan Olahraga Prestasi Daerah.
 - 02 Pengembangan, Pekan dan kejuaraan Olahraga Prestasi Nasional.
 - 03 Pengembangan, Pekan dan kejuaraan Olahraga Prestasi Internasional.
 - 05 Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga:
 - 01 Standarisasi Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi.
 - 02 Akreditasi dan Sertifikasi Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi.
 - 03 Infrastruktur Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Prestasi.
- KK. Kependudukan dan Keluarga Berencana:
- 01 Pengendalian Penduduk:
 - 01 Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk:
 - 01 Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk (Pengumpulan dan Pengolahan Data).
 - 02 Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk (Evaluasi dan Pelaporan).
 - 03 Penyiapan fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.
 - 04 Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk (Evaluasi dan Pelaporan).
 - 02 Perencanaan pengendalian penduduk:
 - 01 Data dan Evaluasi data Profil dan Proyeksi Penduduk.
 - 02 Penetapan parameter pengendalian penduduk (Penetapan sasaran parameter dan Evaluasi sasaran parameter).
 - 03 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk (Pemanfaatan profil dan proyeksi, Pemanfaatan Parameter).
 - 03 Kerjasama pendidikan kependudukan:
 - 01 Pengembangan sistem jalur pendidikan formal dan pengembangan jalur pendidikan non formal dan informal.
 - 02 Pengembangan Materi alur pendidikan formal dan pengembangan jalur pendidikan non formal dan informal.
 - 03 Monitoring dan evaluasi alur pendidikan formal dan pengembangan jalur pendidikan non formal dan informal.
 - 04 Analisis dampak kependudukan:
 - 01 Analisis Sosial.
 - 02 Analisis Ekonomi.
 - 03 Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan.
 - 04 Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- 02 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi:
 - 01 Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah:
 - 01 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah.
 - 02 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana.
 - 03 Kualitas, Standarisasi, Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah.
 - 02 Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta:
 - 01 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta.
 - 02 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta.
 - 03 Kualitas, Standarisasi, monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta.
 - 03 Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus:
 - 01 Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal , terpencil dan perbatasan.
 - 02 Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan.
 - 03 Peningkatan akses dan Partisipasi Kesertaan keluarga berencana pria.
 - 04 Kesehatan Reproduksi:
 - 01 Kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
 - 02 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS.
 - 03 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas.
- 03 Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga:
 - 01 Bina keluarga Balita dan Anak:
 - 01 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak (Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak , Pengembangan Kemitraan Bina Kelurga dan anak).
 - 02 Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak.
 - 02 Bina ketahanan remaja:
 - 01 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur Pendidikan dan Jalur masyarakat.
 - 02 Monitoring dan Pelaporan dan evaluasi bina ketahanan Remaja.
 - 03 Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan:
 - 01 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan keluarga Rentan.
 - 02 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan (Pengembangan kelompok dan kemitraan Bina Ketahanan Keluarga lansia dan Rentan).
 - 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan.
 - 04 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga:
 - 01 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga.
 - 02 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga.
 - 03 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga (Pengembangan Administrasi, Keuangan dan pemasaran Kelompok Usaha Bersama).
 - 04 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga.

- 05 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera:
 - 01 Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.
 - 02 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera).
 - 03 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.
- 04 Advokasi dan Informasi:
 - 01 Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi:
 - 01 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan).
 - 02 Advokasi dan pencitraan.
 - 03 Promosi.
 - 04 Sarana Produksi Media komunikasi.
 - 05 Produk media komunikasi.
 - 02 Bina hubungan antar lembaga:
 - 01 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi.
 - 02 Pengembangan dan Penguatan hubungan dengan lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
 - 03 Pengembangan dan Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah.
 - 03 Bina lini lapangan:
 - 01 Pengembangan tenaga lini lapangan.
 - 02 Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan.
 - 03 Pengembangan Institusi masyarakat pedesaan.
 - 04 Monitoring dan evaluasi Institusi masyarakat pedesaan.
 - 05 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan mekanisme operasional lini lapangan.
 - 06 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan.
 - 04 Pelaporan dan statistik:
 - 01 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan (Perumusan pola, Sistem pencatatan dan pelaporan).
 - 02 Monitoring dan Evaluasi Sistem pencatatan dan pelaporan.
 - 03 Pengumpulan dan pengolahan data.
 - 04 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk.
 - 05 Analisa dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga.
 - 05 Teknologi Informasi dan Dokumentasi:
 - 01 Pengembangan sistem aplikasi.
 - 02 Pengelolaan Bank data.
 - 03 Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi.
 - 04 Pemeliharaan Infrastruktur teknologi informasi.
 - 05 Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - 06 Pengelolaan situs BKKBN dan Media konferensi.
- PA. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 01 Pengarusutamaan Gender (PUG):
 - 01 Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan PUG.
 - 02 Data Gender.
 - 03 Sosialisasi Kebijakan PUG.
 - 04 Advokasi Pelaksanaan PUG.
 - 05 Fasilitasi dan Koordinasi PUG.
 - 06 Monitoring , Evaluasi dan Analisa Kebijakan PUG.

- 02 Perlindungan Hak Perempuan:
 - 01 Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan.
 - 02 Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan.
 - 03 Data Perlindungan Perempuan.
 - 03 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.
 - 04 Penanganan Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.
 - 04 Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan.
 - 05 Advokasi Perlindungan Perempuan:
 - 01 Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.
 - 02 Advokasi Penanganan Masalah Sosial Perempuan.
 - 03 Advokasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan.
 - 06 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan:
 - 01 Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.
 - 07 Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender.
 - 08 Analisis dan penyajian informasi gender.
- 03 Perlindungan Anak:
 - 01 Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA):
 - 01 Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak.
 - 02 Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Tumbuh Kembang Anak.
 - 03 Data Perlindungan Anak.
 - 04 Data Tumbuh Kembang Anak.
 - 02 Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA).
 - 01 Sosialisasi Kebijakan PA.
 - 02 Sosialisasi Kebijakan TKA.
 - 03 Advokasi Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang:
 - 01 Advokasi PA.
 - 02 Advokasi TKA.
 - 04 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA):
 - 01 Fasilitasi dan koordinasi Bidang Perlindungan Anak.
 - 02 Fasilitasi dan koordinasi Bidang Tumbuh Kembang Anak.
 - 05 Monitoring dan Evaluasi Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA):
 - 01 Monev Bidang Perlindungan Anak.
 - 02 Monev Bidang Tumbuh Kembang Anak.
 - 06 Pemetaan Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA):
 - 01 Pemetaan Perlindungan Anak.
 - 02 Pemetaan Perlindungan Tumbuh Kembang Anak.
- 04 Partisipasi Masyarakat:
 - 01 Penyusunan Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat.
 - 02 Sosialisasi Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat.
 - 03 Advokasi Bidang Partisipasi Masyarakat.
 - 04 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Partisipasi Masyarakat.
 - 05 Monitoring dan Evaluasi Bidang Partisipasi Masyarakat.
- 05 Kajian Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- 01 Telaah dan Kajian:
 - 01 Bidang Pembangunan Keluarga.
 - 02 Bidang Hubungan Antar Lembaga.
 - 03 Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
 - 04 Bidang Komunikasi Pembangunan.
- 02 Forum Analisis Kebijakan dan Pemantauan.

PK. Pendidikan:

- 01 Kebijakan Bersifat Pengaturan:
 - 01 Kebijakan Tentang Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 01 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan.
 - 02 Penyiapan Bahan.
 - 03 Perumusan Kebijakan.
 - 04 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan.
 - 05 Penetapan dalam bentuk NSPK.
 - 06 Perumusan dan penerapan standar.
 - 02 MoU (*Memorandum of Understanding*).
- 02 Kebijakan Bersifat Penetapan:
 - 01 Kebijakan bersifat penetapan.
 - 01 Pengkajian dan Pengusulan Penetapan.
 - 02 Penyiapan bahan.
 - 03 Perumusan penetapan.
 - 04 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan.
 - 05 Penetapan dalam bentuk keputusan.
- 03 Pembinaan Pendidikan:
 - 01 Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal.
 - 01 Paud (Bahan ajar, Pelatihan).
 - 02 Paud (Sosialisasi, Peringatan Hari Anak Nasional).
 - 03 Paud (Block Grandt).
 - 04 Pendidikan masyarakat (Penyelenggaraan program, pemberian bantuan sosial, pembinaan program, pameran/ publikasi/ sosialisasi).
 - 05 Pendidikan masyarakat (lomba, penghargaan, anugerah dan peringatan hari anak internasional).
 - 06 Kursus dan pelatihan (Penyelenggaraan program, pemberian bantuan sosial, pembinaan program, dan standard kursus).
 - 07 Lomba lembaga kursus berprestasi, publikasi dan promosi kursus).
 - 08 Sertifikasi kursus.
 - 09 Pendidik dan tenaga pendidikan (bahan ajar dan sosialisasi).
 - 10 Pendidikan dan tenaga pendidikan (Block Grant, data pendidik dan tenaga pendidik).
 - 02 Pendidikan dasar:
 - 01 Sekolah dasar (Kurikulum, Bahan ajar, Pelatihan).
 - 02 Sekolah dasar (Block Grant).
 - 03 Sekolah dasar (Bintek, sosialisasi, lomba, sayembara, festival).
 - 04 Sekolah dasar (BOS dan bantuan siswa miskin).
 - 05 Sekolah menengah pertama (Kurikulum, bahan ajar, pelatihan).
 - 06 Sekolah menengah pertama (Block Grant).

- 07 Sekolah menengah pertama (Bintek, sosialisasi, lomba, sayembara, festival).
 - 08 Sekolah menengah pertama (BOS dan bantuan siswa miskin).
 - 09 Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK (Bahan ajar dan petunjuk teknis).
 - 10 Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK (Block Grant).
 - 11 Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK (Sosialisasi, lomba, sayembara, festival, gebyar, jambore, kurikulum, alat bantu pembelajaran, pendataan).
 - 12 Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK (Kelembagaan : unit kesehatan sekolah, pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi, block grant, bintek, lomba-lomba).
 - 13 Pendidik dan tenaga pendidik (pendataan, pemetaan, pembinaan guru dan tenaga pendidik).
 - 14 Pendidik dan tenaga pendidik (peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik : standar, uji, dan sertifikasi kompetensi).
 - 15 Pendidik dan tenaga pendidik (Penilaian prestasi kerja, angka kredit, pengawas sekolah, Bintek/Sosialisasi).
 - 16 Pendidik dan tenaga pendidik (Penghargaan guru dan tenaga pendidikan).
 - 17 Pendidik dan tenaga pendidik (Block Grant).
- 03 Pendidikan menengah:
- 01 Sekolah menengah atas (kurikulum, bahan ajar, pelatihan bintek/sosialisasi, lomba sayembara dan festival).
 - 02 Sekolah menengah atas (Block Grant, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan siswa miskin).
 - 03 Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK (bahan ajar, Juknis, Sosialisasi, Lomba, jambore, festival, kurikulum/bahan pembelajaran, alat bantu pembelajaran).
Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK (Block Grant, Pendataan).
 - 04 Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK (Kelembagaan : UKS, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi, block grant, bintek/sosialisasi, lomba, sayembara, festival, gebyar dan jambore).
 - 05 Pendidik dan tenaga pendidik (Pendataan, pemetaan, pembinaan guru dan tenaga pendidik, penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan, Bintek/Sosialisasi).
 - 06 Pendidik dan tenaga pendidik (Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik : standar, uji dan sertifikasi kompetensi).
 - 07 Pendidik dan tenaga pendidik (Block Grant, penghargaan guru dan tenaga kependidikan).
- 04 Pendidikan tinggi:
- 01 Kelembagaan dan kerja sama (Program dan evaluasi, pengembangan kelembagaan).
 - 02 Kelembagaan dan kerjasama (Pemberdayaan kelembagaan).
 - 03 Kelembagaan dan kerja sama (Kerja sama antar lembaga)
 - 04 Pendidikan dan pengajaran (Penerimaan mahasiswa baru, Perkuliahan, program studi, UTS, UAS, administrasi kelulusan).
 - 05 Pendidikan dan kerja sama (Registrasi mahasiswa, kurikulum, tugas akhir : skripsi, tesis, disertasi, komprehensif, KKL, dan PPL).
 - 06 Pendidikan dan pengajaran (Penetapan kelulusan, ijazah dan transkrip, buku induk nomor registrasi kelulusan).

- 07 Dosen (Daftar hadir, ekuivalensi Wajib mengajar Penuh, laporan evaluasi, evaluasi mahasiswa thd dosen, pembimbingan dan pengujian mahasiswa, evaluasi program studi).
- 08 Penunjukan pendidikan (administrasi dan penentu pemakaian : laboratorium, perpustakaan, studio, bengkel, dll).
- 09 Data dan organisasi alumni.
- 05 Kemahasiswaan:
 - 01 Status: cuti, putus kuliah/pindah, drop out , laporan status mahasiswa/keterangan masih kuliah, dan meninggal dunia.
 - 02 Pembinaan/pelatihan mahasiswa.
 - 03 Kesejahteraan dan fasilitas.
 - 04 Organisasi mahasiswa.
 - 05 Himpunan orang tua mahasiswa.
 - 06 Kegiatan mahasiswa.
 - 07 Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal/ nasional/ internasional.
 - 08 Prestasi mahasiswa dalam pengembangan sains, teknologi, seni budaya, dan olahraga 5 Tahun.
 - 09 Berkas perorangan mahasiswa.
- 06 Pendidik dan tenaga kependidikan:
 - 01 Perencanaan pengadaan.
 - 02 Karir.
 - 03 Kualifikasi.
- 07 Penelitian:
 - 01 Penawaran penelitian.
 - 02 Perencanaan penelitian .
 - 03 Laporan dan evaluasi hasil penelitian.
 - 04 Penyebaran hasil penelitian (sosialisasi dan diseminasi).
 - 05 Penemuan teknologi terbaru.
 - 06 Forum komunikasi penelitian dan pengembangan.
 - 07 Data statistik penelitian.
 - 08 Seminar, lokakarya, temukarya, dan workshop hasil penelitian.
- 08 Pengabdian masyarakat:
 - 01 Penawaran pengabdian..
 - 02 Perencanaan pengabdian.
 - 03 Laporan dan evaluasi hasil pengabdian.
 - 04 Penyebaran hasil pengabdian (sosialisasi dan diseminasi).
 - 05 Forum pengabdian masyarakat.
 - 06 Data statistik pengabdian.
 - 07 Penyuluhan dan konsultasi.
 - 08 Bantuan sosial.
 - 09 KKN.
- 09 Tata pamong perguruan tinggi:
 - 01 Majelis wali amanah.
 - 02 Senat akademik.
 - 03 Dewan guru besar.
 - 04 Perencanaan, program kerja, penilaian, pembinaan penilaian, dan pengembangan komisi guru besar/detasering.
- 04 Kebudayaan:
 - 01 Pelestarian cagar budaya dan permuseuman:
 - 01 Registrasi nasional.
 - 02 Pelindungan.

- 03 Pengembangan dan pemanfaatan.
- 04 Eksplorasi dan dokumentasi.
- 02 Pembinaan kesenian dan perfilman:
 - 01 Pembinaan seni pertunjukan.
 - 02 Pembinaan seni rupa.
 - 03 Pembinaan literasi dan apresiasi film.
 - 04 Dokumentasi seni dan film.
 - 05 Publikasi seni dan film.
- 03 Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi:
 - 01 Kelembagaan dan kepercayaan.
 - 02 Komunitas kepercayaan.
 - 03 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional.
 - 04 Lingkungan budaya dan pranata sosial.
- 04 Sejarah dan nilai budaya:
 - 01 Sejarah.
 - 02 Pemetaan nilai.
 - 03 Verifikasi dan perumusan nilai.
 - 04 Dokumentasi sejarah dan nilai budaya.
 - 05 Publikasi sejarah dan nilai budaya.
- 05 Internalisasi nilai dan diplomasi budaya:
 - 01 Internalisasi nilai budaya (pengemasan nilai budaya).
 - 02 Internalisasi nilai budaya (penanaman nilai budaya).
 - 03 Kekayaan budaya.
 - 04 Warisan budaya nasional dan dunia.
 - 05 Diplomasi budaya.
- 05 Kurikulum:
 - 01 Pembinaan kurikulum.
 - 02 Hasil evaluasi penyusunan kurikulum.
- 06 Perbukuan:
 - 01 Penyusunan standar mutu buku.
 - 02 Pengumpulan naskah 2 Tahun Musnah.
 - 03 Penilaian mutu buku dan pemilihan 2 Tahun Musnah.
 - 04 Persetujuan dan pengesahan naskah 2 Tahun Permanen.
 - 05 Penerbitan/pencetakan 2 Tahun Musnah.
 - 06 Master buku/naskah yang dicetak 2 Tahun Permanen.
 - 07 Distribusi buku 2 Tahun Musnah.
 - 08 Pengembangan naskah 2 Tahun Musnah.
 - 09 Pengkajian buku.
- 07 Penilaian Pendidikan:
 - 01 Penilaian akademik.
 - 02 Penilaian non akademik.
 - 03 Analisis dan sistem informasi penilaian.
- 08 Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa:
 - 01 Pengembangan dan perlindungan:
 - 01 Pengkajian.
 - 02 Pembakuan dan perlindungan.
 - 03 Informasi dan publikasi.
 - 02 Pembinaan dan pemasyarakatan:
 - 01 Pemasyarakatan.

- 03 Pembelajaran:
 - 01 Proses pembelajaran.
 - 02 Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan.
- 04 Peningkatan dan pengendalian:
 - 01 Peningkatan fungsi dan peran.
 - 02 Pengendalian penggunaan bahasa.
- 09 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan:
 - 01 Pengembangan profesi pendidik:
 - 01 Peningkatan kompetensi.
 - 02 Sertifikasi.
 - 02 Pengembangan tenaga kependidikan:
 - 01 Program.
 - 02 Evaluasi.
 - 03 Pengembangan Sumber Daya Manusia kebudayaan:
 - 01 Program.
 - 02 Evaluasi.
 - 04 Penjaminan mutu pendidikan:
 - 01 Pemetaan mutu.
 - 02 Sistem informasi.
 - 05 Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman.
 - 06 Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi.
 - 07 Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi.
 - 08 Penyaluran block grant pascabencana.
 - 09 Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional.
- 10 Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan:
 - 01 Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film:
 - 01 Perancangan dan produksi.
 - 02 Penyiaran dan pengendalian.
 - 02 Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web:
 - 01 Perancangan dan produksi.
 - 02 Aplikasi dan pengendalian.
 - 03 Pengembangan jejaring:
 - 01 Pengkajian dan perancangan.
 - 02 Pemeliharaan dan pengendalian.
- 11 Data dan Statistik Pendidikan:
 - 01 Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan:
 - 01 Validasi dan integrasi data peserta didik;
 - 02 Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 02 Validasi dan integrasi data proses pembelajaran;
 - 03 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik:
 - 01 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak.
 - 02 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah.
 - 03 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan tinggi.

- 12 Arkeologi:
 - 01 Program dan kerja sama penelitian:
 - 01 Program.
 - 02 Kerja sama.
 - 02 Data dan informasi penelitian:
 - 01 Data.
 - 02 Informasi.
- 13 Monitoring dan Evaluasi.
- PS. Urusan Perpustakaan:
 - 01 Deposit Bahan Pustaka:
 - 01 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
 - 02 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman.
 - 03 Terbitan Badan Internasional dan Regional.
 - 04 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
 - 05 Bibliografi dan Katalog:
 - 01 Bibliografi Nasional Indonesia (BNI).
 - 02 Katalog Induk Nasional (KIN).
 - 03 Katalog Dalam Terbitan (KDT).
 - 06 Pendaftaran *International Standard Book Number* (ISBN).
 - 07 Pendaftaran *International Standard Music Number* (ISMN).
 - 02 Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka:
 - 01 Akuisisi:
 - 01 Pembelian.
 - 02 Hibah.
 - 03 Hadiah.
 - 04 Tukar Menukar.
 - 05 Implementasi Undang-Undang KCKR.
 - 06 Terbitan Internal.
 - 07 Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus.
 - 08 Inventarisasi Bahan Pustaka (Buku Induk).
 - 02 Pengolahan Bahan Pustaka.
 - 03 Pangkalan Data Katalog Koleksi.
 - 04 Kajian Pengembangan Bahan Perpustakaan.
 - 05 Pedoman Pengolahan Bahan Perpustakaan.
 - 03 Jasa Perpustakaan dan Informasi:
 - 01 Keanggotaan.
 - 02 Sirkulasi.
 - 03 Referensi.
 - 04 Alih Aksara, Alih Bahasa, dan Kajian Naskah Nusantara.
 - 05 Kerja Sama Perpustakaan:
 - 01 MoU.
 - 02 Perjanjian Kerja Sama.
 - 03 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional.
 - 06 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan:
 - 01 Pengembangan *Situs Web*.
 - 02 Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia.
 - 03 Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan.
 - 04 Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital.
 - 05 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan.
 - 04 Preservasi Bahan Pustaka:
 - 01 Konservasi:

- 01 Perawatan Bahan Pustaka.
- 02 Perbaikan Bahan Pustaka.
- 03 Penjilidan Bahan Pustaka.
- 02 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto).
- 04 Kurasi Digital.
- 05 Sumber Daya Perpustakaan:
 - 01 Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca:
 - 01 Perpustakaan Umum.
 - 02 Perpustakaan Khusus.
 - 03 Perpustakaan Sekolah.
 - 04 Perpustakaan Perguruan Tinggi.
 - 02 Pembakuan Perpustakaan:
 - 01 Standar Nasional Perpustakaan Umum.
 - 02 Standar Nasional Perpustakaan Khusus.
 - 03 Standar Nasional Perpustakaan Sekolah.
 - 04 Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
 - 05 Pedoman Perpustakaan Umum.
 - 06 Pedoman Perpustakaan Khusus.
 - 07 Pedoman Perpustakaan Sekolah.
 - 08 Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi.
 - 03 Akreditasi Perpustakaan:
 - 01 Permintaan akreditasi.
 - 02 Pemberian akreditasi.
 - 03 Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi.
 - 04 Pangkalan Data Perpustakaan:
 - 01 Nomor Pokok Perpustakaan.
 - 02 Perpustakaan Berbasis Wilayah.
 - 05 Pengkajian Perpustakaan.
 - 06 Pemasyarakatan Minat Baca:
 - 01 Pedoman Pembudayaan Minat Baca.
 - 02 Kajian Pembudayaan Minat Baca.
 - 03 Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - 07 Organisasi Perpustakaan:
 - 01 Forum Perpustakaan Umum.
 - 02 Forum Perpustakaan Khusus.
 - 03 Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi.
 - 04 Forum Perpustakaan Sekolah.
 - 05 Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca.
 - 06 Organisasi Perpustakaan Lainnya.
- 06 Pendidikan dan Pelatihan:
 - 01 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan :
 - 01 Perencanaan Program Diklat.
 - 02 Sistem dan Metode.
 - 03 Kurikulum/Silabus/Bahan Ajar/Modul
 - 04 Konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan .
 - 05 Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan.
 - 02 Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan:
 - 01 Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil.
 - 02 Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli.
 - 03 Teknis Pimpinan Lembaga Perpustakaan.
 - 04 Teknis Pustakawan/Pengelola Perpustakaan.

- 05 Teknis Pustakawan/Pengelola Perpustakaan.
- 06 Evaluasi Pasca Diklat.
- 07 Pengembangan Pustakawan:
 - 01 Sertifikasi Tenaga Perpustakaan.
 - 02 Pembinaan Tenaga Perpustakaan.
 - 05 Penerbitan Jurnal.
 - 06 Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan:
 - 01 Tim Penilai Instansi (Perpustakaan Nasional).
 - 02 Tim Penilai Pusat.
 - 07 Pemasyarakatan .
 - 08 Evaluasi Tenaga Perpustakaan.
 - 09 Pangkalan Data Tenaga Perpustakaan.
 - 10 Pangkalan Data Tim Penilai Pustakawan.
- KS. Urusan Kesehatan:
 - 01 Upaya Kesehatan:
 - 01 Upaya Kesehatan Dasar:
 - 01 Pelayanan Kedokteran Keluarga.
 - 02 Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer.
 - 03 Pelaksanaan Kesehatan Primer.
 - 04 Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas.
 - 05 Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit.
 - 06 ICD 10, Destistry & Stomatology.
 - 07 Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah.
 - 08 Penyakit Mulut di Tingkat Primer.
 - 09 Pembiayaan Darah.
 - 10 Penggunaan Darah Rasional.
 - 11 Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah.
 - 12 Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan.
 - 13 Akreditasi Puskesmas.
 - 14 Puskesmas Berprestasi.
 - 02 Upaya Kesehatan Rujukan:
 - 01 Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Bergerak, Pratama, Publik, Priovat dan Kusus).
 - 02 Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK).
 - 03 Pelayanan Rumah Sakit Privat (SPGDT Call 119, Rekeyasa Jaringan, Geriartri, Medical tourism, Hyperbarik).
 - 04 Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain (Pelayanan Kanker, Rujukan Regional dan Pencegahan Froud).
 - 05 Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pendidikan (Keselamatan Pasien, Jantung dan pembuluh darah, Ginjal, HIV/AIDS, Tim Reproduksi Penguatan Rumah sakit Vertikal dan PPDSBK).
 - 06 Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (Biaya Klaim).
 - 07 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa.
 - 08 Badan Pengawas di Rumah Sakit.
 - 09 Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanaman Modal Asing (Usulan penetapan, Rekomendasi, Profil dan Data Rumah Sakit, Self Instrumen Assesment, Keputusan dan Sertifikat).

- 10 Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain (Standar Nasional, Standar Internasional, Rumah Sakit Oasca Akreditasi Nasional dan Surveyor).
- 03 Keperawatan dan Keteknisian Medik:
 - 01 Pelayanan Keperawatan Dasar.
 - 02 Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit.
 - 03 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum.
 - 04 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus.
 - 05 Bina Pelayanan Kebidanan.
 - 06 Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik.
- 04 Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan:
 - 01 Mikrobiologi dan Imunologi (Laboratorium Kesehatan, Klinik, Puskesmas dan Moikrobiologi Kultur).
 - 02 Patologi dan Toksikologi (PNPME, Sarana Kesehatan).
 - 03 Radiologi (Pelayanan, dosis Radiasi Nasional, Radioterapi, Telemedicine, radiologi Diagnostik, Teleradiologi).
 - 04 Perijinan dan Sertifikasi.
 - 05 Sarana dan Prasarana Kesehatan (Bangunan Rumah Sakit Kelas A,B,C, Ruang Gawat darurat, Ruang Operasi,Ruang Perawatan Intensif.
 - 06 Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK, Rumah Sakit, Puskesmas, Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Rumah sakit dan Puskesmas).
 - 07 Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK Rumah Sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota).
- 05 Kesehatan Jiwa:
 - 01 Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kesehatan Jiwa, Kegawatdaruratan dan Promosi Kesehatan).
 - 02 Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 06 Etikolegal dan Asesmen:
 - 01 Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya.
 - 02 Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa.
 - 03 Visum Et Repertum.
- 07 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol:
 - 01 Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM).
 - 02 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol.
 - 03 Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
 - 04 Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau.
- 08 Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko:
 - 01 Kesehatan Jiwa di Sekolah.
 - 02 Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana.
 - 03 Penanggulangan Autisme.
 - 04 Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko.
 - 05 Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana.
- 02 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan:
 - 01 Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra:
 - 01 Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)(difteri, polio, penyelenggaraan kegiatan survei pre TAS filariasis, sur eilans influenza, keracunan pangan).
 - 02 Pekan Imunisasi Nasional.

- 03 Coldchain Bagi Petugas Imunisasi.
 - 04 Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi.
 - 05 Imunisasi bagi Petugas Kesehatan.
 - 06 Imunisasi di Daerah Sulit.
 - 07 Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS).
 - 08 Imunisasi bagi masyarakat umum.
 - 09 Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanaan vaksin baru DPT-HIB-Hib.
 - 10 Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B.
 - 11 Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan.
 - 12 Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Pemberian ICV (International Certificate Vaccine).
 - 13 Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Hapus Serangga dan Hapus Tikus.
 - 14 Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas.
 - 15 Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Vaksinasi Meningitis pada RS, KKP, dan Poliklinik.
 - 16 Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Kekarantinaan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan.
 - 17 Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Obat dan P3K Kapal.
 - 18 Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Kesehatan Nakoda/Pilot dan ABK/Pesawat.
 - 19 Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Air Bersih di Kapal.
 - 20 Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Fumigasi di kapal.
 - 21 Kesehatan Matra Mudik Sehat.
 - 22 Kesehatan Matra bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara.
 - 23 Kesehatan Matra Migran.
 - 24 Kesehatan Matra Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik.
 - 25 Kesehatan matra Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas.
 - 26 Kesehatan Matra Transmigrasi bagi tenaga kesehatan.
- 02 Pengendalian Penyakit Menular Langsung:
 - 01 Pengendalian Tuberkulosis/pengendalian penyakit TB.
 - 02 Pengendalian TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB.
 - 03 Laboratorium TB.
 - 03 Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual:
 - 01 Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / *Integrated Bio-Behavioural Surveillance* (IBBS).
 - 02 *Human Immuno Deficiency Virus* (HIV).
 - 03 Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test.
 - 04 Obat *Anti Retro Viral* (ARV) dan reagen tes HIV.
 - 04 Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut:
 - 01 *Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus* (MERS CoV).
 - 02 Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

- 05 Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan:
 - 01 Diare.
 - 02 Tifoid.
 - 03 Hepatitis.
- 06 Pengendalian Kusta dan Frambusia:
 - 01 Kusta.
 - 02 Frambusia.
 - 03 Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK).
- 07 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang:
 - 01 Pengendalian Malaria (kelambu berinsektisida (LLINs), Malaria, Crosschecker mikroskopis malaria).
 - 02 Pengendalian Arbovirolosisi (DBD, Chikungunya, Ebola).
- 08 Pengendalian Zoonosis:
 - 01 Penyakit flu burung.
 - 02 Vaksin Anti Rabies (VAR) baru.
 - 03 Penyakit Pes.
 - 04 Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1).
- 09 Pengendalian Filariasis dan Kecacingan:
 - 01 Filariasis.
 - 02 Kecacingan.
 - 03 Schistosomiasis.
- 10 Pengendalian Vektor.
- 11 Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- 12 Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah:
 - 01 Penyakit Jantung.
 - 02 Penyakit Pembuluh darah.
 - 03 Penyakit Hipertensi.
 - 04 Penyakit Stroke.
- 13 Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik:
 - 01 Penyakit Diabetes Mellitus.
 - 02' Penyakit gangguan Metabolik.
 - 03' Penyakit gangguan Tiroid.
 - 04 Gangguan Obesitas.
 - 03 Pengendalian Penyakit Kanker.
- 14 Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif:
 - 01 Penyakit Akibat produk tembakau.
 - 02 Asma, Lupus, Thalassemia.
- 15 Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan:
 - 01 Pengendalian Cidera.
 - 02 Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas.
 - 03 Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan.
- 16 Penyehatan Lingkungan:
 - 01 Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Pengawasan Kualitas Air Minum.
 - 02 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- 17 Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum:
 - 01 Higiene sanitasi dan Bangunan Umum.
 - 02 Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan.
 - 03 Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum.

- 18 Penyehatan kawasan dan sanitasi darurat:
 - 01 Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan:
 - 02 Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan.
 - 03 Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat.
 - 04 Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar.
- 19 Higiene Sanitasi Pangan:
 - 01 Makanan Jajanan.
 - 02 Restoran / Rumah Makan.
 - 03 Jasa Boga.
 - 04 Depot Air Minum.
- 20 Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi:
 - 01 Medis Fasyankes.
 - 02 Limbah Medis (Free Mercury).
 - 03 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
 - 04 Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion.
- 21 Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan:
 - 01 Pengembangan Teknologi dan Laboratorium.
 - 02 Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Pengendali Penyakit.
 - 03 Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
 - 04 Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Kesehatan Matra.
 - 05 Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Model dan Teknologi Tepat Guna.
 - 06 Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Uji kendali mutu dan kalibrasi.
 - 07 Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi.
- 22 Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan:
 - 01 Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC).
 - 02 Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC).
 - 03 Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal.
- 23 Sertifikat:
 - 01 Health Certificate.
 - 02 International Certificate of Vaccination.
 - 03 Surat Keretangan Pengujian Kesehatan Nahkoda/Pilot dan Anak Buah.
 - 04 Kapal/Pesawat Udara.
 - 05 Sertifikat Air Bersih.
 - 06 Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal.
 - 07 Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan.
- 03 Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak:
 - 01 Gizi Makro:
 - 01 Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK; Stunting).
 - 02 Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu).
 - 02 Gizi Mikro:
 - 01 Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi).
 - 02 Manajemen Taburia.

- 03 Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya.
- 03 Gizi Klinik dan Dietetik:
 - 01 Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi.
 - 02 Tatalaksana Anak Gizi Buruk.
 - 03 Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih.
- 04 Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan:
 - 01 Makanan Pendamping ASI.
 - 02 ASI Eksklusif.
 - 03 Pedoman Gizi Seimbang.
 - 04 Makanan Bayi dan Anak.
 - 05 Buffer Stock Makanan Pendamping ASI.
 - 06 Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g Makanan Tambahan Anak Sekolah.
- 05 Kewaspadaan Gizi:
 - 01 Surveilans Gizi.
 - 02 Epidemiologi Kasus Gizi Buruk.
 - 03 Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana.
 - 04 Jejaring Informasi Pangan dan Gizi.
- 04 Kesehatan Ibu:
 - 01 Kesehatan Ibu Hamil:
 - 01 Pelayanan Antenatal Terpadu.
 - 02 Pelayanan Kelas Ibu Hamil.
 - 03 Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA).
 - 02 Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas:
 - 01 Kemitraan Bidan dan Dukun.
 - 02 Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
 - 03 Supervisi Fasilitatif.
 - 03 Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi:
 - 01 Audit Maternal Perinatal.
 - 02 Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat.
 - 03 Tanda Bahaya pada Kehamilan.
 - 04 Surveilans Kematian Ibu.
 - 04 Keluarga Berencana:
 - 01 Pelayanan KB Pasca Persalinan.
 - 02 Pelatihan KB Pasca Persalinan.
 - 05 Perlindungan Kesehatan Reproduksi:
 - 01 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT).
 - 02 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro).
 - 03 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.
 - 04 Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK).
- 05 Kesehatan Anak:
 - 01 Kelangsungan Hidup Bayi:
 - 01 Pelayanan Kesehatan Neonatal.
 - 02 Manajemen Asfeksia.
 - 03 Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah).
 - 04 Pencegahan Infeksi.
 - 02 Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah:
 - 01 Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang).

- 02 Rujukan Tumbuh Kembang.
- 03 Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT).
- 03 Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko:
 - 01 Screening Hypotheroid Congenital.
 - 02 Surveillance Kesehatan Anak.
 - 03 Surveillance Kesehatan Bawaan.
- 04 Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja:
 - 01 Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit.
 - 02 Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja.
 - 03 Usaha Kesehatan Sekolah.
- 05 Perlindungan Kesehatan Anak:
 - 01 Korban kekerasan terhadap anak.
 - 02 Anak dengan disabilitas.
 - 03 Anak terlantar/anak jalanan di panti.
 - 04 Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan.
 - 05 Anak kelompok terasing/kelompok minoritas.
- 06 Kesehatan Tradisional Alternatif Dan Komplementer:
 - 01 Kesehatan Tradisional Keterampilan:
 - 01 Akupresure.
 - 02 Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional.
 - 03 Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes.
 - 04 Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya.
 - 02 Kesehatan Tradisional Ramuan:
 - 01 Health Tourism.
 - 02 Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA).
 - 03 Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
 - 04 Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional.
 - 05 Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes.
 - 03 Kesehatan Alternatif dan Komplementer:
 - 01 Akupunktur.
 - 02 Obat Herbal / Obat Tradisional.
 - 03 Integrasi Yankestrad.
 - 04 Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya.
 - 04 Penapisan dan Kemitraan:
 - 01 Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T).
 - 02 Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.
 - 03 Penapisan Pengobat Tradisional Asing.
 - 04 Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.
 - 05 Pengobat Tradisional (Lokal).
 - 06 Asosiasi Pengobat Tradisional.
- 07 Kesehatan Kerja dan Olah Raga:
 - 01 Pelayanan Kesehatan Kerja:
 - 01 Penyakit Akibat Kerja.
 - 02 Pemeriksaan Kesehatan Pekerja.
 - 03 Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).
 - 02 Kapasitas Kerja:
 - 01 Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif.
 - 02 Kapasitas Kesehatan Kerja/
 - 03 TP ASI.